

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenperin 2025—2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenperin 2025—2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra

Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Renstra Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 5

- (1) Seluruh unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun rencana strategis tahun 2025—2029 dengan mengacu pada Renstra Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan rancangan rencana strategis tahun 2025—2029 kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Kepala Biro Perencanaan melakukan penelaahan terhadap rancangan rencana strategis tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian rancangan rencana strategis unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pimpinan unit kerja eselon I dan pimpinan pembina unit pelaksana teknis.
- (5) Rencana strategis yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Rencana strategis tahun 2025—2029 pada unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mencantumkan matriks keterkaitan yang berisi:

- a. sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. klasifikasi rincian output;
 - d. rincian output; dan
 - e. aktivitas/komponen kegiatan,
- pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra Kemenperin 2025—2029.

Pasal 7

- (1) Pimpinan unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pimpinan unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2021 Nomor 1430) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025—2029

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
 - 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
 - 2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian pada Rencana Strategis 2025—2029
 - 3. Aspirasi Masyarakat
- B. Potensi dan Permasalahan
 - 1. Potensi
 - 2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1	PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA PER TRIWULANAN 2020—2024 (DALAM PERSEN (%))
TABEL 2	PERKEMBANGAN DAN PROGNOSA PDB BEBERAPA NEGARA ASEAN TAHUN 2020—2024 (DALAM PERSEN (%))
TABEL 3	PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PDB BEBERAPA NEGARA LAIN DI DUNIA TAHUN 2020—2024 (DALAM PERSEN (%))
TABEL 4	PERTUMBUHAN PDB INDONESIA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA TAHUN 2020—2024 (Y TO Y) TAHUN DASAR 2010 (DALAM PERSEN (%))
TABEL 5	PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS TAHUN 2020—2024 MENURUT CABANG INDUSTRI TAHUN DASAR 2010 (DALAM PERSEN (%))
TABEL 6	SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020—2024
TABEL 7	CAPAIAN KINERJA SASARAN RENSTRA KEMENPERIN 2020—2024
TABEL 8	LAJU PERTUMBUHAN PDB TAHUN 2011—2024
TABEL 9	INDIKASI RISIKO SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025—2029
TABEL 10	KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029
TABEL 11	NOMENKLATUR ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BESERTA DENGAN TUGASNYA
TABEL 12	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029
TABEL 13	SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029
TABEL 14	KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TABEL 15	KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029 BERDASARKAN UNIT ESELON I (DALAM MILYAR RUPIAH)

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 PERDAGANGAN SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2020—2024
- GAMBAR 2 SEPULUH BESAR NEGARA TUJUAN EKSPOR & ASAL IMPOR SEKTOR INDUSTRI (USD MILIAR)
- GAMBAR 3 IMPOR INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN BARANG TAHUN 2024
- GAMBAR 4 REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2024
- GAMBAR 5 GRAFIK *REVEALED SYMMETRIC COMPARATIVE ADVANTAGE* (RSCA)/ *TRADE BALANCE INDEX* (TBI) INDONESIA
- GAMBAR 6 PERTUMBUHAN PER SEKTOR (2011—2024)
- GAMBAR 7 PERBANDINGAN SUKU BUNGA ANTARA INDONESIA DENGAN TIGA NEGARA LAINNYA TAHUN 2010—2024
- GAMBAR 8 PERBANDINGAN RESTRIKSI FDI ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM
- GAMBAR 9 PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS PER PEKERJA ANTARA INDONESIA DAN 4 NEGARA LAINNYA
- GAMBAR 10 PERBANDINGAN PARTISIPASI INDONESIA, MALAYSIA, FILIPINA, SINGAPURA, THAILAND, DAN VIETNAM DALAM *GLOBAL VALUE CHAIN* (2010 DAN 2019)
- GAMBAR 11 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kondisi perekonomian periode tahun 2020—2024 menjadi fase penuh dinamika yang secara signifikan memengaruhi arah pembangunan nasional, termasuk di sektor industri. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melanda secara global pada awal tahun 2020 memberikan dampak multidimensi terhadap perekonomian Indonesia. Penurunan permintaan domestik dan global, terganggunya rantai pasok, pembatasan aktivitas produksi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan sektor industri manufaktur.

Pelaksanaan pembangunan industri pada periode tahun 2020—2024 didasarkan atas Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 (Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024) yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015—2035, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024, dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020—2024. Substansi utama Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 merupakan turunan dari RPJMN tahun 2020—2024. Di sisi lain, secara kerangka waktu penyusunan dokumen, RPJMN tahun 2020—2024 disusun sejak tahun 2019 dan ditetapkan pada 17 Januari 2020, sehingga asumsi yang digunakan dalam penyusunannya belum terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19. Kondisi ini tentu membuat target pembangunan nasional yang ada dalam RPJMN masih sangat optimis. Kementerian Perindustrian telah menetapkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 yang mengacu pada RPJMN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024.

Dengan adanya penyesuaian organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian dan kondisi pandemi Covid-19, telah dilakukan perubahan atas Renstra Kementerian Perindustrian. Perubahan Renstra Kementerian Perindustrian dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024. Perubahan tersebut diantaranya adalah penambahan dan perubahan atas indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan dampak yang terjadi akibat penyebaran Covid-19.

Guna kelancaran pencapaian Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024, Kementerian Perindustrian melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pada Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024. Arah kebijakan yang dimaksud yaitu melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri meliputi:

1. kebijakan pengembangan sumber daya industri yang dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pengembangan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri yang diimplementasikan dengan pengembangan sumber daya manusia industri, pengembangan infrastruktur industri, dan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

3. kebijakan pemberdayaan industri yang dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan industri menengah, pengembangan industri hijau, pengembangan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerja sama internasional di bidang industri, dan pemberdayaan industri halal.
4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri yang bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Kawasan Industri (KI) serta pembangunan atau revitalisasi sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).
5. kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri melalui kegiatan akselerasi pertumbuhan sektor industri dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor, serta penyiapan SDM Industri yang kompeten), penguatan dan pendalaman struktur industri nasional bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pionir) atau perusahaan industri *existing* yang melakukan perluasan komoditi baru, mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru, dan pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.
6. kebijakan reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*).

Capaian pelaksanaan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 merupakan cerminan kinerja jangka menengah Kementerian Perindustrian. Secara garis besar, capaian tersebut mencakup hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri dan capaian Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri meliputi hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenperin 2020—2024. Pada periode tahun 2020—2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil capaian sebagai berikut:

a. Kondisi perekonomian global pada tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan yang mencerminkan dampak pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi nasional. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup besar pada tahun 2020, terutama pada triwulan II dengan kontraksi sebesar -5,32% (minus lima koma tiga puluh dua persen). Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 meskipun pada triwulan I masih terlihat kontraksi sebesar -0,69% (minus nol koma enam puluh sembilan persen), namun pada triwulan II terjadi lonjakan pertumbuhan

ekonomi menjadi 7,08% (tujuh koma nol delapan persen) yang dipengaruhi oleh efek *low base* (anggaran terbatas) tahun sebelumnya serta peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi dalam negeri. Setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5% (lima persen) yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Per Triwulanan 2020—2024 (Dalam Persen (%))

Tahun	Triwulan			
	I	II	III	IV
2020	2,97	-5,32	-3,49	-2,17
2021	-0,69	7,08	3,53	5,03
2022	5,02	5,46	5,73	5,01
2023	5,04	5,17	4,94	5,04
2024	5,11	5,05	4,95	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS/Diolah 2025)

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dan *Asian Development Bank* (ADB), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan beberapa negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) mengalami kontraksi yang cukup besar akibat penerapan pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan global (lihat Tabel 2). Namun demikian, hanya Vietnam yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) yang merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2020. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan Singapura yang mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 8,9%. (delapan koma sembilan persen). Pada tahun 2023 dan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi negara ASEAN cenderung stabil dimana Indonesia diperkirakan tumbuh konsisten sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen) dan 5,03% (lima koma tiga lima persen). Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki resiliensi ekonomi yang cukup kuat meskipun terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Tabel 2 Perkembangan dan Prognosa PDB Beberapa Negara ASEAN Tahun 2020-2024 (Dalam Persen (%))

No	Negara	PDB (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indonesia	-2,1	3,7	5,3	5,05	5,03
2	Singapura	-4,1	8,9	3,6	1,1	2,6
3	Malaysia	-5,6	3,1	8,7	3,6	4,5
4	Thailand	-6,1	1,5	2,6	1,9	2,3
5	Vietnam	2,9	2,6	8,0	5,1	6,0
6	Filipina	-9,5	5,7	7,6	5,5	6,0

Sumber: IMF World Economic Outlook 2024, ADB Asian Development Outlook 2024, dan BPS diolah 2025

Sedangkan dari sisi perekonomian global tergambar pada Tabel 3, dimana hanya Tiongkok yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,3% (dua koma tiga persen) pada tahun 2020. Tahun 2021 menjadi titik balik bagi sebagian besar negara dimana Tiongkok sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) dan Inggris sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen) mengalami pertumbuhan tertinggi. Sedangkan pada tahun 2023 dimana sebagian besar negara mengalami perlambatan pertumbuhan, Indonesia tetap tumbuh stabil di angka 5,05% (lima koma nol lima persen) dan tetap konsisten hingga tahun 2024.

Tabel 3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDB Beberapa Negara Lain di Dunia Tahun 2020—2024 (Dalam Persen (%))

No	Negara	PDB (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Amerika Serikat	-3,4	5,9	2,1	2,5	2,7
2	Rusia	-2,7	5,6	-2,1	3,0	2,6
3	Tiongkok	2,3	8,1	3,0	5,2	4,6
4	Jepang	-4,5	2,2	1,0	1,9	0,9
5	Inggris	-9,9	7,4	4,1	0,1	0,5
6	Perancis	-7,9	6,8	2,5	0,9	1,0
7	Australia	-2,2	4,9	3,7	1,8	2,2

Sumber: IMF World Economic Outlook database 2024

b. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020—2024

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2020—2024 sesuai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen). Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Indonesia berhasil bangkit dan tumbuh hingga mencapai 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) di tahun 2022. Tetapi kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen) dan cenderung stagnan pada tahun 2024 sebesar 5,03% (lima koma nol tiga persen). Data selengkapnya tersaji pada Tabel 4 dibawah.

Tabel 4 Pertumbuhan PDB Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020—2024 (Y to Y) Tahun Dasar 2010 (Dalam Persen (%))

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	1,31	0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4,00	4,38	6,12	4,90
3	Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,64	4,43
	a. Industri Migas	-6,81	0,57	3,72	4,16	1,04
	b. Industri Nonmigas	-2,52	3,67	5,01	4,69	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,61	4,91	4,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	4,90	1,56
6	Konstruksi	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,85	4,86
8	Transportasi dan Pergudangan	-15,05	3,24	19,87	13,96	8,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	10,00	8,56
10	Informasi dan Komunikasi	10,61	6,82	7,73	7,59	7,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,56	1,93	4,77	4,74
12	Real Estate	2,32	2,78	1,72	1,43	2,50
13	Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	8,24	8,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-0,33	2,52	1,51	6,40
15	Jasa Pendidikan	2,61	0,11	0,55	1,77	3,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	10,45	2,75	4,67	8,11
17	Jasa lainnya	-4,10	2,12	9,47	10,52	9,80
	PDB	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS diolah 2025

Dari 17 (tujuh belas) sektor yang ada, terdapat 10 (sepuluh) sektor yang mengalami perlambatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 9,80% (sembilan koma delapan puluh persen), transportasi dan pergudangan sebesar 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen), dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,56% (delapan koma lima puluh enam persen).

Perkembangan pertumbuhan industri nonmigas tahun 2024 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2024 tumbuh 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen). Namun, masih lebih rendah dibanding PDB tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,03% (lima koma nol tiga persen).

c. Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) subsektor industri yang mengalami kontraksi dan 4 (empat) subsektor industri yang mengalami perlambatan. Adapun 3 (tiga) subsektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2024, yaitu:

- 1) industri barang galian bukan logam sebesar -0,60% (minus nol koma enam puluh persen) dari sebelumnya 4,11% (empat koma sebelas persen);
- 2) industri mesin dan perlengkapan sebesar -0,42% (minus nol koma empat puluh dua persen) dari sebelumnya -0,03% (minus nol koma nol tiga persen); dan
- 3) industri alat angkutan sebesar -2,10% (minus dua koma sepuluh persen) dari sebelumnya 7,63% (tujuh koma enam puluh tiga persen).

Subsektor industri yang mengalami perlambatan pada 2024, yaitu:

- 1) industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,49% (tiga koma empat puluh sembilan persen) dari sebelumnya 4,80% (empat koma delapan puluh persen);
- 2) industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 2,61% (dua koma enam puluh satu persen) dari sebelumnya 4,52% (empat koma lima puluh dua persen);
- 3) industri logam dasar yang tumbuh sebesar 13,34% (tiga belas koma tiga puluh empat persen) dari sebelumnya 14,17% (empat belas koma tujuh belas persen); dan
- 4) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik yang tumbuh sebesar 6,16% (enam koma enam belas persen) dari sebelumnya 13,67% (tiga belas koma enam puluh tujuh persen).

Tabel 5 Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2020—2024 Menurut Cabang Industri Tahun Dasar 2010 (Dalam Persen (%))

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Makanan dan Minuman	1,58	2,54	4,90	4,47	5,90
2	Industri Pengolahan Tembakau	-5,78	-1,32	-2,34	4,80	3,49
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-8,88	-4,08	9,34	-1,98	4,26
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-8,76	7,75	9,36	-0,34	6,83
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-2,16	-3,71	0,59	1,20	2,79
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,22	-2,89	3,73	4,52	2,61
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9,39	9,61	0,69	0,11	5,86
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-5,61	1,08	-4,10	-3,63	1,75
9	Industri Barang Galian bukan Logam	-9,13	0,89	-2,00	4,11	-0,60
10	Industri Logam Dasar	5,87	11,50	14,80	14,17	13,34

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-5,46	-1,62	6,71	13,67	6,16
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	-10,17	11,43	11,37	-0,03	-0,42
13	Industri Alat Angkutan	-19,86	17,82	10,67	7,63	-2,10
14	Industri Furnitur	-3,36	8,16	-1,99	-2,04	2,07
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-0,88	-1,64	6,08	-2,10	3,54
Industri Pengolahan Nonmigas		-2,52	3,67	5,01	4,69	4,75
PDB		-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS diolah 2025

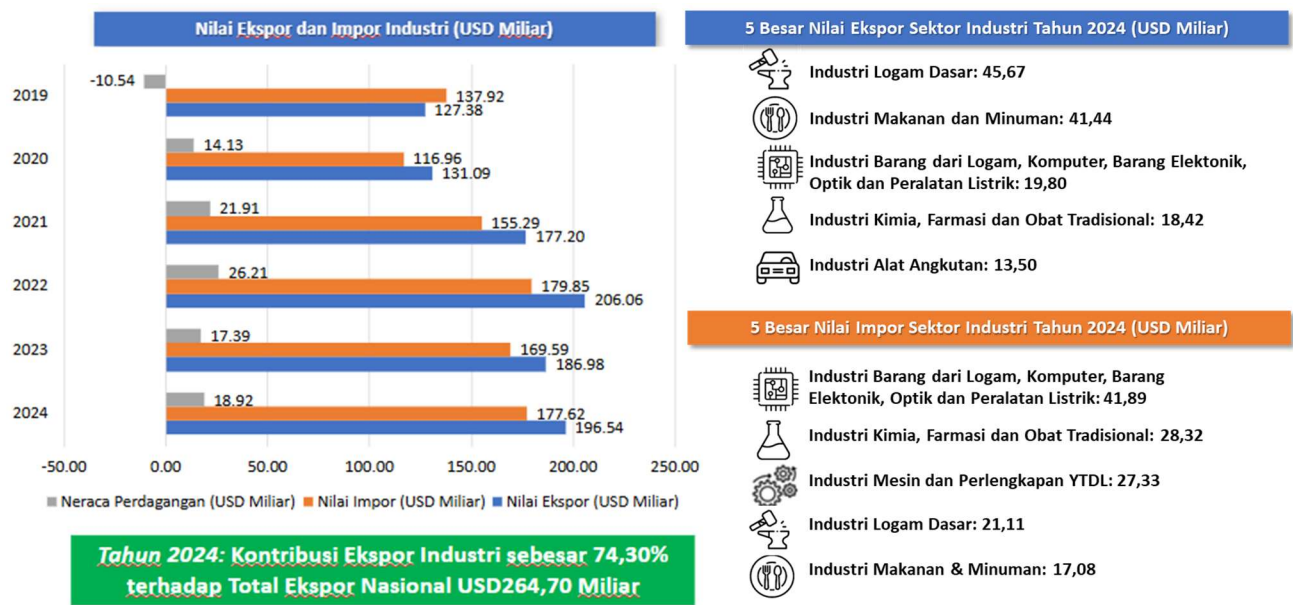
Subsektor industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2024 antara lain:

- 1) industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh persen) dari sebelumnya 4,47% (empat koma empat puluh tujuh persen);
- 2) industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 4,26% (empat koma dua puluh enam persen) dari sebelumnya -1,98% (minus satu koma sembilan puluh delapan persen);
- 3) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,83% (enam koma delapan puluh tiga persen) dari sebelumnya -0,34% (minus nol koma tiga puluh empat persen);
- 4) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang tumbuh sebesar 2,79% (dua koma tujuh puluh sembilan persen) dari sebelumnya 1,20% (satu koma dua puluh persen);
- 5) industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 5,86% (lima koma delapan puluh enam persen) dari sebelumnya 0,11% (nol koma sebelas persen);
- 6) industri karet, barang dari karet dan plastik yang tumbuh sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari sebelumnya -3,63% (minus tiga koma enam puluh tiga persen);
- 7) industri furnitur yang tumbuh sebesar 2,07% (dua koma nol tujuh persen) dari sebelumnya -2,04% (minus dua koma nol empat persen); dan
- 8) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 3,54% (tiga koma lima puluh empat persen) dari sebelumnya -2,10% (minus dua koma sepuluh persen).

d. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas Pada Tahun 2020—2024

Setelah neraca perdagangan mengalami defisit pada tahun 2019, kondisi pada tahun 2020 berbalik dimana terjadi surplus perdagangan sebesar US\$ 14,13 Miliar (empat belas koma tiga belas miliar dolar Amerika Serikat). Tren positif berlanjut pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Puncak ekspor terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar US\$ 206,06

Miliar (dua ratus enam koma nol enam miliar dolar Amerika Serikat) dengan surplus perdagangan sebesar US\$ 26,21 Miliar (dua puluh enam koma dua puluh satu miliar dolar Amerika Serikat). Pada tahun 2023 dan 2024 nilai ekspor sedikit menurun namun Indonesia masih bisa menjaga surplus perdagangan. Hal tersebut menunjukkan ketahanan industri Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan gangguan rantai pasok.



Gambar 1 Perdagangan Sektor Industri Tahun 2020—2024

Pada tahun 2024, sektor industri memberikan kontribusi ekspor sebesar 74,30% (tujuh puluh empat koma tiga puluh persen) (data BPS diolah) dari total ekspor nasional yang nilainya sebesar US\$264,70 miliar (dua ratus enam puluh empat koma tujuh puluh miliar dolar Amerika Serikat) (data BPS diolah). Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat ekspor terbesar sektor industri ditempati oleh industri logam dasar dengan nilai ekspor sebesar US\$45,67 miliar (empat puluh lima koma enam puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat). Sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik dengan nilai sebesar US\$41,89 miliar (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan miliar dolar Amerika Serikat).

EKSPOR TAHUN 2024				IMPOR TAHUN 2024			
1		Tiongkok	42,19	1		Tiongkok	69,03
2		Amerika Serikat	25,83	2		Jepang	14,77
3		India	12,71	3		Singapura	9,60
4		Jepang	11,96	4		Thailand	9,34
5		Filipina	7,48	5		Korea Selatan	8,55
6		Malaysia	7,35	6		Amerika Serikat	7,16
7		Singapura	7,23	7		Vietnam	6,26
8		Vietnam	7,19	8		Malaysia	5,90
9		Korea Selatan	5,84	9		India	4,70
10		Australia	4,79	10		Brazil	4,61

Sumber: BPS diolah 2024

Gambar 2 Sepuluh Besar Negara Tujuan Ekspor & Asal Impor
Sektor Industri (USD Miliar)

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 negara tujuan ekspor sektor industri terbesar Indonesia yaitu Tiongkok sebesar US\$42,19 miliar (empat puluh dua koma sembilan belas miliar dolar Amerika Serikat), Amerika Serikat sebesar US\$25,83 miliar (dua puluh lima koma delapan puluh tiga miliar dolar Amerika Serikat), dan India sebesar US\$12,71 miliar (dua belas koma tujuh puluh satu miliar dolar Amerika Serikat). Sedangkan, untuk negara asal impor sektor industri terbesar masih ditempati oleh Tiongkok sebesar US\$69,03 miliar (enam puluh sembilan koma nol tiga miliar dolar Amerika Serikat), Jepang sebesar US\$14,77 miliar (empat belas koma tujuh puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat), dan Singapura sebesar US\$9,60 miliar (sembilan koma enam puluh miliar dolar Amerika Serikat).

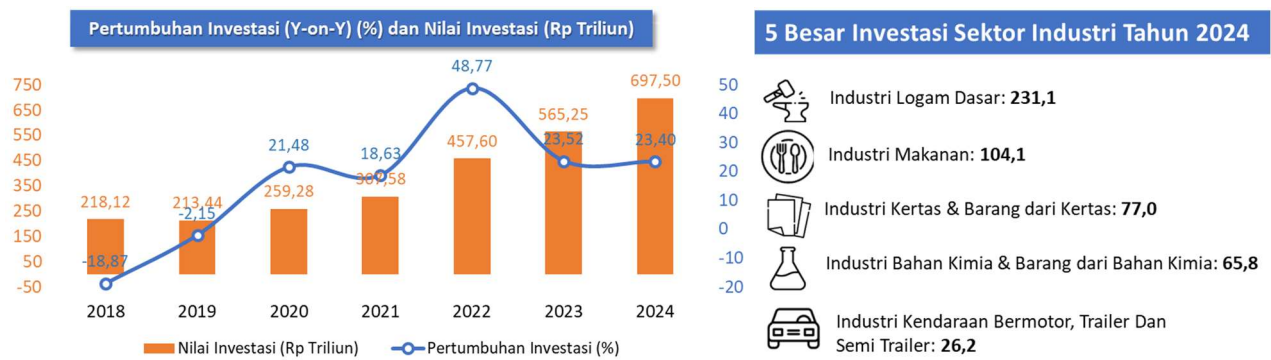
Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$169,67 miliar (seratus enam puluh sembilan koma enam puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat) atau sebesar 72,62% (tujuh puluh dua koma enam puluh dua persen) dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$41,27 miliar (empat puluh satu koma dua puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat) atau sebesar 17,67%. (tujuh belas koma enam puluh tujuh persen). Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah.



Sumber: BPS diolah 2025

Gambar 3 Impor Indonesia Menurut Penggunaan Barang Tahun 2024

- e. Perkembangan investasi Indonesia pada tahun 2020—2024
- Capaian realisasi investasi pada Tahun 2024 yakni sebesar Rp697,5 Triliun (enam ratus sembilan puluh tujuh koma lima triliun rupiah), tumbuh sebesar 23,4% (dua puluh tiga koma empat persen) dibanding tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS yang diolah, 5 (lima) subsektor industri dengan nilai realisasi investasi terbesar tahun 2024 yaitu:
- 1) Industri Logam Dasar dengan nilai investasi sebesar Rp231,1 triliun (dua ratus tiga puluh satu koma satu triliun rupiah);
 - 2) Industri Makanan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp104,1 triliun (seratus empat koma satu triliun rupiah);
 - 3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp77 triliun (tujuh puluh tujuh triliun rupiah);
 - 4) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp65,8 triliun (enam puluh lima koma delapan triliun rupiah); dan
 - 5) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp26,2 triliun (dua puluh enam koma dua triliun rupiah).



Sumber: BPS diolah 2025

Gambar 4 Realisasi Investasi Sektor Industri Tahun 2024

2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian pada Rencana Strategis 2020—2024

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat penyesuaian terhadap target indikator kinerja pada Renstra Kementerian Perindustrian sejalan dengan perubahan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan 2024.

Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 terdiri dari satu Sasaran Tujuan (Tj) dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan total 51 (lima puluh satu) indikator kinerja. Berikut adalah matriks pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja periode tahun 2020-2024.

Tabel 6 Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Tujuan/ Strategis	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024			Satuan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C	
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	-2,22	-2,52	3,56	3,67	5,26	5,01	5,37	4,69	5,80	4,75	81,90	%
		2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	17,8	17,9	17,8	17,4	17,95	16,48	18,37	16,75	17,90	17,16	95,87	%
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18,56	17,44	18,29	18,65	20,84	19,11	21,01	19,3	20,33	19,96	98,2	Juta Orang
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja	13,58	13,58	13,96	14,23	14,96	14,13	15,2	13,8	14,29	13,80	96,6	%
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	115,5	115,1	115,5	111,6	115,8	114,3	117,5	118,6	122,3	120,0	98,1	Rp Juta /orang/ tahun
		4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	245,9	266,3	255,3	307,6	334,9	457,6	501,6	565,3	630,6	697,5	110,6	Rp. Triliun
		5	Utilisasi Sektor Industri	Belum menjadi Indikator		61,6	63,4	64,5	69,5	69,9	70	70,2	65,3	92,9	%
		6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Belum menjadi Indikator		4	4	5	7,1	6	6,7	7	7,3	104,4	%
		7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	50	48,3	77	91,4	79	100	81	91,4	83	98,7	118,9	%
		8	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	17.000	18.919	43.000	47.752	27.600	27.769	26.500	33.094	19.286	25.048	129,88	Orang
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0	30	31	36	46	44	59	52	74	80	113	141,25	Perusahaan
		2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	12,63	12,77	12,83	12,28	13,15	11,81	13,4	11,83	13,70	11,95	87,23	%
		3	Tumbuh dan berkembangnya	20	20	60	74	100	162	160	233	260	330	126,92	IKM

No	Sasaran Tujuan/Strategis	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024			Satuan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C	
			IKM <i>startup</i> berbasis teknologi												
		4	Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	Belum menjadi Indikator		1.500	5.776	1.500	4.247	1.500	3.424	3.000	3.887	129,57	IKM
		5	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400	347	400	430	400	483	600	763	600	605	100,83	Orang
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	49	43,67	75	85,35	80	85,7	85	85,75	90	89,48	99,42	%
		2	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Belum menjadi Indikator		22	10,73	35	-5,72	35	-1,69	35	-4,58	0,00	%
		3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	49	43,67	49,9	48,16	50,9	49,8	52	50,13	53,0	52,67	99,38	%
		4	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	6.200	9.845	6.630	17.820	7.130	30.163	22.000	56.858	50.000	73.504	147,01	Produk
		5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	5	7,19	7	8,56	10	5,6	6	6,15	6,50	9,80	150,73	%
		6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Belum menjadi Indikator		2,75	3,31	3	3	3,25	3,69	3,70	3,73	100,76	Skala 1-4
		7	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Belum menjadi Indikator		60	60	65	98,61	70	98,36	95	100	105,26	%
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	1	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	125,85	131,13	134,21	177,11	145,5	206,35	222,47	186,98	193,40	196,55	101,63	US\$ Miliar
		2	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	-0,43	2,95	7,19	35,11	8,35	16,45	5,75	-9,27	3,76	5,33	141,76	%
		3	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	80,19	80,3	74,9	76,49	75,47	70,67	75,97	72,24	73,46	74,25	101,08	%
		4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor	27	28,91	28	30,75	29	41	30	44,44	32	32,44	101	%
		5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	40,22	56,08	39,07	43,99	38,05	48,09	37,03	38,9	36,21	40,61	87,85	%
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	18,6	15,53	18,8	21,29	19,2	21,17	19,6	21,23	20	21,30	106,50	%
		2	Wirusaha industri kecil yang tumbuh	4.000	7.808	8.000	13.058	12.000	20.592	20.800	46.280	47.185	59.734	126,60	WUB
		3	IKM yang melakukan	40	24	80	74	120	149	160	217	257	334	129,96	IKM

[illegible]

No	Sasaran Tujuan/Strategis	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024			Satuan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C	
	dan Berorientasi pada Layanan Prima		keuangan dan BMN												
		2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	78	78,01	78,3	78,57	78,6	79,2	78,7	80,01	79,2	80,01	101,02	Nilai
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95,5	95,9	95,7	98,1	95,9	97,96	96,1	98,25	96,3	98,53	102,32	%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	78	78,04	78,2	78,58	78,4	78,7	78,6	79,2	79,3	79,38	100,10	Nilai

Pada tahun 2024, tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas adalah sebanyak 19,96 juta (sembilan belas koma sembilan puluh enam juta) orang atau mencapai 98,2% (sembilan puluh delapan koma dua persen) dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebanyak 20,33 juta (dua puluh koma tiga puluh tiga juta) orang. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 21,94 juta (dua puluh satu koma sembilan puluh empat juta) orang. Sepanjang tahun 2024, gelombang PHK yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19, perlambatan ekonomi global, serta peningkatan produk impor ilegal menjadi tantangan besar bagi sektor industri padat karya. Kementerian Perindustrian melalui program pelatihan 3 in 1 (*three in one*) diharapkan menjadi salah satu solusi dimana tidak hanya meningkatkan keahlian tenaga kerja tetapi juga membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Pada tahun 2024, persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja adalah sebesar 13,80% (tiga belas koma delapan puluh persen) atau mencapai 96,6% (sembilan puluh enam koma enam persen) dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 14,29% (empat belas koma dua puluh sembilan persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 15,65% (lima belas koma enam puluh lima persen). Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas belum menunjukkan kenaikan yang sebanding. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan permintaan global yang mempengaruhi produksi dan keputusan perusahaan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Selain itu, tantangan seperti kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia turut memengaruhi dinamika penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas adalah sebesar Rp120,00 juta (seratus dua puluh juta rupiah) per orang per tahun atau mencapai 98,14% (sembilan puluh delapan koma empat belas persen) dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar Rp122,30 juta (seratus dua puluh dua koma tiga

puluh juta rupiah) untuk setiap orang setiap tahun. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah Rp124,73 juta (seratus dua puluh empat koma tujuh puluh tiga juta rupiah) per orang per tahun. Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas guna menghadapi tantangan era Industri 4.0. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan *3 in 1* yang mencakup *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*. Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang lebih adaptif dan berdaya saing. *Skilling* difokuskan pada calon tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman di industri. Sementara *upskilling* bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja yang sudah berpengalaman agar siap untuk jenjang karier yang lebih tinggi. Sedangkan *reskilling* diberikan kepada tenaga kerja yang terdampak perubahan teknologi agar mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Salah satu indikator yang penting dalam pemantauan pemulihan sektor industri adalah utilisasi. Utilisasi menggambarkan perbandingan/rasio realisasi produksi terhadap kapasitas produksi. Data utilisasi berasal dari industri yang disampaikan melalui SIINas. Pada tahun 2024, utilisasi sektor industri adalah sebesar 65,28% (enam puluh lima koma dua puluh delapan persen) atau mencapai 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 70,20% (tujuh puluh koma dua puluh persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 77,52% (tujuh puluh tujuh koma lima puluh dua persen). Belum tercapainya target utilisasi disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya keterbatasan bahan baku dan rendahnya permintaan pasar. Contohnya, industri pengolahan kelapa nasional menghadapi kesulitan akibat produksi kelapa yang turun hingga 31% (tiga puluh satu persen) pada 2024. Dampak *El Niño* yang berkepanjangan mengakibatkan tanaman kelapa kekurangan air, sehingga produksi menurun drastis. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan tata niaga bahan baku kelapa agar dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Selain itu, permintaan yang masih rendah untuk beberapa sektor industri aneka, seperti perhiasan, pakaian olahraga, dan mainan anak, turut menghambat peningkatan utilisasi.

Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) produk industri yang masuk dalam kategori produk berteknologi tinggi berdasarkan *Harmonized System* (HS) dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 2024, kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi adalah sebesar 11,95% (sebelas koma sembilan puluh lima persen) atau mencapai 87,23% (delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga persen) dari target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 13,70% (tiga belas koma tujuh puluh persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun

2020-2024 adalah 13,70% (tiga belas koma tujuh puluh persen). Transformasi digital industri penting untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi ekspor produk teknologi tinggi. Namun, realisasi kontribusi ekspor tidak langsung mengikuti transisi ini karena beberapa kendala, seperti jeda waktu implementasi, keterbatasan kemampuan, dan persaingan pasar.

Pada tahun 2024, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin adalah sebanyak 89,48% (delapan puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) atau mencapai 99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh dua persen) dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebanyak 90% (sembilan puluh persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 90% (sembilan puluh persen). Terdapat sejumlah kendala yang menghambat pencapaian target produk dalam negeri (PDN) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian seringkali menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat laboratorium dan bahan kimia, yang produk dalam negerinya masih terbatas. Akibatnya, pengadaan alat-alat tersebut harus dilakukan melalui impor, yang memerlukan proses izin yang panjang dan kompleks, mulai dari pengiriman hingga instalasi serta pelatihan personel. Selain itu, perbedaan penggunaan akun anggaran untuk mengukur realisasi PDN dan TKDN, serta belum masuknya akun yang digunakan pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengukuran, menambah kompleksitas dalam pengelolaan penggunaan produk dalam negeri.

Pada tahun 2024, realisasi indikator substitusi impor produk industri pengolahan nonmigas adalah sebesar -4,58 (minus empat koma lima puluh delapan) atau tidak mencapai target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 35% (tiga puluh lima persen).

Berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada *website* (<http://tkdn.kemenperin.go.id>), data hingga akhir tahun 2024 tingkat komponen dalam negeri/TKDN (rerata tertimbang) adalah sebesar 52,67% (lima puluh dua koma enam puluh tujuh persen) atau mencapai 99,38% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh delapan persen) dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 sebesar 53% (lima puluh tiga persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 53,0% (lima puluh tiga persen). Untuk mendukung pencapaian indikator TKDN, Kemenperin melakukan implementasi rantai alur bahan baku yang terintegrasi serta pengembangan sistem informasi pengawasan neraca komoditas, fasilitasi temu bisnis manufaktur (*business matching*), dan bimbingan teknis mengenai tata cara penghitungan TKDN bagi sektor industri serta *workshop* pendaftaran *e-catalog*.

Pada tahun 2024, rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar 40,61%

(empat puluh koma enam puluh satu persen) atau mencapai 87,85% (delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima persen) dari target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 36,21% (tiga puluh enam koma dua puluh satu persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 36,12% (tiga puluh enam koma dua belas persen).

Pada tahun 2024, Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi adalah sebanyak 16 KI (kumulatif) atau mencapai 94,12% (sembilan puluh empat koma dua belas persen) dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) KI (kumulatif). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 17 KI (kumulatif). Target untuk tahun 2024 sebesar 17 (tujuh belas) KI (kumulatif) RPJMN yang terbit IKUI-nya, dengan target yang tercapai hingga Tahun 2024 sebesar 16 (enam belas) KI (kumulatif) dengan rincian pada tabel dibawah ini. Dari 9 (sembilan) KI Prioritas Luar Jawa yang ditargetkan untuk beroperasi, sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 1 (satu) KI yang masih belum terbit IUKI-nya yaitu KI Tanggamus.

Jumlah KI dengan zona tematik yang beroperasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) KI (kumulatif) atau mencapai 80% (delapan puluh persen) dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) KI (kumulatif). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 3 (tiga) KI (kumulatif). Indikator ini belum dapat memenuhi target penambahan 1 (satu) KI karena calon pengelola KI Halal yaitu KI SIRIE dan KI Makassar belum dapat memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Surat Keterangan sebagai KI Halal.

Pada tahun 2024, persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa adalah sebesar 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) atau mencapai 97,58% (sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan persen) dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebesar 33,1% (tiga puluh tiga koma satu persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 33,1% (tiga puluh tiga koma satu persen).

Pada tahun 2024, hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh unit kerja adalah sebanyak 90,95% (sembilan puluh koma sembilan puluh lima persen) atau telah mencapai 98,64% (sembilan puluh delapan koma enam puluh empat persen) dari target perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2024 yang sebesar 92,20% (sembilan puluh dua koma dua puluh persen). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 93% (sembilan puluh tiga persen). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi yang dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan rekomendasi.

Secara menyeluruh, capaian kinerja sasaran sesuai dokumen Renstra Kemenperin 2020—2024 adalah sebagaimana Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Kemenperin 2020—2024

Tahun	Indikator Kinerja		Persentase Capaian
	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	
2020	31	11	73,81%
2021	43	8	84,31%
2022	35	16	68,62%
2023	38	13	74,51%
2024	36	15	70,59%
Rata-rata capaian Renstra Kemenperin 2020-2024			74,37%

Dalam mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2025—2029, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin 2020-2024 dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

3. Aspirasi Masyarakat

Pembangunan industri nasional tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian dan harapan besar dari berbagai elemen masyarakat. Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut:

a. Melanjutkan Hilirisasi Industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA)

Hilirisasi industri berbasis SDA diharapkan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja lokal, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Fokus diarahkan pada penguatan industri berbasis nikel, bauksit, kelapa sawit, hasil laut, tekstil, serta pangan strategis. Melalui hilirisasi, diharapkan struktur industri nasional menjadi lebih dalam dan kompleks, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat daya saing manufaktur nasional di pasar global.

b. Persebaran Pembangunan ke Seluruh Wilayah Indonesia

Pemerintah diharapkan terus mendorong pemerataan industri antarwilayah, khususnya di luar Pulau Jawa. Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, berbasis klaster, dan memiliki infrastruktur pendukung lengkap menjadi kunci pemerataan pertumbuhan industri. Strategi ini mendorong pembentukan aglomerasi industri baru di luar Pulau Jawa, memaksimalkan peran kawasan industri hijau, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pusat pertumbuhan industri berbasis potensi daerah.

c. Peningkatan Efisiensi Industri dengan Pemanfaatan Teknologi

Transformasi industri berbasis teknologi terus didorong dengan melakukan penguatan kebijakan, dukungan infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia digital. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor industri yang akan meningkatkan produktivitas dan penggunaan energi dan bahan baku yang lebih optimal, kedepannya pemanfaatan

teknologi pada sektor industri diharapkan mempercepat transformasi industri yang inovatif dan berkelanjutan.

d. Percepatan Transisi Menuju Industri Hijau

Pembangunan dan pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan juga menjadi hal yang perlu diakselerasi, khususnya melalui penerapan prinsip industri hijau. Ada kesadaran yang semakin tumbuh di tengah masyarakat terhadap dampak industri terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Aspirasi ini tercermin dari dorongan agar industri di masa depan menerapkan prinsip efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan.

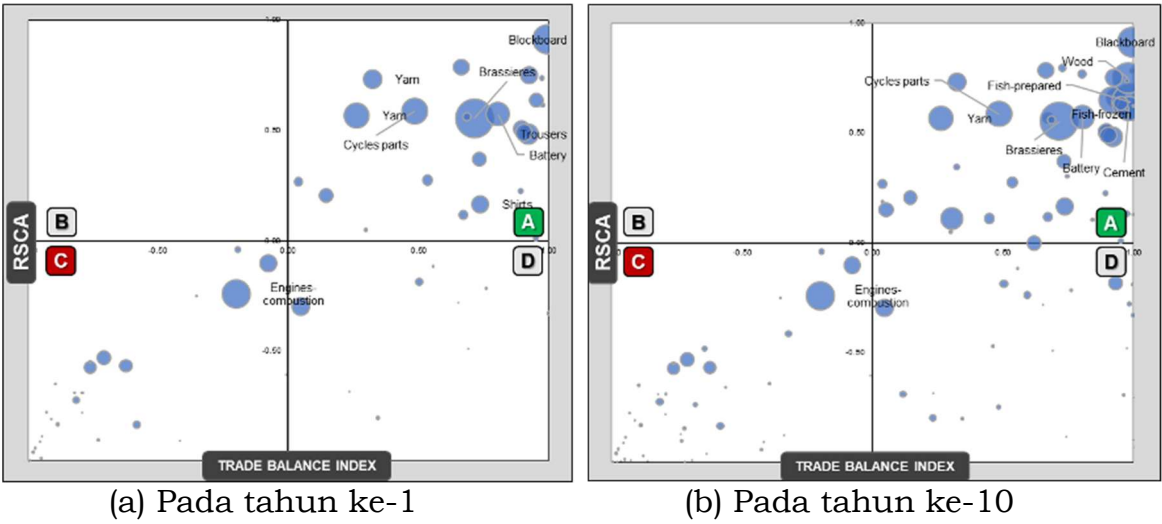
e. Penguatan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)

Diperlukan kebijakan afirmatif dalam penguatan industri kecil dan industri menengah (IKM) agar tidak tertinggal dalam era transformasi digital dan globalisasi. Pelaksanaan program pemberdayaan IKM diharapkan dapat lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan keterampilan teknis, hingga fasilitasi pemasaran berbasis digital. Digitalisasi IKM melalui platform *e-commerce* dan adopsi teknologi sederhana menjadi tuntutan nyata untuk meningkatkan daya saing sektor ini.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

- a. Indonesia memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) dengan beberapa negara mitra dagang utamanya, diantaranya *Regional Comprehensive Economic Agreement* (RCEP), *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Sejumlah FTA tersebut menawarkan manfaat penurunan tarif bea masuk, persyaratan *Rules of Origin* (ROO), dan *Non-Tariff Barrier* (NTB) yang dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri untuk memperoleh komponen produksi maupun memperkuat eksportnya. Walaupun demikian, manfaat-manfaat tersebut masih sangat bergantung pada tingkat utilisasi FTA yang ada oleh pelaku industri baik importir maupun eksportir.
- b. Pada perjanjian RCEP, produk-produk Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah dalam jangka pendek. Terutama mengingat bahwa produk-produk tersebut merupakan produk unggulan ekspor tradisional Indonesia seperti produk kayu, tekstil, baterai, komponen sepeda, dan produk ikan.



Sumber: Estimasi berdasarkan data WITS (2022)

Gambar 5 Grafik *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA)/ *Trade Balance Index* (TBI) Indonesia

- c. Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Populasi muslim di Indonesia mencapai 245,93 juta (dua ratus empat puluh lima koma sembilan puluh tiga juta) jiwa dengan potensi konsumsi diperkirakan mencapai Rp9.665,3 triliun (sembilan ribu enam ratus enam puluh lima koma tiga triliun rupiah) per tahun. Sementara itu, populasi penduduk muslim di dunia diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar (dua koma dua miliar) jiwa atau 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) dari total populasi dunia di tahun 2030. Berdasarkan Laporan *State of The Global Islamic Economy* (SGIE) Tahun 2023/2024, jumlah konsumsi produk halal diproyeksikan mencapai US\$ 3,1 triliun (tiga koma satu triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2027 dengan tingkat pertumbuhan rerata tahunan sebesar 4,8% (empat koma delapan persen). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat pada periode Januari-Oktober 2024 total ekspor produk halal Indonesia mencapai US\$ 41,42 miliar (empat puluh satu koma empat puluh dua miliar dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpotensi menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia. Letak geografis Indonesia yang dekat dengan negara-negara OKI menjadi Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai nilai halal global.
- d. Guna mendorong pertumbuhan dan penguatan industri dalam negeri, pemerintah mendorong pembelian barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program tersebut bertujuan mengoptimalkan penggunaan produk, barang, dan jasa hasil produksi dalam negeri, terutama pada pengadaan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Berdasarkan data *Bigbox* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada tahun 2024 terdapat potensi belanja pemerintah sebesar Rp1.253,72 triliun (seribu

dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua triliun rupiah) dimana Rp854,88 triliun (delapan ratus lima puluh empat koma delapan puluh delapan triliun rupiah) dikomitmenkan sebagai belanja PDN. Nilai tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana potensi belanja pemerintah sebesar Rp1.209,34 triliun (seribu dua ratus sembilan koma tiga puluh empat triliun rupiah) dimana sebesar Rp772,93 triliun (tujuh ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh tiga triliun rupiah) diperuntukkan sebagai belanja PDN.

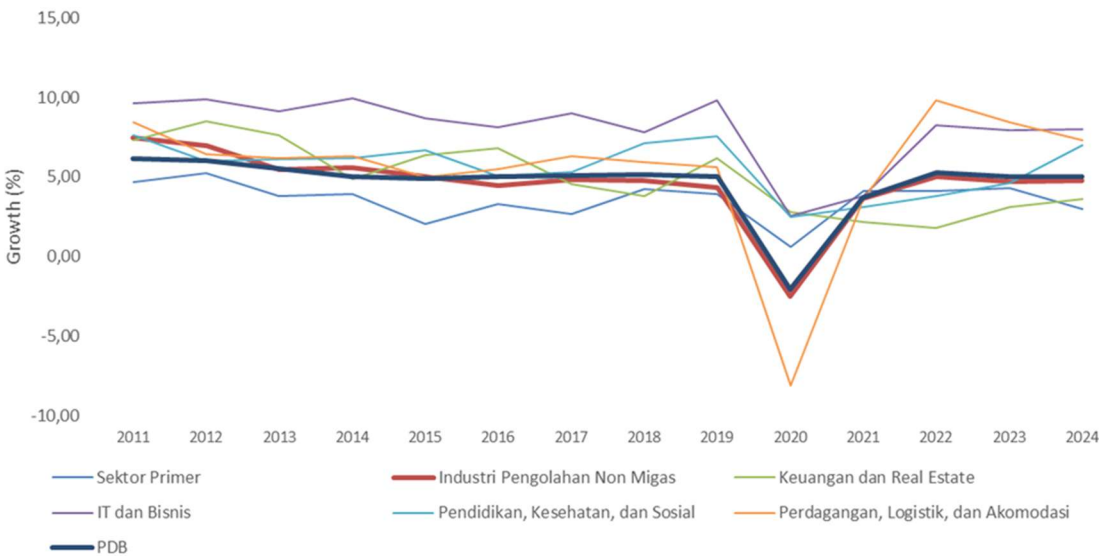
2. Permasalahan

a. Permasalahan Umum

1) Pertumbuhan Tidak Seimbang

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan pertumbuhan antarsektor dimana beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara pada sektor lain cenderung stagnan bahkan mengalami penyusutan. Sektor seperti teknologi informasi dan bisnis tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, hal tersebut dapat menyebabkan alokasi sumber daya berupa modal, tenaga kerja, dan investasi banyak mengalir ke sektor tersebut.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor digital mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga dapat mengakibatkan lapangan pekerjaan tidak tumbuh berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial dan pengangguran terselubung.



Sumber: BPS diolah 2024

Gambar 6 Pertumbuhan Per Sektor (2011—2024)

Adapun data laju pertumbuhan pada setiap sektor secara lengkap berdasarkan pada Tabel 8 berikut.

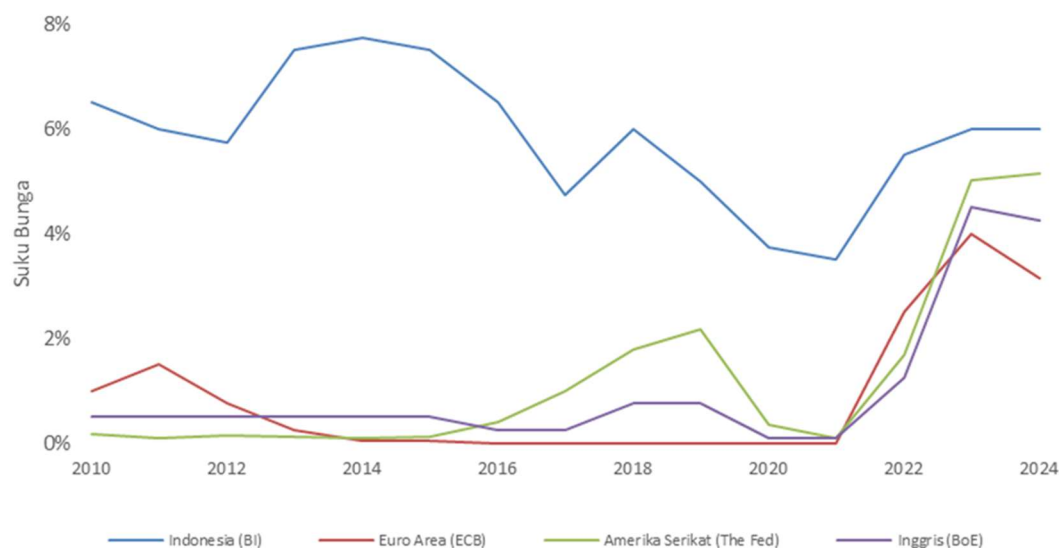
Tabel 8 Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2011—2024

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDB (%)													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,95	4,59	4,20	4,24	3,75	3,37	3,92	3,88	3,61	1,77	1,87	2,25	1,31	0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	4,29	3,02	2,53	0,43	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95	4,00	4,38	6,12	4,90
3	Industri Pengolahan Non Migas	7,46	6,98	5,45	5,61	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34	-2,52	3,67	5,01	4,69	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	10,06	5,23	5,90	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34	5,55	6,61	4,91	4,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,73	3,34	3,32	5,24	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83	4,94	4,97	3,23	4,90	1,56
6	Konstruksi	9,02	6,56	6,11	6,97	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,66	5,40	4,81	5,18	2,54	4,03	4,46	4,97	4,60	-3,79	4,63	5,53	4,85	4,86
8	Transportasi dan Pergudangan	8,31	7,11	6,97	7,36	6,71	7,45	8,49	7,05	6,38	-15,05	3,24	19,87	13,96	8,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,64	6,80	5,77	4,31	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,26	3,88	11,94	10,00	8,56
10	Informasi dan Komunikasi	10,02	12,28	10,39	10,12	9,70	8,88	9,63	7,02	9,42	10,61	6,82	7,73	7,59	7,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	9,54	8,76	4,68	8,58	8,93	5,47	4,17	6,61	3,25	1,56	1,93	4,77	4,74
12	Real Estate	7,68	7,41	6,54	5,00	4,11	4,69	3,60	3,48	5,76	2,32	2,78	1,72	1,43	2,50
13	Jasa Perusahaan	9,24	7,44	7,91	9,81	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44	0,73	8,77	8,24	8,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,43	2,13	2,56	2,38	4,63	3,20	2,05	6,97	4,66	-0,03	-0,33	2,52	1,51	6,40
15	Jasa Pendidikan	6,68	8,22	7,44	5,47	7,33	3,84	3,72	5,36	6,30	2,61	0,11	0,55	1,77	3,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,25	7,97	7,96	7,96	6,69	5,16	6,84	7,15	8,66	11,56	10,45	2,75	4,67	8,11
17	Jasa lainnya	8,22	5,76	6,40	8,93	8,08	8,01	8,73	8,95	10,57	-4,10	2,12	9,47	10,52	9,80
Produk Domestik Bruto		6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

2) Kebutuhan Akan Kapital yang Tinggi

Berdasarkan Gambar 6, tren suku bunga di Indonesia (yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/BI) dari tahun 2010 hingga tahun 2023 jika dibandingkan dengan suku bunga di Eropa (*European Central Bank/ECB*), Amerika Serikat (*Federal Reserve System/FED*), dan Inggris (*Bank of England/UK*), selalu lebih tinggi.

Suku bunga yang tinggi tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan akan kapital dalam berbagai sektor industri, terutama kapital yang bergantung dengan pendanaan dari eksternal. Hal tersebut akan meningkatkan biaya pinjaman karena bunga yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih besar. Sehingga berdampak pada pengurangan profitabilitas. Jika suku bunga tinggi maka investasi jangka panjang menjadi kurang menarik bagi investor karena *return* bisnis harus lebih besar dari suku bunga agar tetap bisa menguntungkan.



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)-2024

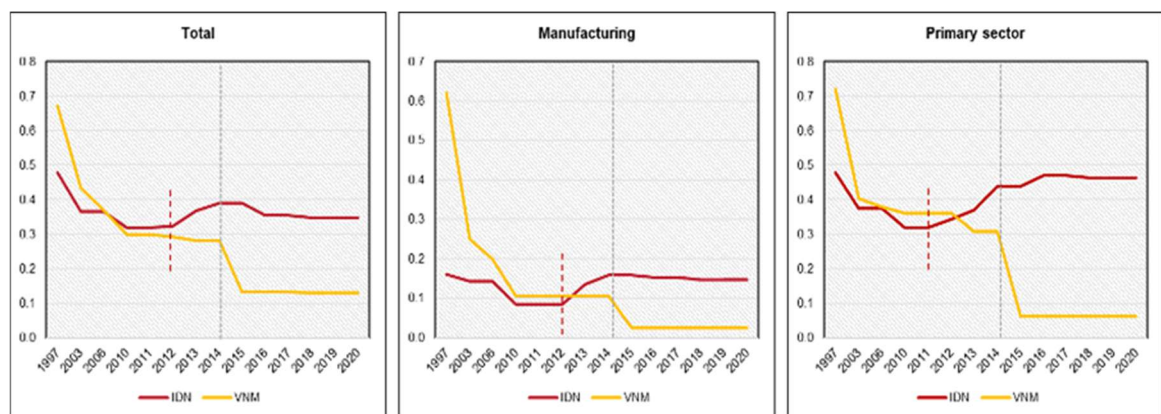
Gambar 7 Perbandingan Suku Bunga Antara Indonesia dengan Tiga Negara Lainnya Tahun 2010—2024

b. Permasalahan Eksternal

1) Aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) yang Melambat

Walaupun secara nominal aliran FDI yang masuk ke Indonesia terlihat meningkat, namun jika dihitung secara perkapita (FDI dibagi dengan jumlah populasi penduduk) nilainya relatif stagnan sejak tahun 2013. Mengalirnya FDI di Indonesia tergambarkan melalui masuknya perusahaan multinasional yang membawa teknologi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta membuat industri lebih kompetitif. Apabila peningkatan aliran FDI ini melambat, hal tersebut juga turut menggambarkan perlambatan pada sektor industri di Indonesia.

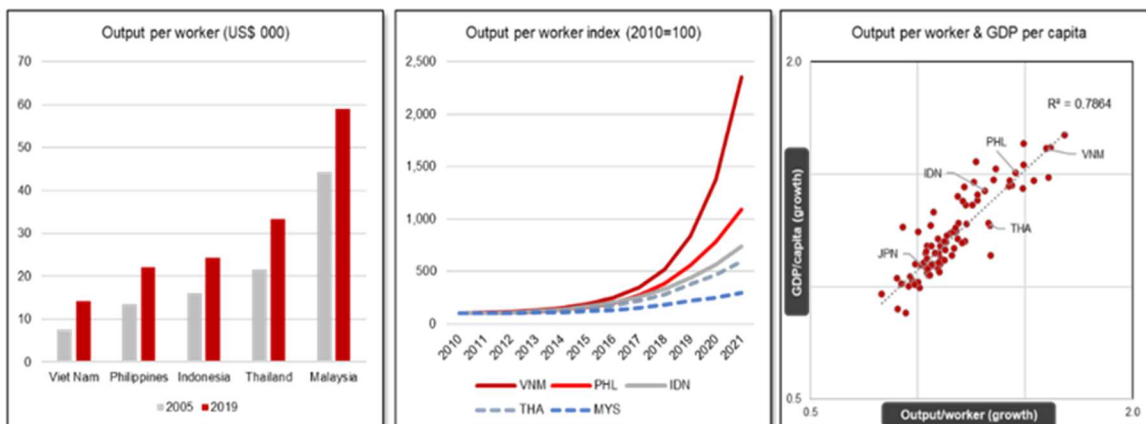
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menunjukkan bahwa industri alat utama, angkutan laut untuk penyeberangan, angkutan udara, masih menunjukkan pembatasan pada kepemilikan modal asing. Indeks restriksi FDI Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara mitra seperti Vietnam. Sedangkan pada penerapan TKDN, hampir semua industri pengolahan di Indonesia telah menerapkan TKDN dengan muatan yang terus meningkat setiap tahunnya.



Sumber: FDI *restrictiveness index* (OECD, 2022)

Gambar 8 Perbandingan Restriksi FDI
Antara Indonesia dengan Vietnam

- 2) Biaya Logistik Nasional yang Kurang Kompetitif
- Berdasarkan data Bank Dunia, *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia merosot dari ranking ke-49 di tahun 2018 menjadi peringkat ke-64 di tahun 2023 (World Bank, 2023). Penurunan ranking ini sekaligus mengindikasikan biaya logistik di Indonesia masih relatif mahal dan kurang kompetitif dibanding negara ASEAN. Rendahnya daya saing logistik Indonesia ini menyebabkan biaya produksi di Indonesia relatif kurang bersaing. Secara makro, biaya logistik Indonesia mencapai 24% (dua puluh empat persen) dari GDP, lebih mahal dibandingkan dengan Vietnam yang tercatat sebesar 16% (enam belas persen), Thailand dan Malaysia sekitar 13% (tiga belas persen), dan Singapura di angka 8% (delapan persen) (Banomyong et al., 2022; Santoso et al., 2021). Mahalnya biaya logistik termanifestasi melalui tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya membuat produk yang dihasilkan relatif mahal dan kurang bersaing.
- 3) Produktivitas Pekerja yang Rendah
- Secara makro, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan *output* per pekerja yang relatif lambat. Meskipun tidak bisa dibandingkan secara langsung, pertumbuhan produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di Vietnam dan Filipina.
- Produktivitas tenaga kerja para pekerja di kawasan industri masih relatif rendah jika dibandingkan dengan upah yang dibayarkan. Hal ini terlihat dari hasil survei lembaga Jepang (*Japan External Trade Organization/JETRO*, 2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat level upah di Indonesia terlalu tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas serupa di Vietnam. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan kepatutan upah pada level gaji yang diberikan. Sebanyak 64% (enam puluh empat persen) perusahaan afiliasi Jepang yang disurvei di Indonesia menyatakan bahwa level gaji yang diberikan tidak sesuai (terlalu tinggi). Sebaliknya 60% (enam puluh persen) responden di Vietnam menyatakan bahwa level gaji dan produktivitas pekerja di sana sudah sesuai.



Sumber: Estimasi berdasarkan data *World Development Indicator* (World Bank, 2022)

Gambar 9 Perbandingan Produktivitas Per Pekerja Antara Indonesia dan 4 Negara Lainnya

4) Tingginya Penggunaan Energi Fosil

Penggunaan energi fosil diatas 60% (enam puluh persen) dari total penggunaan energi nasional (*Institute for Essential Services Reform/IESR*, 2022).

5) Kemampuan Inovasi Yang Rendah

Kemampuan inovasi indonesia masih relatif rendah yang dibuktikan dengan *ranking global innovation index*. Pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan untuk investasi inovasi ternyata belum efektif menghasilkan *output* yang lebih berkualitas dan inovatif, bahkan Indonesia (Jakarta) belum menjadi *top of mind* kerjasama inovasi bagi investor Jepang.

c. Permasalahan Internal

1) Rendahnya Pemanfaatan FTA

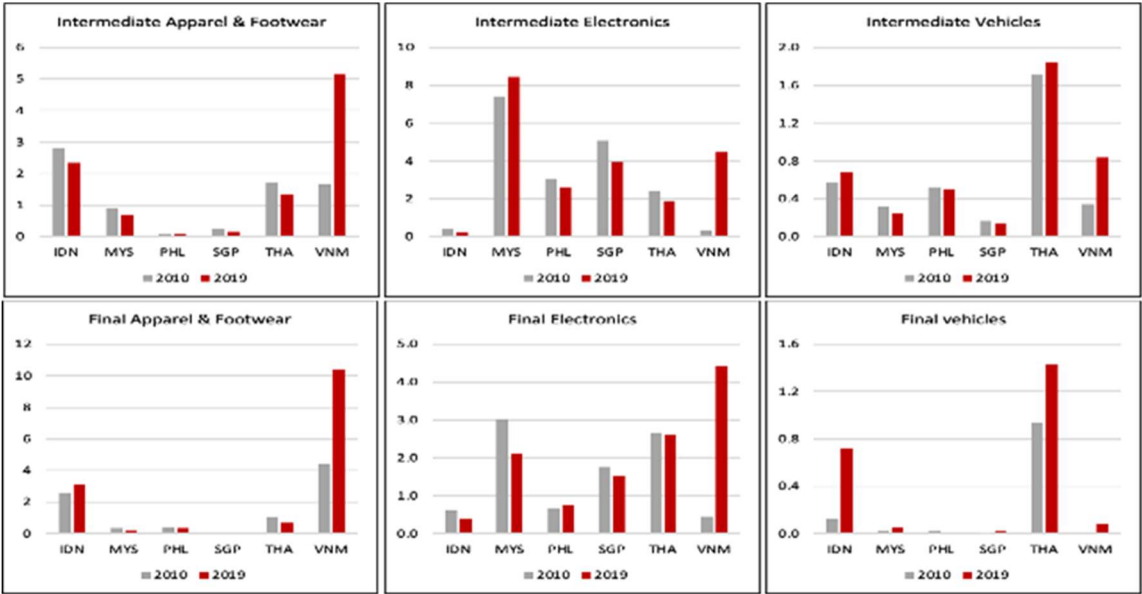
Utilisasi penggunaan FTA oleh eksportir Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan beberapa negara lain di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya nilai kompetitif produk asal Indonesia. Tingkat utilisasi FTA ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain besarnya penurunan tarif setelah memperhitungkan biaya pengurusan administrasi Surat Keterangan Asal (SKA), volume ekspor/impor, tingkat restriksi *Rules of Origin* (ROO), serta *learning effect*, dan ketersediaan informasi tentang FTA.

2) Dominasi Produk Berbasis SDA Dalam Ekspor

Ekspor Indonesia ke pasar global masih didominasi oleh produk-produk berbasis SDA. Berdasarkan data BPS tahun 2024, kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 74,25% (tujuh puluh empat koma dua puluh lima persen) dari total nilai ekspor nasional. Meskipun angka tersebut terbilang besar, namun komoditas ekspor masih didominasi oleh produk berbasis SDA dengan nilai tambah rendah seperti logam dasar, *Crude Palm Oil* (CPO), kimia dasar, serta elektronik dan transportasi dengan perkiraan sebesar 65% (enam puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas.

3) Partisipasi ke Dalam *Global Value Chain* (GVC) Masih Rendah

Partisipasi Indonesia dalam GVC relatif masih rendah dan secara umum mengalami penurunan kecuali pada produk final otomotif. Penurunan partisipasi GVC terutama terlihat pada produk pakaian dan alas kaki antara, serta elektronika antara dan jadi. Sementara peningkatan terlihat pada produk akhir pakaian dan alas kaki, serta kendaraan baik antara maupun jadi.



Sumber: Estimasi berdasarkan data WITS (2022)

Gambar 10 Perbandingan Partisipasi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam Dalam *Global Value Chain* (2010 dan 2019)

Penurunan partisipasi Indonesia di beberapa produk GVC menunjukkan lemahnya daya saing produk Indonesia di pasar dunia sehingga diperlukan identifikasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan daya saing ini.

4) Kebijakan Industri dan Perdagangan yang Belum Terkoordinasi Dengan Baik

Ketika Indonesia berencana untuk meningkatkan pertumbuhan industri yang berpartisipasi ke dalam GVC, kebijakan perdagangannya dibuat restriktif. Sebagai contoh, *Non-Tariff Barrier* (NTB) pada produk-produk GVC seperti industri makanan dan minuman masih relatif tinggi. Hal ini menyebabkan industri makanan dan minuman menjadi sulit untuk bersaing di pasar global.

5) Standarisasi dan Sertifikasi yang Masih Terkendala

Masih terdapat kendala dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang banyak disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan, seperti lokasi pengujian yang jauh, biaya yang mahal, dan proses yang lama.

6) Daya Saing Produk yang Rendah dan Semakin Kompleks

Produk industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global. Ketika beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk dengan *knowledge*

intensive yang tinggi, ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas. Di samping itu, daya saing produk unggulan ekspor Indonesia pun relatif stagnan dengan tren menurun.

7) *Mismatch* (ketidaksesuaian) Produksi dengan Permintaan Global

Terjadi *mismatch* (ketidaksesuaian) antara output industri dengan apa yang menjadi permintaan global. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor produk dengan kode HS 85 yang diantaranya mencakup produk mesin dan perlengkapan listrik serta bagian-bagiannya; perekam dan alat reproduksi suara, perekam dan alat reproduksi gambar dan suara televisi, serta bagian dan aksesorinya, yang permintaannya justru lambat di pasar global dalam 5 (lima) tahun terakhir (*Trademap*, 2023).

8) Tantangan Dalam Adopsi Teknologi

Adopsi teknologi di industri pengolahan akan kian meningkat pasca Covid-19, sehingga membutuhkan kesiapan Sumber Daya Manusia. Namun tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*) dengan persentase sebesar 89,3% (delapan puluh sembilan koma tiga persen). Berbanding tenaga kerja terampil (lulusan pendidikan tinggi yang berasal dari program STEAM) sebesar 18,6% (delapan belas koma enam persen) (BPS, 2022).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025—2029 yang merupakan tahap pertama dalam kerangka pencapaian visi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, telah ditetapkan visi Presiden periode 2025—2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi yang tergambar dalam kerangka “Asta Cita” 2025—2029 yakni:

- a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian pembangunan nasional periode tahun 2025—2029 yang tertuang dalam RPJMN, telah dipetakan Kementerian/Lembaga berdasarkan pencapaian asta cita tersebut. Kementerian Perindustrian merupakan salah satu instansi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian misi kelima yakni “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yaitu **“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. “Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri

menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**, yang pencapaiannya secara khusus digambarkan atas pencapaian indikator kinerja tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu:

1. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 18,17% (delapan belas koma tujuh belas persen) menjadi sebesar 20,56% (dua puluh koma lima puluh enam persen) pada tahun 2029;
2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,93% (lima koma sembilan puluh tiga persen) menjadi sebesar 8,58% (delapan koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2029; dan
3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,5% (lima koma lima persen) menjadi sebesar 8,14% (delapan koma empat belas persen) pada tahun 2029.

Dari ketiga indikator kinerja tujuan tersebut, Kementerian Perindustrian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025—2029 meliputi:

- a. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB; dan
- b. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas.

Indikator Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan merupakan indikator turunan dari RPJMN Tahun 2025—2029 untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan arahan Presiden. Industri pengolahan terdiri dari industri batubara dan pengilangan migas serta industri pengolahan nonmigas. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian Perindustrian hanya memiliki kewenangan pembinaan pada industri pengolahan nonmigas. Sehingga pencapaian indikator tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Perindustrian. Untuk itu, dalam pencapaian indikator pertumbuhan PDB industri pengolahan, Kementerian Perindustrian akan berfokus pada pencapaian target pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam pembangunan industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu *impact/outcome* dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dengan indikator kinerja, yaitu Pertumbuhan PDB Kelompok Industri Prioritas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,28% (enam koma dua puluh delapan persen) menjadi sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) pada tahun 2029.
2. Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif, dengan indikator kinerja:
 - a) Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp775,20 triliun (tujuh ratus tujuh puluh lima koma dua puluh triliun rupiah) menjadi sebesar Rp1.086,00 triliun (seribu delapan puluh enam triliun rupiah) pada tahun 2029;
 - b) Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp123,10 juta (seratus dua puluh tiga koma sepuluh juta rupiah) untuk setiap orang setiap tahun menjadi sebesar Rp147,70 juta (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh juta rupiah) untuk setiap orang setiap tahun pada tahun 2029.
 - c) Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 14,15% (empat belas koma lima belas persen) menjadi sebesar 15,70% (lima belas koma tujuh puluh persen) pada tahun 2029; dan
 - d) Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Industri Menengah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,26% (lima koma dua puluh enam persen) menjadi sebesar 6,02% (enam koma nol dua persen) pada tahun 2029.
3. Meningkatnya Persebaran Industri, dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 32,65% (tiga puluh dua koma enam puluh lima persen) menjadi sebesar 36,15% (tiga puluh enam koma lima belas persen) pada tahun 2029.
4. Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi, dengan indikator kinerja, yaitu Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0)>3.0, pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) perusahaan menjadi sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) perusahaan pada tahun 2029.
5. Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a) Penurunan Emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,75 juta ton (enam koma tujuh puluh lima ton) CO₂-Eq menjadi sebesar 6,93 juta ton (enam koma sembilan puluh tiga juta ton) CO₂-Eq pada tahun 2029; dan
 - b) Rasio Penggunaan Material Daur Ulang di Sektor Industri, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 11% (sebelas persen) menjadi sebesar 15% (lima belas persen) pada tahun 2029.
6. Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk, dengan indikator kinerja:
 - a) Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 74,60% (tujuh puluh empat koma enam puluh persen) menjadi sebesar 75,60% (tujuh puluh lima koma enam puluh persen) pada tahun 2029;

- b) Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) menjadi sebesar 11,4% (sebelas koma empat persen) pada tahun 2029;
 - c) Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,286 menjadi sebesar 0,269 pada tahun 2029; dan
 - d) Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 208 (dua ratus delapan) produk menjadi sebesar 212 (dua ratus dua belas) produk pada tahun 2029.
7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Kementerian Perindustrian, pada tahun 2025 ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 86,45 (delapan puluh enam koma empat puluh lima persen) menjadi 88,50 (delapan puluh delapan koma lima puluh) pada tahun 2029.

Guna mendukung kelancaran pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029, telah dilakukan pemetaan terhadap berbagai risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis dimaksud sebagaimana tertuang dalam Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Tahun 2025—2029

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1. Keterbatasan Pasokan Bahan Baku 2. Harga bahan baku yang tidak stabil 3. Penurunan permintaan domestik dan global 4. Ketidakpastian kondisi geopolitik global 5. Kebijakan perdagangan negara mitra yang dinamis 6. Penerapan regulasi yang tidak konsisten 7. Investasi untuk mengembangkan industri prioritas tidak sesuai target 8. Masih kurangnya kebijakan/regulasi yang mendukung pengembangan sektor industri prioritas 9. Infrastruktur pendukung pengembangan sektor industri yang tersedia prioritas masih kurang memadai
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	1. Investasi yang masuk tidak dilakukan pada investasi yang berteknologi tinggi 2. Infrastruktur pendukung pengembangan sektor industri yang tersedia masih kurang memadai 3. <i>Mismatch</i> antara kompetensi SDM dengan kebutuhan industri 4. Sebagian besar SDM industri belum sesuai standar kompetensi 5. Penerapan regulasi yang tidak konsisten 6. Belum meratanya IKM sebagai penunjang rantai pasok industri besar dan industri menengah 7. Harga bahan baku yang kurang mendukung daya saing IKM
SS3	Meningkatnya Persebaran Industri	1. Pertumbuhan sektor industri hanya fokus di Pulau Jawa 2. Ketersediaan infrastruktur pendukung sektor industri belum merata 3. Masih rendahnya Nilai Tambah Sektor Industri di Luar Jawa
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	1. Instrumen regulasi INDI 4.0 saat ini masih belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan 2. Banyak perusahaan masih kesulitan untuk bertransformasi menuju industri 4.0
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	1. Penerapan standar terkait lingkungan oleh sektor industri tidak optimal

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
		2. Penerapan sirkular ekonomi oleh sektor industri belum optimal 3. Penerapan kepatuhan perusahaan dan kawasan industri belum memenuhi ketentuan regulasi
SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas	1. Penerapan standar berkelanjutan oleh sektor industri belum optimal 2. Standar produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar negara tujuan ekspor 3. Daya saing produk orientasi ekspor terhadap negara lain yang masih rendah
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik pada Kementerian Perindustrian belum optimal

Pengelolaan risiko secara sistematis diperlukan agar pencapaian sasaran strategis tetap terjaga. Indikasi risiko beserta langkah perlakuan risiko dan rincian detailnya menjadi bagian dari dokumen manajemen risiko pembangunan nasional tingkat organisasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045, pencapaian cita-cita tersebut akan dilakukan melalui 4 (empat) periodisasi perencanaan jangka menengah, yaitu:

1. RPJM Nasional I Tahun 2025—2029;
2. RPJM Nasional II Tahun 2030—2034;
3. RPJM Nasional III Tahun 2035—2039; dan
4. RPJM Nasional IV Tahun 2040—2044.

RPJMN Tahun 2025—2029, sebagai tahap pertama implementasi RPJPN Tahun 2025—2045, berfokus pada kekuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Fokus RPJMN Tahun 2025—2029 tersebut dirumuskan guna mencapai sasaran pembangunan nasional tahun 2025—2029 yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Masyarakat Indonesia menuju setara dengan negara maju, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
 - a) Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,05% (lima koma nol lima persen) pada tahun 2024, menjadi 5,3% (lima koma tiga persen) pada tahun 2025 dan menuju 8% (delapan persen) pada tahun 2029;
 - b) Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income/GNI*) per Kapita meningkat dari US\$ 4.870 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh dolar Amerika Serikat) pada tahun 2023, menjadi US\$ 5.410,- (lima ribu empat ratus sepuluh dolar Amerika Serikat) pada tahun 2025 dan menuju US\$ 8.000 (delapan ribu dolar Amerika Serikat) pada tahun 2029;
 - c) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (tujuh koma sembilan persen) pada tahun 2022, menjadi 8,1% (delapan koma satu persen) pada tahun 2025 dan 9,1% (sembilan koma satu persen) pada tahun 2029; dan
 - d) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (delapan belas koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2023, menjadi 20,8% (dua puluh koma delapan persen) pada tahun 2025 dan 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen) pada tahun 2029.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
 - a) Tingkat kemiskinan turun dari 9,4% (sembilan koma empat persen) pada Maret 2024, menjadi 7,0% (tujuh persen) sampai 8% (delapan persen) pada tahun 2025 dan 4,5% (empat koma lima persen) sampai 5% (lima persen) pada tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem (2,15 *Purchasing Power Parity/PPP*) hingga <0,5% (kurang dari nol koma lima persen) pada tahun 2026;
 - b) Rasio Gini turun dari 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) pada Maret 2024, menjadi 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) sampai 0,382 (nol koma tiga delapan dua) pada tahun 2025

- dan 0,372 (nol koma tiga tujuh dua) sampai 0,375 (nol koma tiga tujuh lima) pada tahun 2029; dan
- c) Kontribusi PDB Kawasan Timur Indonesia meningkat dari 20,9% (dua puluh koma sembilan persen) pada tahun 2023, menjadi 22,4% (dua puluh dua koma empat persen) pada tahun 2029.
 3. Meningkatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional, dengan indikator keberhasilan adalah peningkatan *Global Power Index* dari peringkat ke-34 pada tahun 2023, menjadi peringkat ke-33 pada tahun 2025 dan peringkat ke-29 pada tahun 2029.
 4. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, dengan indikator keberhasilan adalah meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 (nol koma lima empat) pada tahun 2020 menjadi 0,56 (nol koma lima enam) pada tahun 2025 dan 0,59 pada tahun 2029.
 5. Menurunkan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*, dengan indikator keberhasilan adalah sebagai berikut:
 - a) menurunnya intensitas emisi GRK dari 34,09% (tiga puluh empat koma nol sembilan persen) pada tahun 2022, menjadi 35,53% (tiga puluh lima koma lima puluh tiga persen) tahun 2025 dan 45,17% (empat puluh lima koma tujuh belas persen) pada tahun 2029; dan
 - b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari nilai indeks sebesar 72,54 (tujuh puluh dua koma lima puluh empat) pada tahun 2023, menjadi sebesar 76,49 (tujuh puluh enam koma empat puluh sembilan) pada tahun 2025 dan sebesar 77,20 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh) pada tahun 2029.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan target tersebut di atas, pada RPJMN Tahun 2025—2029 ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang merupakan turunan dari misi Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan Asta Cita, serta 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat dengan rincian sebagai berikut:

1. Asta Cita, yaitu:
 - a) Asta Cita 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia HAM;
 - b) Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 - c) Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 - d) Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 - e) Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - f) Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

- g) Asta Cita 7, Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 - h) Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Program Prioritas Presiden, yaitu:
- a) mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
 - b) penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 - c) reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
 - d) pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - e) pemberantasan kemiskinan;
 - f) pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 - g) menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
 - h) penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 - i) penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 - j) penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 - k) menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 - l) menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
 - m) menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
 - n) melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
 - o) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 - p) memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
 - q) pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.
3. Program Hasil Terbaik Cepat, yaitu:
- a) memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
 - b) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC (Tuberkulosis), dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
 - c) mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
 - d) membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
 - e) melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
 - f) menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;

- g) melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
- h) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% (dua puluh tiga persen).

Untuk mencapai Asta Cita, Program Prioritas Presiden, dan Program Hasil Terbaik Cepat di atas, disusunlah 3 (tiga) strategi utama guna pencapaiannya yang disebut dengan Trisula RPJMN Tahun 2025—2029 yaitu:

1. Penurunan Kemiskinan yang akan dilakukan melalui stabilisasi ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi, pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah dengan membangun SDM dan perluasan akses ekonomi;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan dilakukan melalui pemenuhan layanan dasar, peningkatan modal manusia, dan peningkatan modal sosial budaya; dan
3. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan yang akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) industri padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan sebagai pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, peningkatan investasi asing langsung berorientasi ekspor dan investasi non APBN, dan belanja negara untuk peningkatan produktivitas.

Guna mewujudkan Trisula RPJMN Tahun 2025—2029, perlu melakukan transformasi sektor publik sebagai pengungkitnya. Transformasi tersebut akan dilakukan melalui:

1. Transformasi Digital Layanan Publik
Transformasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Upaya transformasi digital ini perlu didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.
2. Penyederhanaan Regulasi
Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, *agile*, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi. Metode dalam penyederhanaan regulasi meliputi:
 - a) Deregulasi, dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu;

- b) Kodifikasi, dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan mudah dipahami;
- c) Konsolidasi, dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau
- d) *Omnibus legislation*, pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025—2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025—2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.

Selain itu, untuk menunjang keberhasilan pencapaian RPJMN 2025—2029, saat ini sedang atau akan dilaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025—2029.

PSN dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Dalam melaksanakan misi pembangunan industri nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri untuk periode tahun 2025—2029 mencakup:

1. Hilirisasi Industri Berbasis SDA dan Pengembangan Industri Prioritas.
 - a. Tujuan
Meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
 - b. Program/Kegiatan

- 1) pembangunan industri berbasis SDA, meliputi pada hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa, garam, kelapa sawit, sagu, dan rumput laut;
 - 2) pembangunan industri padat karya terampil, meliputi pengembangan industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki;
 - 3) pembangunan industri padat teknologi inovasi, meliputi pembangunan industri kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai, semikonduktor, perkapalan, dan dirgantara; dan
 - 4) pembangunan industri dasar, meliputi penguatan industri logam dasar, besi, dan baja serta pengembangan industri kimia.
2. Pembangunan Sumber Daya Industri, yang meliputi:
- a. Pembangunan SDM Industri
 - 1) Tujuan
 - a) menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya;
 - b) menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
 - c) menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri; dan
 - d) menyiapkan konsultan industri yang memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis *Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics* (STEAM) dengan metode pembelajaran *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi industri nasional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri (BDI) sebagai *Center of Excellences* (CoE) pembangunan tenaga kerja industri;
 - c) pengembangan kompetensi teknologi digital bagi SDM industri;
 - d) pengembangan inkubator bisnis yang terintegrasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri;
 - e) pengembangan kompetensi aparatur pembina industri; dan
 - f) pengembangan infrastruktur kompetensi industri.
 - b. Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri
 - 1) Tujuan

Menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi, pengembangan industri, penguatan dan pendalaman struktur industri, serta peningkatan daya saing industri.

- 2) Program/Kegiatan
 - a) pemetaan dan inventarisasi kebutuhan bahan baku industri;
 - b) mendorong investasi industri hulu;
 - c) membentuk dan/atau memperkuat pusat bahan baku industri;
 - d) mendorong kemitraan antara penyedia bahan baku industri dengan pengguna bahan baku industri;
 - e) koordinasi lintas sektor; dan
 - f) pengembangan industri bahan baku industri.
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - 1) Tujuan

Meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, inklusivitas, daya saing, dan/atau kemandirian industri nasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan sinergi program kerja sama pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
 - b) fasilitasi kerja sama pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri melalui pembentukan pusat kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - c) mendorong kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan industri dalam rangka mobilitas SDM untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau yang sejenis;
 - e) pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
 - f) pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan industri dalam negeri selaras dengan dokumen perencanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g) transformasi digital dan adopsi teknologi industri 4.0 yang diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penerapan sistem digital terintegrasi dalam rantai pasok dan manajemen produksi, serta pengembangan *startup* teknologi berbasis solusi industri;
 - h) peningkatan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis teknologi tinggi;
 - i) mendorong program mobilitas talenta teknologi industri, baik dalam negeri maupun kerja sama internasional;

- j) pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit penelitian dan pengembangan dan periset yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
 - k) peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
 - l) mendorong relokasi unit penelitian dan pengembangan milik perusahaan industri melalui skema insentif pajak terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
 - m) meningkatkan pemanfaatan hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
 - n) melakukan audit teknologi untuk peningkatan kinerja teknologi;
 - o) menilai kesesuaian dengan standar/prosedur, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - p) melakukan identifikasi dan mitigasi resiko penggunaan teknologi, dan mencegah kerugian akibat penggunaan teknologi;
 - q) identifikasi status dan daya saing/kemampuan teknologi yang dimiliki; perencanaan pengembangan teknologi;
 - r) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
 - s) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
 - t) pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri; dan
 - u) mendorong industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 dalam peningkatan daya saing dan industri hijau.
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
- 1) Tujuan
Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri, kearifan lokal, dan/atau inovasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
 - b) pengembangan SDM;
 - c) pengembangan produk, teknologi, manajemen usaha, pembiayaan dan desain;
 - d) pemanfaatan inovasi dan teknologi (komersialisasi, perlindungan paten;
 - e) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - f) pengembangan sentra IKM; dan
 - g) fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri di dalam dan luar negeri.

- e. Penyediaan Sumber Pembiayaan
 - 1) Tujuan
 - a) menjamin ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri;
 - b) penyelamatan industri nasional; dan
 - c) peningkatan daya saing industri dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penugasan kepada lembaga terkait guna mendukung industri yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, pinjaman, penjaminan, dan/atau asuransi; dan
 - b) pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a. Standardisasi Industri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;
 - b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang standardisasi industri.
 - b. Infrastruktur Industri
 - 1) Tujuan
 - Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra IKM.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan lahan industri;
 - b) penyediaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c) penyediaan jaringan telekomunikasi;
 - d) penyediaan jaringan sumber daya air;
 - e) penyediaan jaringan sanitasi; dan
 - f) penyediaan jaringan transportasi.
 - c. Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Tujuan
 - Penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pengembangan perangkat keras dan lunak;
 - b) pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara *online*, serta pengadaan data perkembangan dan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;

- c) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah;
 - d) publikasi laporan hasil analisis industri;
 - e) kerja sama interkoneksi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - f) integrasi layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas.
4. Pemberdayaan Industri
- a. Industri Hijau
 - 1) Tujuan

Mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan SDA secara berkelanjutan.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) edukasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan industri hijau kepada industri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait;
 - b) efisiensi sumber daya industri yang meliputi bahan baku, bahan penolong, kemasan, energi, air dan utilitas lainnya;
 - c) penyusunan upaya peningkatan mitigasi dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon sektor industri;
 - d) pengembangan dan penerapan ekonomi sirkuler sektor industri;
 - e) standardisasi dan penghargaan industri hijau;
 - f) peningkatan upaya pengelolaan limbah dan pengendalian emisi udara sektor industri;
 - g) penguatan kelembagaan industri hijau;
 - h) pemberian fasilitasi industri hijau;
 - i) penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penumbuhan industri hijau;
 - j) peningkatan kompetensi pendukung pekerjaan hijau di sektor industri;
 - k) perluasan akses pasar hijau dan akses pendanaan/ investasi berkelanjutan bagi industri; dan
 - l) restrukturisasi industri hijau.
 - b. Industri Strategis
 - 1) Tujuan
 - a) memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat melalui penguasaan dan pengembangan industri strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat serta keamanan negara;
 - b) meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah nasional melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal dan berkelanjutan;
 - c) mendorong kemandirian teknologi industri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset;

- d) mengurangi ketergantungan terhadap impor produk dan teknologi di sektor vital melalui pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi;
 - e) mewujudkan tata kelola industri strategis yang efisien dan berdaya saing dalam rangka merespons isu aktual baik domestik maupun global melalui penguatan peran negara; dan
 - f) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab.
- 2) Program/Kegiatan
- a) penentuan jenis industri strategis nasional yang dinamis sesuai kebutuhan;
 - b) penyusunan skema insentif fiskal dan nonfiskal untuk industri strategis;
 - c) dukungan transfer teknologi dari luar negeri melalui skema *Government to Government* atau *joint venture*;
 - d) peningkatan sertifikasi dan standarisasi untuk industri strategis sesuai kebutuhan nasional dan global;
 - e) penguatan ekosistem industri strategis; dan
 - f) pembentukan sistem pengawasan terhadap industri strategis.
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 1) Tujuan
- a) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah, lembaga, badan usaha, dan masyarakat;
 - b) memberdayakan industri dalam negeri; dan
 - c) memperkuat struktur industri.
- 2) Program/Kegiatan
- a) penguatan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - b) fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan industri menengah produsen barang dan/atau penyedia jasa (perusahaan industri);
 - c) fasilitasi pendaftaran dalam katalog elektronik (*e-catalogue*) Pemerintah bagi industri kecil dan industri menengah;
 - d) fasilitasi temu bisnis (*business matching*) antara produsen barang dan/atau penyedia jasa dengan pengguna produk dalam negeri;
 - e) penguatan tata kelola program peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - f) penetapan produk prioritas yang akan ditingkatkan nilai TKDN dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan penyusunan rencana pengembangan nilai TKDN dengan menetapkan batas minimal TKDN (*threshold*) untuk periode tertentu;
 - g) penetapan produk-produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat TKDN;
 - h) penerapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri serta penegakan sanksi atas pelanggaran;

- i) sosialisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - j) promosi dan kampanye mengenai produk dalam negeri, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta pemberian akses informasi produk dalam negeri;
 - k) pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri;
 - l) pemberian fasilitas fiskal dan/atau nonfiskal dalam rangka penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - m) mendorong substitusi untuk produk-produk yang dalam pengadaan barang dan jasa berasal dari impor.
- d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri
 - 1) Tujuan
 - a) membuka, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan akses pasar internasional untuk produk dan jasa industri dalam negeri;
 - b) mendukung implementasi kerja sama pembangunan internasional di bidang industri;
 - c) membuka dan meningkatkan akses industri internasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya industri melalui kerja sama teknik internasional yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
 - d) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
 - e) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan akses pasar internasional;
 - b) peningkatan akses kerja sama sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri;
 - c) kerja sama teknik internasional;
 - d) fasilitasi industri dalam mengakses bahan baku, teknologi, dan sumber pembiayaan;
 - e) pengembangan jaringan rantai suplai global; dan
 - f) peningkatan kerja sama investasi di sektor industri.
- e. Industri Halal
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan daya saing industri halal; dan
 - b) mengintegrasikan industri halal nasional ke dalam rantai nilai halal global.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyusunan kebijakan teknis di bidang industri halal;
 - b) pembentukan dan/atau penguatan infrastruktur industri halal yang mencakup Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), laboratorium uji halal, lembaga pelatihan halal dan lembaga sertifikasi profesi, tata kelola informasi industri halal, SDM, serta kawasan industri halal;

- c) peningkatan kompetensi SDM industri halal melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sertifikasi kompetensi;
 - d) pengawasan untuk pembinaan industri halal;
 - e) promosi dan kerja sama industri halal;
 - f) pemberian fasilitas industri halal; dan
 - g) penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan dalam pameran dan/atau forum bisnis di luar negeri.
 - f. Penguatan Jasa Industri
 - 1) Tujuan

Mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa industri terhadap perekonomian Indonesia.
 - 2) Program yang akan dilaksanakan
 - a) pembangunan data jasa industri yang terintegrasi;
 - b) peningkatan kuantitas SDM jasa industri yang berkualifikasi;
 - c) penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem jasa industri;
 - d) peningkatan daya saing sektor jasa industri; dan
 - e) penguasaan teknologi dan inovasi sektor jasa industri.
- 5. Perwilayahan Industri
 - a. Tujuan
 - 1) mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
 - 2) mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan nasional;
 - 3) menumbuhkan pusat pertumbuhan industri yang baru;
 - 4) meningkatkan pemanfaatan sumber daya industri menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan/atau berdaya saing tinggi;
 - 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten sebagai bagian dari ekosistem sumber daya industri yang berkelanjutan; dan
 - 6) memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.
 - b. Program yang akan dilaksanakan
 - 1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
 - 2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - 3) pengembangan KI, terutama pada KI prioritas RPJMN Tahun 2025—2029 yaitu KI Bintan Inti Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, Kawasan Industri Seafer, KI iSentra Lamongan, KI Ngawi, KI Ketapang Bangun Sarana, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia, KI Indonesia Pomalaa Industry Park, KI Konawe, KI Stardust, KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Sumbawa Barat, KI Pulau Obi, KI IWIP Teluk Weda, KI Buli, KI Fakfak, dan KI Takalar; dan
 - 4) pengembangan Sentra IKM.

6. Kebijakan Afirmatif IKM

a. Tujuan

Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

b. Program/Kegiatan

- 1) kemudahan dan perlindungan IKM;
- 2) dukungan kemitraan IKM;
- 3) insentif fiskal bagi IKM;
- 4) penyediaan pembiayaan bagi IKM;
- 5) inkubasi bisnis bagi IKM;
- 6) penumbuhan dan pengembangan IKM dan sentra IKM;
- 7) kerjasama dalam pengembangan IKM;
- 8) dukungan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan IKM dan sentra IKM yang berkelanjutan; dan
- 9) dukungan penerapan industri hijau dan sirkular ekonomi.

7. Pengembangan Industri 4.0

a. Tujuan

Industri 4.0 merupakan konsep revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi canggih melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0 untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, adaptif, dan terhubung. Industri 4.0 bertujuan untuk merevitalisasi sektor industri melalui pemanfaatan dan adopsi teknologi industri 4.0 sebagai *enabler* dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing global.

b. Program/Kegiatan

- 1) penguatan infrastruktur digital;
- 2) penyusunan standar digitalisasi industri;
- 3) pengembangan talenta digital SDM industri;
- 4) penyusunan skema insentif industri 4.0;
- 5) penguatan keamanan siber dan perlindungan data industri; dan
- 6) pengukuran kesiapan dan pendampingan transformasi industri 4.0 sektor industri prioritas dan sektor strategis lainnya.

8. Transformasi tata kelola pemerintahan.

a. Tujuan

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan efektif dalam melayani masyarakat.

b. Program/Kegiatan

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan pelaporan;
- 2) penataan organisasi dan SDM aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- 4) pelayanan legislasi dan advokasi;
- 5) pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
- 6) pemberian pelayanan umum dan keprotokolan serta sarana dan prasarana perkantoran; dan
- 7) pembangunan sistem informasi dan teknologi.

Untuk menunjang keberhasilan strategi industrialisasi, akan dilaksanakan PSN dengan tema hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital. Adapun dukungan yang akan diberikan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka menyukseskan PSN pada tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan program hilirisasi SDA meliputi komoditas kelapa sawit, kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauksit, dan tembaga;
2. pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan program pengembangan industri prioritas meliputi industri kimia dan industri dirgantara; dan/atau
3. pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan pengembangan kawasan industri.

C. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang industri tahun 2025—2029 sebagaimana telah dijelaskan di atas, diperlukan berbagai infrastruktur pendukung salah satunya adalah regulasi yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029 turut memuat kebutuhan regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu 2025—2029 dengan mengacu pada program legislasi nasional. Rincian regulasi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU):
 - a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - b. RUU tentang Kawasan Industri;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015—2035;
3. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres):
 - a. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025—2029;
 - b. RPerpres tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri.

Diharapkan regulasi diatas dapat menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029.

Tabel 10 Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian
Tahun 2025—2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Mewujudkan tata kelola pengembangan industri yang lebih kondusif dan relevan dengan kondisi terkini	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2027
2.	RUU tentang Kawasan Industri	Sinkronisasi dan Koordinasi antar K/L dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII)	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
3.	RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2015	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015—2035			2. Kementerian Hukum	
4.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025—2029	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
5.	Rperpres tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII)	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2029

D. Kerangka Kelembagaan

Guna mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator, dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian, dibentuklah kelembagaan Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari atas:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- g. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian di atas, Menteri Perindustrian selalu pimpinan dibantu oleh Wakil Menteri yang bertugas untuk membantu Menteri dalam:

- a. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan

- b. mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian;
serta Eselon I dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

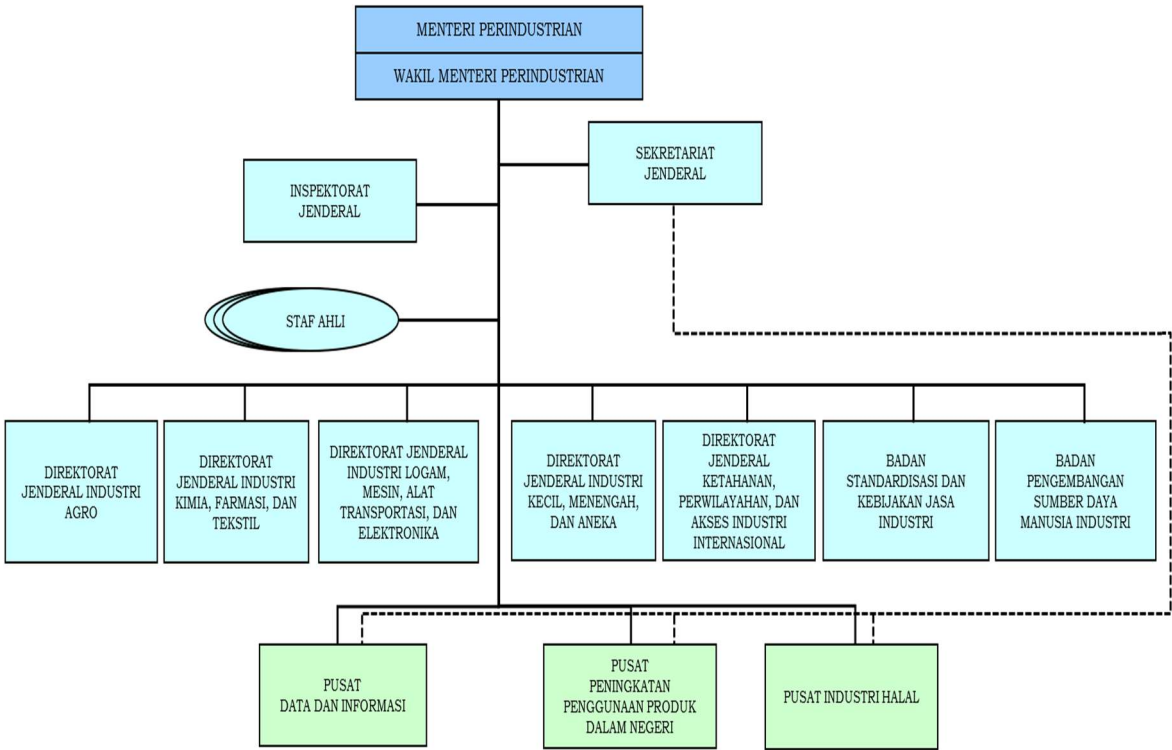
Tabel 11 Nomenklatur Eselon I di Lingkungan Kementerian
Perindustrian Beserta dengan Tugasnya

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
a.	Sekretariat Jenderal	menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
b.	Direktorat Jenderal Industri Agro	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
c.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.
d.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin,	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
	Alat Transportasi, dan Elektronika	peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.
e.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah.
f.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri.
g.	Inspektorat Jenderal	menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
h.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
		penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
j.	Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pendalaman, penyebaran, dan pemerataan industri.
k.	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan investasi.
l.	Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri.
m.	Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang percepatan transformasi industri 4.0 dan transformasi digital.

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian sebagaimana terlampir.



Gambar 11 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025—2029, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada Bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12 Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2025—2029

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target						Unit Terkait
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional								
	1	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persen	18,17	18,66	19,15	19,7	20,56	
	2	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	5,93	6,89	7,95	8,26	8,58	
	3	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	5,5	6,52	7,55	7,86	8,14	
SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional								
	1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Persen	6,28	7,33	8,40	8,74	9,09	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif								
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Rp Triliun	775,20	852,90	930,60	1.008,30	1.086,00	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII
	2	Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas	Rp.Juta/orang/tahun	123,1	126,2	133,4	138,8	147,7	BPSDMI
	3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	Persen	14,15	14,68	15,02	15,47	15,70	BPSDMI
	4	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah	Persen	5,26	5,38	5,45	5,60	6,02	Ditjen IKMA
SS3	Meningkatnya Persebaran Industri								
	1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Persen	32,65	33,25	33,36	34,03	36,15	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi								
	1	Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan	87	106	119	139	156	Ditjen IA, Ditjen IKFT, dan Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan BSKJI
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan								
	1	Penurunan Emisi GRK pada Sektor Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi	Juta Ton CO2-Eq	6,75	6,79	6,85	6,90	6,93	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA,

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target						Unit Terkait
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
									Ditjen KPAII, dan BSKJI
	2	Rasio Penggunaan Material Sirkular di Sektor Industri	Persen	11	12	13	14	15	Ditjen KPAII, dan BSKJI
SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas								
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Total Ekspor	Persen	74,60	74,85	75,10	75,30	75,60	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAII
	2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Persen	8,6	9,3	10	10,7	11,4	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA
	3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah		0,286	0,282	0,278	0,274	0,269	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKMA
	4	Jumlah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah yang Berdaya Saing	Produk (Kumulatif)	208	209	210	211	212	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKMA
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik								
	1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50	Setjen Itjen

Sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis akan didukung oleh program. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan, Program Peningkatan Daya Saing, dan Program Dukungan Manajemen. Untuk mengukur keberhasilan program, disusun sasaran dan indikator kinerja sasaran program. Sasaran dan indikator kinerja program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan.

Tabel 13 Sasaran Program Kementerian Perindustrian
Tahun 2025—2029

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
SP01	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri							
	1	Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri	Persen	84	85	86	87	88
	2	Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri	Persen	94	95	95	96	96
	3	Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	32	40	50	60	70
SP02	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0							
	1	Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Persen	94	95	95	96	96
	2	Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0	Roadmap	8	12	14	16	18
	3	Nilai asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0	Nilai	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
SP03	Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri							

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Persentase rancangan SKKNI/ KKNI bidang industri yang mencapai konsensus	Persen	100	100	100	100	100
	2	Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100
	3	Persentase Fasilitasi Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Persen	94	95	96	97	98
	4	Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten	Persen	94	95	96	97	98
	5	Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Persen	94	95	96	97	98
	6	Nilai rata-rata akreditasi program studi	Nilai	300	301	302	303	304
	7	Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan	Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12
	8	Hasil penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi	Hasil penelitian yang terpublikasi	167	174	188	203	220
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing								
SP11	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
	1	Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman	Persen	5,43	6,00	7,30	7,70	8,00
	2	Rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri non migas	Persen	6,45	6,19	5,93	5,66	5,41
SP12	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
	1	Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	Persen	11,48	11,48	11,91	11,78	11,86
	2	Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34
	3	Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Persen	3,50	5,48	5,56	5,85	6,32
	4	Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	%	3,80	4,00	6,00	6,10	6,20
	5	Rasio Impor Bahan Baku Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	16,94	16,07	15,28	14,49	13,77
SP13	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
	1	Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar	Persen	11,49	13,58	14,54	14,72	14,90
	2	Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan	%	4,00	5,50	6,50	7,50	8,70
	3	Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	%	7,50	9,09	10,76	10,85	11,42
	4	Pertumbuhan PDB Industri angkutan	Persen	5,00	6,60	6,90	7,10	7,20
	5	Rasio impor bahan baku industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika terhadap PDB sektor industri non migas	persen	11,81	11,55	11,21	10,89	10,49
SP14	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro							
	1	Kapasitas Produksi Pati Sagu	Ton/Tahun	100.000	150.000	210.000	260.000	320.000
	2	Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa	Persen	55	60	65	70	75
	3	Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut	Persen	53,76	58,01	62,26	66,51	70,76
	4	Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut	Persen	45	50	55	60	65

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	5	Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku	Persen	92,3	92,5	92,9	93,3	93,7
	6	Ragam Produk Hilir Sawit	Produk	208	223	233	243	250
SP15	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil							
	1	Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri	Persen	52,50	55,12	57,87	60,76	63,79
	2	Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara	Ribu ton	60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38
	3	Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT	Rp. Juta/ Orang/Tahun	60,34	64,59	69,61	74,67	79,76
	4	Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT	Orang	3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465
SP16	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika							
	1	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel	Juta ton/tahun	33,64	33,74	33,74	33,74	33,74
	2	Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga	Ribu ton/tahun	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	3	Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit	Juta ton/tahun	6,27	15,27	16,27	16,87	17,47
	4	Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah	Ribu ton/tahun	142,1	247,3	257,3	257,3	257,3
	5	Utilisasi Industri Logam Dasar	Persen	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
	6	Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	%	60,00	63,25	65,78	69,5	70,00
	7	Volume Reparasi Kapal	Ribu DWT (kumulatif)	11,2	11,4	11,8	12,0	12,2
	8	Volume Produksi Pembuatan Kapal	Ribu DWT (kumulatif)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
	9	Nilai Ekspor Industri Perkapalan	Ribu USD	858,02	939,41	966,55	1.171,68	1.315,25
SP21	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif							
	1	Nilai investasi sektor industri agro	Rp Triliun	227,04	251,65	274,91	298,55	322,16
	2	Utilisasi industri agro	Persen	74,22	75,54	76,61	77,03	77,33
SP22	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Inklusif							
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Rp Triliun	179,59	198,03	215,76	233,81	251,86
	2	Utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	69,35	70,33	71,31	71,42	71,81
SP23	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif							
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Rupiah Triliun	361,9	396,3	432,6	468,2	503,9
	2	Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Persen	73,07	77,08	80,90	82,19	83,31
SP24	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif							
	1	Nilai Investasi sektor industri Aneka	Rp. Triliun	6,7	6,9	7,3	7,7	8,1
	2	Utilisasi Sektor Industri Aneka	Persen	71,41	73,26	75,49	75,98	76,67
	3	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	20,00	20,1	20,2	20,3	20,4
	4	Wirausaha industri kecil yang memiliki legalitas usaha	WUB	1.383	11.400	11.400	11.400	11.400
	5	IKM yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya	IKM	20	20	20	20	20
	6	IKM berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi	IKM	44	44	44	44	44
SP25	Tersedianya Dukungan Terhadap Penumbuhan dan Pengembangan Industri Yang Inklusif							

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang Difasilitasi	USD Miliar	31	32	33	34	35
	2	Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Lain	Rekomendasi	8	11	12	14	16
SP26	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif							
	1	Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional	Persen	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35
SP27	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Halal Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif							
	1	Peningkatan nilai produksi produk yang telah bersertifikat TKDN	Persen	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55
	2	Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang memproduksi Produk Halal	Persen	4,46	5,19	6,23	6,69	7,00
SP28	Berkembangnya standarisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif							
	1	Persentase Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Sudah Tersertifikasi SNI Wajib Bidang Industri	Persen	1,00	1,5	2,00	2,5	3,00
SP31	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri							
	1	Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	2	Persentase Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan di Luar Pulau Jawa	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
SP32	Menguatnya Peran Kawasan Industri Dalam Rangka Persebaran Industri							
	1	Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada KI Prioritas	Rp Triliun	1.209,21	1.227,26	1.251,86	1.269,77	1.273,62
	2	Tingkat Okupansi Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa	Persen	51,00	54,00	56,00	60,00	65,00
	3	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	Persen	51,3	51,32	52,22	53,11	54,01
SP41	Perusahaan sektor industri agro dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0							
	1	Perusahaan Sektor Industri Agro dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan (kumulatif)	14	21	28	35	42
SP42	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Melalui Pemanfaatan Teknologi							
	1	Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan (kumulatif)	39	43	47	51	55
SP43	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi							
	1	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI) > 3.0 Sektor ILMATE	Industri (kumulatif)	35	41	47	53	59
SP44	Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi							
	1	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	IKM	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000
	2	IKM Startup Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui program akselerasi	IKM	20	20	20	20	20
SP45	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Menerapkan Teknologi Industri							
	1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Industri melalui Optimalisasi	Persen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		Pemanfaatan Teknologi Industri						
	2	Persentase Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri yang Menerapkan Digitalisasi Manufaktur	Persen	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00
SP51	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Agro							
	1	Persentase Perusahaan Industri Agro yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP52	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil							
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP53	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							
	1	Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat	Persen	1,00	1,1	1,2	1,3	1,4
	2	Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP54	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP55	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Dalam Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri							
	1	Persentase Kawasan Industri yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00
	2	Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Persen	20,00	35,00	45,00	60,00	80,00
	3	Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan	Kawasan Industri (Kumulatif)	5	6	7	8	10
SP56	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular							
	1	Jumlah Perusahaan Industri Berdasarkan Lokasi yang Sudah Tersertifikasi Industri Hijau	Perusahaan (akumulatif)	152	164	176	188	200
	2	Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK terhadap Target Nasional pada Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi	Persen	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00
SP57	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan Data Sektoral yang Terpadu, Efisien, dan Akuntabel							
	1	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian	Indeks	3,50	3,50	3,60	3,60	3,65
	2	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian	Indeks	3,05	3,05	3,10	3,10	3,15
SP61	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro							
	1	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor	Persen	21,70	21,76	21,83	21,89	21,94
	2	Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi	Persen	2,06	2,11	2,17	2,22	2,28
	3	Diversifikasi produk industri agro berbasis SDA yang diolah	-	0,3956	0,3916	0,3876	0,3836	0,3786
	4	Jumlah produk industri agro berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	Produk	75	75	76	76	77
SP62	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil							
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap Total Ekspor	Persen	18,37	18,45	18,51	18,56	18,66

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berteknologi Tinggi	Persen	4,59	4,71	4,82	4,94	5,06
	3	Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berbasis SDA yang Diolah	-	0,3251	0,3211	0,3171	0,3131	0,3081
	4	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing	Produk	60	60	60	61	61
SP63	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Terhadap Total Ekspor	Persen	31,5	30,7	31,6	31,8	31,6
	2	Nilai Ekspor Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Juta US\$	92.681	96.660	107.655	117.566	128.170
	3	Kontribusi ekspor produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berteknologi tinggi	persen	5,16	4,93	4,71	4,49	4,28
	4	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah	-	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52
	5	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	produk	7	7	8	8	8
	6	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk <i>Electric Vehicle</i> (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	23,00	25,00	28,00	33,00	36,00
	7	Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00
SP64	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Aneka							
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka terhadap Total Ekspor	Persen	3,04	3,06	3,07	3,08	3,10
	2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka Berteknologi Tinggi	Persen	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
SP65	Meningkatnya Penguasaan Pasar Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas							
	1	Utilisasi Tarif Preferensi dalam Peningkatan Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00
	2	Peningkatan Potensi Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang Difasilitasi	Persen	9,00	9,5	10,00	10,5	11,00
Program Dukungan Manajemen								
SP71	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen Agro							
	1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro	Indeks	83,14	83,15	83,16	83,17	83,18
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro	Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	91,76	91,77	91,78	91,79	91,80
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	93,52	93,54	93,56	93,58	93,60
	6	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	7	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	93,59	93,60	93,61	93,62	93,63
	8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	9	Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa	Persen	94,20	94,25	94,30	94,35	94,40
	10	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	11	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Persen	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50
	12	Tersedianya SOP yang up to date dan relevan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP72	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen IKFT							
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Indeks	81,3	81,55	81,8	82,05	82,3
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	4	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Persen	93,00	93,5	94,5	95,5	96,5
	5	Nilai Hasil Pengawasan Unit Kearsipan	Nilai	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Nilai	65,25	65,5	65,75	66,00	66,25
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	8	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00
SP73	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen ILMATE							
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE	Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	2	Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal ILMATE	Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal ILMATE	Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE	Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal ILMATE	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	6	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	7	Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	8	Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi	Legislasi	2	2	2	2	2
	9	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Ditjen ILMATE	Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00
SP74	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	5	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00
	9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	10	Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA	Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	11	Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	12	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	13	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00
SP75	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Ditjen KPAIL							
	1	Nilai SAKIP Ditjen KPAIL	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAIL	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00
	5	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Ditjen KPAIL	Persen	85,00	85,5	86,00	86,5	87,00
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Ditjen KPAIL	Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	8	Efektivitas Regulasi yang Diinisiasi oleh Ditjen KPAII	Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
	9	Jumlah Kebijakan Industri yang Efektif	Peraturan (kumulatif)	11	12	13	14	15
	10	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAII	Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00
SP76	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada BSKJI							
	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00
	2	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	3	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	4	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12
	5	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	Persen	41,00	50,00	58,00	66,00	75,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	8	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan	Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00
	9	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	10	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	11	Penilaian dan analisis laporan keuangan	Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00
SP77	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima pada BPSDMI							
	1	Nilai SAKIP BPSDMI	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00
	2	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BPSDMI	Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00
	3	Indeks Profesional ASN pada BPSDMI	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BPSDMI	Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada BPSDMI	Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral pada BPSDMI	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh BPSDMI	Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00
	8	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMI	Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00
SP78	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Itjen							
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja	Laporan	1	1	1	1	1
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00
	4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00
	5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	6	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00
	8	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
	9	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00
	11	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	12	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00
SP79	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif							
	1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Persen	100	100	100	100	100
	2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Kinerja Pegawai	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Nilai SAKIP	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	4	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks	94,8	94,8	94,85	94,85	95,00
	5	Indeks Sistem Merit	Nilai	330,5	330,5	331,00	331,00	331,00
	6	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	7	Indeks Berakhlak	Persen	67,25	67,25	68,00	68,00	69,00
	8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5
	9	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	10	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3,7	3,7	3,75	3,75	3,8
	11	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9
	12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	86,45	86,45	87,19	87,19	87,2
	13	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
	14	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	66,00	66,00	67,00	67,00	68,00
	15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,55	4,6	4,6	4,7
	16	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	87,3	87,3	87,6	87,6	88,1
	17	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,3	91,3	91,7	91,7	92,00
	18	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	95,00	95,00	95,3	95,3	95,3
	19	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00
	20	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian	Indeks	3,45	3,45	3,64	3,64	3,76
	21	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian	Indeks	3,05	3,05	3,2	3,2	3,3
	22	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada Sekretariat Jenderal	Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00
	23	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian	Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00
SP80	Terwujudnya ASN bidang industri yang Professional dan Berkepribadian							
	1	Persentase ASN bidang industri lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
	2	Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri	Persen	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00
SP81	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif							

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00
	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi	Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	3	Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,25	80,45	80,60	81,00

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.657,31	1.940,19	2.019,55	2.125,24	2.227,66
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	666,87	1.741,54	1.934,91	2.081,11	2.239,80
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	195,43	330,43	344,84	359,24	373,72
TOTAL		2.519,61	4.012,17	4.299,30	4.565,59	4.841,18

Tabel 15 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 Berdasarkan Unit Eselon I (Dalam Milyar Rupiah)

No	Unit	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sekretariat Jenderal	294,14	365,14	403,49	436,26	464,88
2	Direktorat Jenderal Industri Agro	99,11	328,98	338,02	353,30	368,21
3	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	100,28	496,31	503,57	513,72	521,02
4	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	106,90	252,65	384,13	472,85	546,30
5	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	328,30	567,97	557,18	557,68	558,18
6	Inspektorat Jenderal	44,26	54,73	56,32	57,95	59,63
7	Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri	676,81	827,30	879,20	926,21	1.004,82
8	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	99,00	211,18	243,47	279,30	318,34
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	770,81	907,91	933,93	968,32	999,79
TOTAL		2.519,61	4.012,17	4.299,30	4.565,59	4.841,18

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran

sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang selaras dengan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka memperkuat kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mencapai hal tersebut, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang terukur, serta dituangkan dalam tiga program utama yang mendukung arah pembangunan industri nasional.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala, baik secara internal maupun melalui mekanisme akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan serta sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program di masa mendatang.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN 2025—2029

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Pusat							2.519.612.734	4.012.166.387	4.299.298.707	4.565.587.361	4.841.175.063
	1 Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB		Persen	18,17	18,66	19,15	19,7	20,56					
	2 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	5,93	6,89	7,95	8,26	8,58					
	3 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan		Persen	5,5	6,52	7,55	7,86	8,14					
SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Pusat							60.261.344	278.137.786	346.900.000	383.850.000	416.300.000
	1 Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas		Persen	6,28	7,33	8,40	8,74	9,09					
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	Pusat							691.630.641	1.351.112.842	1.434.213.950	1.511.022.245	1.607.127.568
	1 Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Rp Triliun	775,20	852,90	930,60	1.008,3	1.086,0					
	2 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas		Rp.Juta/orang/ tahun	123,1	126,2	133,4	138,8	147,7					
	3 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja		Persen	14,15	14,68	15,02	15,47	15,70					
	4 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah		Persen	5,26	5,38	5,45	5,60	6,02					
SS3	Meningkatnya Persebaran Industri	Pusat							13.315.985	50.505.000	54.983.000	59.471.000	65.292.000
	1 Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa		Persen	32,65	33,25	33,36	34,03	36,15					
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pusat							29.709.411	84.650.000	92.250.000	95.850.000	100.450.000
	1 Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	87	106	119	139	156					
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	Pusat							27.225.658	67.701.620	90.877.685	103.616.328	120.299.967
	1 Penurunan Emisi GRK pada Sektor Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi		Juta Ton CO2-Eq	6,75	6,79	6,85	6,90	6,93					
	2 Rasio Penggunaan Material Sirkular di Sektor Industri		Persen	11	12	13	14	15					
SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Pusat							40.160.174	239.865.000	260.525.000	286.537.000	304.043.000
	1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Total Ekspor		Persen	74,60	74,85	75,10	75,30	75,60					
	2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi		Persen	8,6	9,3	10	10,7	11,4					
	3 Diversifikasi Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah			0,286	0,282	0,278	0,274	0,269					
	4 Jumlah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah yang Berdaya Saing		Produk (Kumulatif)	208	209	210	211	212					
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik	Pusat							1.657.309.521	1.940.194.139	2.019.549.072	2.125.240.788	2.227.662.528
	1 Indeks RB Kementerian Perindustrian		Nilai	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50					
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			Pusat						195.432.034	330.430.000	344.835.000	359.240.000	373.720.000
SPO1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri	Pusat							39.081.000	135.505.000	139.960.000	144.415.000	148.895.000
	1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
	2 Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	94	95	95	96	96					
	3 Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh		Tenant	32	40	50	60	70					
SPO2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0	Pusat							3.348.855	4.750.000	5.525.000	6.300.000	7.125.000
	1 Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya		Persen	94	95	95	96	96					
	2 Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0		Roadmap	8	12	14	16	18					
	3 Nilai asesmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0		Nilai	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05					
SPO3	Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri	Pusat							153.002.179	190.175.000	199.350.000	208.525.000	217.700.000
	1 Persentase rancangan SKKNI/KKNI bidang industri yang mencapai konsensus		Persen	100	100	100	100	100					
	2 Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan		Persen	100	100	100	100	100					
	3 Persentase Fasilitas Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Persen	94	95	96	97	98					
	4 Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten		Persen	94	95	96	97	98					
	5 Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitas Sertifikasi Kompetensi		Persen	94	95	96	97	98					
	6 Nilai rata-rata akreditasi program studi		Nilai	300	301	302	303	304					
	7 Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan		Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12					
	8 Hasil penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi		Hasil penelitian yang terpublikasi	167	174	188	203	220					
Kegiatan Pendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			Pusat						195.432.034	330.430.000	344.835.000	359.240.000	373.720.000
Kegiatan Pelatihan Vokasi Industri (4957)			Pusat						21.966.600	31.500.000	35.700.000	39.900.000	44.125.000
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi												
	1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
	2 Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	94	94,5	95	95,5	96					
	3 Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh		Tenant	32	40	50	60	70					
SK2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 Melalui Unit Pelatihan Vokasi												
	1 Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya		Persen	94	94,5	95	95,5	96					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK3	2 Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0		Roadmap	8	12	14	16	18					
	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pelatihan Vokasi Industri pada Unit Pelatihan Vokasi												
	1 Persentase rancangan SKKNI bidang industri yang mencapai konsensus		Persen	100	100	100	100	100					
	2 Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan		Persen	100	100	100	100	100					
	3 Persentase Fasilitas pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Persen	94	95	96	97	98					
	4 Persentase Peserta Didlat Asesor Kompetensi yang Kompeten		Persen	94	95	96	97	98					
	5 Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitas Sertifikasi Kompetensi		Persen	94	95	96	97	98					
Kegiatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri (4958)		Pusat							41.753.411	124.600.000	129.325.000	134.050.000	138.775.000
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi												
	1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
	2 Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh		Tenant	32	40	50	60	70					
SK2	Terfasilitasinya Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi												
SK3	1 Nilai asesmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0		Nilai	1,85	1,90	1,95	2	2,05					
	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Vokasi Industri pada Unit Pendidikan Tinggi Vokasi												
	1 Nilai rata-rata akreditasi program studi		Nilai	300	301	302	303	304					
	2 Rasio animo pendaftar pada unit pendidikan		Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12					
	3 Penelitian Sektor Industri Prioritas yang terpublikasi		Hasil penelitian yang terpublikasi	167	174	188	203	220					
Kegiatan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (4959)		Pusat							131.712.023	174.330.000	179.810.000	185.290.000	190.820.000
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pendidikan Menengah Vokasi												
	1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
SK2	Terfasilitasinya Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 Melalui Unit Pendidikan Menengah Vokasi												
	1 Nilai asesmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0		Nilai	1,85	1,90	1,95	2	2,05					
SK3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Vokasi Industri Pada Unit Pendidikan Menengah Vokasi												
	1 Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan		Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12					
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing		Pusat							666.871.179	1.741.542.248	1.934.914.635	2.081.106.573	2.239.792.535
SP11	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Pusat							2.400.000	16.000.000	17.200.000	18.400.000	19.100.000
	1 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman		Persen	5,43	6,00	7,30	7,70	8,00					
	2 Rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri non migas		Persen	6,45	6,19	5,93	5,66	5,41					
SP12	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Pusat							22.543.037	188.450.000	192.200.000	195.450.000	198.700.000
	1 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional		Persen	11,48	11,48	11,91	11,78	11,86					
	2 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34					
	3 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi		Persen	3,50	5,48	5,56	5,85	6,32					
	4 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki		%	3,80	4,00	6,00	6,10	6,20					
	5 Rasio Impor Bahan Baku Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	16,94	16,07	15,28	14,49	13,77					
SP13	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Pusat							24.062.307	33.300.000	77.000.000	98.000.000	114.000.000
	1 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar		Persen	11,49	13,58	14,54	14,72	14,90					
	2 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan		%	4,00	5,50	6,50	7,50	8,70					
	3 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik		%	7,50	9,09	10,76	10,85	11,42					
	4 Pertumbuhan PDB Industri angkutan		Persen	5,00	6,60	6,90	7,10	7,20					
	5 Rasio impor bahan baku industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika terhadap PDB sektor industri non migas		persen	11,81	11,55	11,21	10,89	10,49					
SP14	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro	Pusat							2.756.000	11.500.000	11.500.000	12.500.000	13.000.000
	1 Kapasitas Produksi Pati Sagu		Ton/Tahun	100.000	150.000	210.000	260.000	320.000					
	2 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa		Persen	55	60	65	70	75					
	3 Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut		persen	53,76	58,01	62,26	66,51	70,76					
	4 Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut		Persen	45	50	55	60	65					
	5 Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku		Persen	92,3	92,5	92,9	93,3	93,7					
	6 Ragam Produk Hilir Sawit		Produk	208	223	233	243	250					
SP15	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Pusat							3.500.000	19.887.786	21.000.000	22.500.000	24.000.000
	1 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri		Persen	52,50	55,12	57,87	60,76	63,79					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
	Satuan	2025		2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	2	Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara		Ribu ton	60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38					
	3	Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT		Rp. Juta/ Orang/Tahun	60,34	64,59	69,61	74,67	79,76					
	4	Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT		Orang	3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465					
SP16		Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Pusat							5.000.000	9.000.000	28.000.000	37.000.000	47.500.000
	1	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel		Juta ton/tahun	33,64	33,74	33,74	33,74	33,74					
	2	Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga		Ribu ton/tahun	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20					
	3	Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit		Juta ton/tahun	6,27	15,27	16,27	16,87	17,47					
	4	Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah		Ribu ton/tahun	142,1	247,3	257,3	257,3	257,3					
	5	Utilisasi Industri Logam Dasar		Persen	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00					
	6	Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya		%	60,00	63,25	65,78	69,5	70,00					
	7	Volume Reparasi Kapal		Ribu DWT (kumulatif)	11,2	11,4	11,8	12,0	12,2					
	8	Volume Produksi Pembuatan Kapal		Ribu DWT (kumulatif)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50					
	9	Nilai Ekspor Industri Perkapalan		Ribu USD	858,02	939,41	966,55	1.171,68	1.315,25					
SP21		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif	Pusat							41.550.000	134.800.000	142.100.000	144.400.000	149.210.000
	1	Nilai investasi sektor industri agro		Rp Triliun	227,04	251,65	274,91	298,55	322,16					
	2	Utilisasi industri agro		Persen	74,22	75,54	76,61	77,03	77,33					
SP22		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Inklusif	Pusat							8.552.816	90.400.000	91.650.000	95.650.000	96.400.000
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Rp Triliun	179,59	198,03	215,76	233,81	251,86					
	2	Utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil		Persen	69,35	70,33	71,31	71,42	71,81					
SP23		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif	Pusat							13.000.000	63.233.315	95.000.000	115.000.000	133.500.000
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Rupiah Triliun	361,9	396,3	432,6	468,2	503,9					
	2	Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Persen	73,07	77,08	80,90	82,19	83,31					
SP24		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif	Pusat							229.527.055	375.912.940	365.120.940	365.620.940	366.120.940
	1	Nilai Investasi sektor industri Aneka		Rp. Triliun	6,7	6,9	7,3	7,7	8,1					
	2	Utilisasi Sektor Industri Aneka		Persen	71,41	73,26	75,49	75,98	76,67					
	3	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	20,00	20,1	20,2	20,3	20,4					
	4	Wirausaha industri kecil yang memiliki legalitas usaha		WUB	1.383	11.400	11.400	11.400	11.400					
	5	IKM yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya		IKM	20	20	20	20	20					
	6	IKM berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi		IKM	44	44	44	44	44					
SP25		Tersedianya Dukungan Terhadap Penumbuhan dan Pengembangan Industri Yang Inklusif	Pusat							14.282.000	27.050.000	31.108.500	35.777.125	38.407.332
	1	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang Difasilitasi		USD Miliar	31	32	33	34	35					
	2	Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Lain		Rekomendasi	8	11	12	14	16					
SP26		Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif	Pusat							146.078.610	221.677.587	242.829.510	263.540.180	303.321.096
	1	Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional		Persen	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35					
SP27		Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Halal Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif	Pusat							33.208.126	89.309.000	101.070.000	108.694.000	121.248.200
	1	Peningkatan nilai produksi produk yang telah bersertifikat TKDN		Persen	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55					
	2	Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal		Persen	4,46	5,19	6,23	6,69	7,00					
SP28		Berkembangnya standarisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif	Pusat							10.000.000	18.300.000	20.500.000	23.100.000	25.200.000
	1	Persentase Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Sudah Tersertifikasi SNI Wajib Bidang Industri		Persen	1,00	1,5	2,00	2,5	3,00					
SP31		Memkuatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri	Pusat							6.965.985	19.655.000	19.655.000	19.655.000	19.655.000
	1	Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik		Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
	2	Persentase Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan di Luar Pulau Jawa		Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
SP32		Memkuatnya Peran Kawasan Industri Dalam Rangka Persebaran Industri	Pusat							6.350.000	30.850.000	35.328.000	39.816.000	45.637.000
	1	Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada KI Prioritas		Rp Triliun	1.209,21	1.227,26	1.251,86	1.269,77	1.273,62					
	2	Tingkat Okupansi Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa		Persen	51,00	54,00	56,00	60,00	65,00					
	3	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan		Persen	51,3	51,32	52,22	53,11	54,01					
SP41		Perusahaan sektor industri agro dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Pusat							4.600.000	9.000.000	9.100.000	9.700.000	9.800.000
	1	Perusahaan Sektor Industri Agro dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	14	21	28	35	42					
SP42		Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pusat							8.412.000	40.000.000	41.500.000	42.000.000	43.500.000

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SP43	1	Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan Nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	39	43	47	51	55					
		Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pusat							4.000.000	7.500.000	13.000.000	15.000.000	17.500.000
SP44	1	Perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI) > 3.0 Sektor ILMATE		Industri (kumulatif)	35	41	47	53	59					
		Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pusat							7.247.411	22.650.000	22.650.000	22.650.000	22.650.000
	1	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000					
	2	IKM Startup Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui program akselerasi		IKM	20	20	20	20	20					
SP45		Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Menerapkan Teknologi Industri	Pusat							5.450.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
	1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri		Persen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00					
	2	Persentase Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri yang Menerapkan Digitalisasi Manufaktur		Persen	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00					
SP51		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Agro	Pusat							3.000.000	10.500.000	10.580.000	10.650.000	10.750.000
SP52	1	Persentase Perusahaan Industri Agro yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Pusat							750.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.700.000
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SP53		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Pusat							3.166.666	4.000.000	13.000.000	18.500.000	23.000.000
	1	Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat		Persen	1,00	1,1	1,2	1,3	1,4					
	2	Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SP54		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Pusat							0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SP55		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Dalam Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Pusat							3.300.000	15.000.000	18.100.000	21.016.000	24.293.000
	1	Persentase Kawasan Industri yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00					
	2	Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri		Persen	20,00	35,00	45,00	60,00	80,00					
	3	Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan		Kawasan Industri (Kumulatif)	5	6	7	8	10					
SP56		Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	Pusat							9.400.000	18.700.000	25.000.000	27.000.000	33.400.000
	1	Jumlah Perusahaan Industri Berdasarkan Lokasi yang Sudah Tersertifikasi Industri Hijau		Perusahaan (akumulatif)	152	164	176	188	200					
	2	Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK terhadap Target Nasional pada Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi		Persen	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00					
SP57		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan Data Sektoral yang Terpadu, Efisien, dan Akuntabel	Pusat							7.608.992	9.001.620	13.597.685	15.750.328	18.156.967
	1	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian		Indeks	3,50	3,50	3,60	3,60	3,65					
	2	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian		Indeks	3,05	3,05	3,10	3,10	3,15					
SP61		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro	Pusat							6.350.000	89.300.000	89.320.000	92.800.000	94.470.000
	1	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor		Persen	21,70	21,76	21,83	21,89	21,94					
	2	Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi		Persen	2,06	2,11	2,17	2,22	2,28					
	3	Diversifikasi produk industri agro berbasis SDA yang diolah		-	0,3956	0,3916	0,3876	0,3836	0,3786					
	4	Jumlah produk industri agro berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing		Produk	75	75	76	76	77					
SP62		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Pusat							8.254.147	64.615.000	64.165.000	64.965.000	65.265.000
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap Total Ekspor		Persen	18,37	18,45	18,51	18,56	18,66					
	2	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berteknologi Tinggi		Persen	4,59	4,71	4,82	4,94	5,06					
	3	Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berbasis SDA yang Diolah		-	0,3251	0,3211	0,3171	0,3131	0,3081					
	4	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	60	60	60	61	61					
SP63		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Pusat							8.456.027	31.000.000	44.500.000	57.500.000	63.000.000
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Terhadap Total Ekspor		Persen	31,5	30,7	31,6	31,8	31,6					
	2	Nilai Ekspor Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Juta US\$	92.681	96.660	107.655	117.566	128.170					
	3	Kontribusi ekspor produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berteknologi tinggi		persen	5,16	4,93	4,71	4,49	4,28					
	4	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		-	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52					
	5	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing		produk	7	7	8	8	8					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyeegar		-	0,5184	0,5144	0,5104	0,5064	0,5014					
Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro (6046)			Pusat							33.900.000	109.500.000	116.500.000	125.500.000	129.500.000
SK1		Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1	Rasio impor bahan baku sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	Persen	1,73	1,64	1,56	1,48	1,41						
SK2		Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1	Rasio impor bahan baku sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri agro	Persen	2,95	2,84	2,73	2,63	2,52						
SK3		Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
	1	Utilisasi industri pengolahan kelapa sektor industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	55	60	65	70	75						
SK4		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif												
	1	Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58						
SK5		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang Inklusif												
	1	Nilai investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Rp Triliun	56,16	60,64	65,00	69,50	74,04						
SK6		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyeegar yang Inklusif												
	1	Nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyeegar	Rp Triliun	15,96	17,95	19,81	21,69	23,56						
SK7		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif												
	1	Nilai investasi sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan	Rp Triliun	54,18	58,50	62,70	67,04	71,43						
SK8		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	Persen	5,36	5,39	5,42	5,45	5,48						
	2	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	Persen	0,0985	0,1005	0,1025	0,1045	0,1066						
	3	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah sektor industri hasil hutan dan perkebunan	-	0,3477	0,3437	0,3397	0,3357	0,3307						
SK9		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan												
	1	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan berteknologi tinggi	Persen	0,0186	0,0194	0,0201	0,0208	0,00215						
	2	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah sektor makanan, hasil laut dan perikanan	-	0,2851	0,2811	0,2771	0,2731	0,2681						
	3	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor makanan, hasil laut dan perikanan	Produk	27	27	28	28	28						
Kegiatan Pengembangan Standar Industri Agro (6047)			Pusat							4.506.000	21.500.000	21.840.000	22.150.000	22.510.000
SK1		Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan												
	1	Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku	Persen	92,30	92,50	92,90	93,30	93,70						
SK2		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyeegar yang Inklusif												
	1	Nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyeegar	Rp Triliun	15,96	17,95	19,81	21,69	23,56						
SK3		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif												
	1	Nilai investasi sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan	Rp Triliun	54,18	58,50	62,70	67,04	71,43						
SK4		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
	1	Persentase perusahaan industri hasil hutan dan perkebunan yang tingkat kepatuhannya baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00						
SK5		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan												
	1	Persentase perusahaan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang tingkat kepatuhannya baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00						
SK6		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyeegar												
	1	Persentase perusahaan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyeegar yang tingkat kepatuhannya baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00						
SK7		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan												
	1	Persentase perusahaan industri kemurgi, oleokimia dan pakan yang tingkat kepatuhannya baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00						
SK8		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyeegar												

Kode		Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK9	1	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Produk	7	7	7	7	7					
		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan												
	1	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan		-	0,6341	0,6301	0,6261	0,6221	0,6171					
Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Agro (6048)			Pusat							0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SK1		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif												
	1	Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan		Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58					
SK2		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
	1	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri hasil hutan dan perkebunan		Produk	33	33	33	33	33					
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro (6049)			Pusat							5.600.000	46.800.000	50.000.000	48.200.000	49.550.000
SK1		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor		Persen	5,36	5,39	5,42	5,45	5,48					
SK2		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan												
	1	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor		Persen	10,02	10,03	10,04	10,05	10,05					
SK3		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar												
	1	Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor		Persen	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79					
SK4		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan												
	1	Kontribusi ekspor produk industri kemurgi, oleokimia dan pakan terhadap total ekspor		Persen	5,59	5,60	5,61	5,61	5,62					
	2	Kontribusi ekspor produk industri kemurgi, oleokimia dan pakan berteknologi tinggi		Persen	1,94	1,99	2,05	2,10	2,15					
SK5		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro												
	1	Utilisasi Tarif Preferensi Sektor Industri Agro		Persen	54,00	54,50	55,00	55,50	56,00					
SK6		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif												
	1	Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan		Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58					
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro (6050)			Pusat							1.050.000	9.800.000	10.000.000	8.700.000	8.910.000
SK1		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif												
	1	Nilai investasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan		Rp Triliun	100,74	114,56	127,41	140,31	153,13					
	2	Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan		Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58					
SK2		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Inklusif												
	1	Nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Rp Triliun	15,96	17,95	19,81	21,69	23,56					
SK3		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif												
	1	Peningkatan jumlah perusahaan di sektor industri agro yang mendapatkan fasilitas fiskal dan non-fiskal		Persen	3	6	9	12	15					
	2	Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro		Persen	20,00	33,33	46,67	60,00	73,33					
SK4		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor		Persen	5,36	5,39	5,42	5,45	5,48					
SK5		Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan												
	2	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan		Produk	8	8	8	8	9					
Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 Industri Agro (6051)			Pusat							4.600.000	9.000.000	9.100.000	9.700.000	9.800.000
SK1		Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1	Perusahaan sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	1	2	3	4	5					
SK2		Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1	Perusahaan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	5	8	11	14	17					
SK3		Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1	Perusahaan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	7	9	11	13	15					
SK4		Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1	Perusahaan sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	1	2	3	4	5					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6053)		Pusat							23.043.756	169.500.000	169.500.000	170.000.000	170.000.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional		Persen	11,48	11,48	11,91	11,78	11,86					
	2 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	2	1,87	1,76	1,63	1,55					
SK2	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi		Persen	3,50	5,48	5,56	5,85	6,32					
SK3	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	1,09	1,06	1,03	1	0,97					
SK4	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu												
	1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hulu Terhadap Total Ekspor		Persen	7,21	7,23	7,24	7,25	7,29					
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi												
	1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor		Persen	2,96	2,98	2,99	3,01	3,02					
	2 Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Berbasis SDA yang Diolah		-	0,6534	0,6494	0,6454	0,6414	0,6364					
SK6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam												
	1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap Total Ekspor		Persen	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49					
SK7	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif												
	1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
SK8	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	79,5	79,75	80	80,25	80,5					
Kegiatan Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6054)		Pusat							2.900.612	12.600.000	12.800.000	13.000.000	13.100.000
SK1	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Kimia Hulu												
	1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia Hulu yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK2	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi												
	1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK3	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki												
	1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK4	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam												
	1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi												
	1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor		Persen	2,96	2,98	2,99	3,01	3,02					
	2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Berteknologi Tinggi		Persen	1,24	1,27	1,31	1,34	1,37					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif												
	1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu		Persen	82,3	83,47	84,64	84,77	85,23					
SK7	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif												
	1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
SK8	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki		Persen	3,8	4	6	6,1	6,2					
SK9	Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	5	6	7	8	9					
Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6055)		Pusat							1.800.000	20.900.000	21.400.000	21.900.000	21.900.000

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	3,34	3,14	2,98	2,83	2,68					
SK2	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	1,09	1,06	1,03	1	0,97					
SK3	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hulu Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	10,51	10	9,5	9,03	8,57					
SK4	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	9	9	9	9	9					
SK5	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
SK6	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	50	55	60	65	70					
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6056)			Pusat							702.816	7.750.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
SK1	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor		Persen	2,96	2,98	2,99	3,01	3,02					
SK2	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap Total Ekspor		Persen	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49					
SK3	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hulu		Rp Triliun	79,33	87,13	94,57	102,16	109,77					
SK4	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Rp Triliun	25,3	27,55	29,93	32,36	34,79					
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6057)			Pusat							9.202.816	93.115.000	98.465.000	104.065.000	107.915.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34					
	2	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hulu Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	10,51	10	9,5	9,03	8,57					
SK2	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki													
	1	Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT		Persen	60,34	64,59	69,61	74,67	79,76					
	2	Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT		Orang	3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465					
SK3	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia Hulu													
	1	Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara		Ribu Ton	60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38					
	2	Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri		Persen	52,5	55,12	57,87	60,76	63,79					
SK4	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hulu Berteknologi Tinggi		Persen	3,33	3,42	3,50	3,59	3,68					
	2	Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu Berbasis SDA yang Diolah		Indeks	0,3335	0,3295	0,3255	0,3215	0,3165					
	3	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia Hulu berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	39	39	39	40	40					
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap Total Ekspor		Persen	7,72	7,76	7,8	7,82	7,86					
	2	Jumlah Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	1	1	1	1	1					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hulu		Rp Triliun	79,33	87,13	94,57	102,16	109,77					
	2	Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu		Persen	82,3	83,47	84,64	84,77	85,23					
SK7	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Inklusif													

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK8	1 Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Rp Triliun	33,37	36,76	39,99	43,27	46,56					
	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Inklusif												
SK9	1 Nilai Investasi Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki		Rp Triliun	41,59	46,59	51,28	56,02	60,74					
	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif												
	1 Nilai Investasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Rp Triliun	25,3	27,55	29,93	32,36	34,79					
	2 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6058)			Pusat						7.650.000	35.500.000	37.000.000	37.500.000	39.000.000
SK1	Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Kimia Hulu Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Perusahaan Sektor Industri Kimia Hulu dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	10	11	12	13	14					
SK2	Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Perusahaan Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	9	10	11	12	13					
SK3	Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Perusahaan Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	9	16	17	18	19					
SK4	Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	5	6	7	8	9					
SK5	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	79,5	79,75	80	80,25	80,5					
Kegiatan Perbaikan Rantai Pasok Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6059)			Pusat						2.700.000	28.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	3,34	3,14	2,98	2,83	2,68					
SK2	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34					
SK3	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam												
	1 Jumlah Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	11	11	11	11	11					
SK4	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Inklusif												
	1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Persen	61,04	61,9	62,77	62,86	63,2					
SK5	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Inklusif												
	1 Utilisasi Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki		Persen	67,3	68,25	69,21	69,32	69,69					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam												
	1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
SK7	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	79,5	79,75	80	80,25	80,5					
Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6060)			Pusat						2.750.000	39.387.786	40.750.000	43.000.000	44.750.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34					
SK2	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia Hulu												
	1 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara		Ribu Ton	60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38					
	2 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri		Persen	52,5	55,12	57,87	60,76	63,79					
SK3	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu												
	1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hulu Terhadap Total Ekspor		Persen	7,21	7,23	7,24	7,25	7,29					
SK4	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki												
	1 Diversifikasi Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Berbasis SDA yang Diolah		-	0,6948	0,6908	0,6868	0,6828	0,6778					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam												
	1 Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Berbasis SDA yang Diolah		-	0,3654	0,3614	0,3574	0,3534	0,3484					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif												
	1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu		Persen	82,3	83,47	84,64	84,77	85,23					
SK7	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif												
	1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
Kegiatan Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6062)			Pusat						36.728.973	54.733.315	131.000.000	163.000.000	194.500.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar		Persen	11,49	13,58	14,54	14,72	14,90					
	2 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan		persen	4,00	5,50	6,50	7,50	8,70					
	3 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik		persen	7,50	9,09	10,76	10,85	11,42					
	4 Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan		persen	5,00	6,60	6,90	7,10	7,20					
	5 Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri non migas		persen	10,78	10,55	10,24	9,95	9,59					
	6 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri non migas		persen	0,93	0,91	0,88	0,86	0,83					
	7 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05					
	8 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Elektronika dan Telematika		persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02					
SK2	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika												
	1 Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel		Persen	33,64	33,74	33,74	33,74	33,74					
	2 Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga		Persen	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195					
	3 Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit		Persen	6,274	15,274	16,274	16,874	17,47					
	4 Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah		Persen	142,1	247,3	257,3	257,3	257,3					
	5 Utilisasi Industri Logam Dasar		Persen	77	79	81	83	85					
	6 Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya		Persen	60	63,25	65,78	69,5	70					
	7 Volume Reparasi Kapal		Ribu DWT	11.370,60	11.439,29	11.507,99	11.576,68	11.645,38					
	8 Volume Produksi Pembuatan Kapal		Ribu DWT	600,46	667,59	734,73	801,99	936,13					
	9 Nilai Ekspor Industri Perkapalan		Ribu USD	858,021	939,418	966,55	1.171,68	1.315,25					
SK3	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif												
	1 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Rp. Triliun	50,5	54,5	59,4	64,3	69,3					
	2 Utilisasi sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Persen	75,25	79,38	83,32	84,65	85,80					
	3 Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika		Rp. Triliun	8,9	9,0	10,1	10,9	11,7					
	4 Utilisasi sektor Industri elektronika dan telematika		Persen	46,89	48,57	51,37	52,79	53,19					
	5 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian		Rp. Triliun	36,2	41,3	45,9	50,5	55,3					
	6 Utilisasi sektor Industri permesinan dan alat mesin pertanian		Persen	57,16	60,31	63,29	64,30	65,18					
	7 Nilai realisasi investasi industri logam		Rp. Triliun	266,2	291,6	317,3	342,5	367,6					
	8 Utilisasi sektor Industri Logam		Persen	78,39	81,21	85,90	88,26	88,93					
SK4	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
	2 Persentase Perusahaan Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
	3 Persentase Perusahaan Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
	4 Persentase Perusahaan Sektor Industri Elektronika dan Telematika yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam Terhadap Total Ekspor		Persen	18	17,2	18,3	18,4	18,1					
	2 Kontribusi Ekspor industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor		Persen	4	3,7	3,5	3,5	3,6					
	3 Kontribusi Ekspor industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor		Persen	5	4,4	4,6	4,7	4,6					
	4 Kontribusi ekspor industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan terhadap total ekspor		Persen	5	5,3	5,2	5,2	5,3					
	5 Nilai Ekspor Sektor Industri Logam		Juta USD	53,674	54,285	62,346	68,086	73,493					
	6 Nilai Ekspor Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian		Juta USD	13,588	13,73	15,784	17,237	18,6					
	7 Nilai Ekspor Industri Elektronika dan Telematika		Juta USD	10,326	11,781	11,995	13,099	14,719					
	8 Nilai Ekspor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		Juta USD	15,092	16,864	17,53	19,144	21,358					
	9 Jumlah Produk Industri berbasis Sumber Daya Alam yang di Olah yang Berdaya Saing		Produk	7	7	8	8	8					
	10 Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang di Olah		Tanpa Satuan	0,539	0,535	0,531	0,527	0,522					
Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6063)			Pusat						4.000.000	49.000.000	57.000.000	71.500.000	80.500.000

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri non migas		persen	11,81	11,55	11,21	10,89	10,49					
	2 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri non migas		Persen	0,93	0,91	0,88	0,86	0,83					
	3 Rasio impor bahan baku industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan terhadap PDB sektor industri non migas		Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05					
	4 Rasio Impor bahan baku sektor Industri Elektronika dan Telematika terhadap PDB sektor industri non migas		persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02					
SK2	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif												
	1 Nilai Investasi Sektor Industri Logam		Rp. Triliun	266,2	291,6	317,3	342,5	367,6					
	2 Nilai Investasi Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian		Rp. Triliun	36,2	41,3	45,9	50,5	55,3					
	3 Nilai Investasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		Rp. Triliun	50,5	54,5	59,4	64,3	69,3					
	4 Nilai Investasi Sektor Industri Elektronika dan Telematika dan		Rp. Triliun	8,9	9,0	10,1	10,9	11,7					
	5 Utilisasi Sektor Industri Logam		persen	78,39	81,21	85,90	88,26	88,93					
	6 Utilisasi Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian		persen	57,16	60,31	63,29	64,30	65,18					
	7 Utilisasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		persen	75,25	79,38	83,32	84,65	85,80					
	8 Utilisasi Sektor Industri Elektronika dan Telematika		persen	46,89	48,57	51,37	52,79	53,19					
Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6067)		Pusat							1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.500.000	6.500.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional												
	1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Logam		Persen	10,78	10,55	10,24	9,95	9,59					
	2 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IMATAP		Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05					
	3 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IET		Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02					
	4 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IPAMP		Persen	0,93	0,91	0,88	0,86	0,83					
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6068)		Pusat							10.456.027	31.500.000	54.500.000	72.000.000	82.500.000
SK1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif												
	1 Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika		Rp. Triliun	10,326	11,781	11,995	13,099	14,719					
	2 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Rp. Triliun	15,092	16,864	17,53	19,144	21,358					
	3 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian		Rp. Triliun	13,588	13,73	15,784	17,237	18,6					
	4 Nilai realisasi investasi industri logam		Rp. Triliun	53,674	54,285	62,346	68,086	73,493					
SK2	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Juta USD	15,092	16,864	17,53	19,144	21,358					
	2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan berteknologi tinggi		Persen	2,30	2,16	2,02	1,88	1,75					
	3 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor		Persen	5	5,3	5,2	5,2	5,3					
	4 Nilai ekspor produk industri elektronika dan telematika		Juta USD	10,326	11,781	11,995	13,099	14,719					
	5 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika berteknologi tinggi		Persen	2,68	2,59	2,51	2,42	2,34					
	6 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor		Persen	4	3,7	3,5	3,5	3,6					
	7 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi		Persen	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19					
	8 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor		Persen	5	4,4	4,6	4,7	4,6					
	9 Nilai ekspor produk industri logam		Juta USD	53,674	54,285	62,346	68,086	73,493					
	10 Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian		Juta USD	13,588	13,73	15,784	17,237	18,6					
	11 Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor		Persen	18	17,2	18,3	18,4	18,1					
	12 Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC)		Persen	49	51	53	55	57					
	13 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC)		Persen	23	25	28	33	36					
Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6070)		Pusat							4.000.000	7.500.000	13.000.000	15.000.000	17.500.000
SK1	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		perusahaan	16	19	22	25	28					
	2 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri elektronika dan telematika		Perusahaan	13	15	17	19	21					
	3 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian		Perusahaan	6	7	8	9	10					
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (6071)		Pusat							243.740.451	421.567.940	410.775.940	411.275.940	411.775.940

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Aneka yang Inklusif												
	1 Nilai Investasi sektor industri Aneka		Rp. Triliun	6,7	6,9	7,3	7,7	8,1					
	2 Utilisasi Sektor Industri Aneka		Persen	71,41	73,26	75,49	75,98	76,67					
	3 Proporsi nilai tambah IKM Aneka terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	0,38	0,39	0,4	0,41	0,41					
	4 Wirasaha industri kecil Industri Aneka yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	0	500	500	500	500					
SK2	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah												
	1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	20	20,1	20,2	20,3	20,4					
	2 Wirasaha industri kecil yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	15	60	60	60	60					
SK3	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah PFBB yang Inklusif												
	1 Proporsi nilai tambah IKM PFBB terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	7,3	7,4	7,5	7,55	7,6					
	2 Wirasaha industri kecil PFBB yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	456	1.400	1.400	1.400	1.400					
	3 IKM PFBB yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya		IKM	1	5	5	5	5					
	4 IKM PFBB berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi		IKM	10	20	20	20	20					
SK4	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah KSK yang Inklusif												
	1 Proporsi nilai tambah IKM KSK terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	7,5	7,6	7,65	7,75	7,8					
	2 Wirasaha industri kecil KSK yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	456	1.400	1.400	1.400	1.400					
	3 IKM KSK yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya		IKM	1	5	5	5	5					
	4 IKM KSK berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi		IKM	0	30	30	30	30					
SK5	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah LMEA yang Inklusif												
	1 Proporsi nilai tambah IKM LMEA terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	4,45	4,5	4,55	4,65	4,7					
	2 Wirasaha industri kecil LMEA yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	456	1.400	1.400	1.400	1.400					
	3 IKM LMEA yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya		IKM	15	15	15	15	15					
SK6	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri												
	1 Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik		Persen	10	10	10	10	10					
	2 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan		Sentra	6	6	6	6	6					
SK7	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri PFBB												
	1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) PFBB yang dikembangkan		Sentra	4	4	4	4	4					
SK8	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri KSK												
	1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) KSK yang dikembangkan		Sentra	3	5	5	5	5					
SK9	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri LMEA												
	1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) LMEA yang dikembangkan		Sentra	3	8	8	8	8					
SK10	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri Aneka												
	1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) Aneka yang dikembangkan		Sentra	1	1	1	1	1					
SK11	Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	50	107	107	107	107					
	2 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	10	42	42	42	42					
	3 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah Fesyen dan Kriya melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	10	20	20	20	20					
SK12	Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah PFBB Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah PFBB melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	500	500	500	500	500					
SK13	Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah KSK melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	350	503	503	503	503					
SK14	Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah LMEA Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah LMEA melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	100	814	814	814	814					
	2 IKM Startup Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui program akselerasi		IKM	20	20	20	20	20					
SK15	Meningkatnya Efisiensi Industri Aneka Melalui Pemanfaatan Teknologi												
	1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Aneka melalui penerapan Making Indonesia 4.0		IKM	0	6	6	6	6					
SK16	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka												
	1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil dan Menengah PFBB yang Tingkat Kepatuhan Baik		Persen	70	72	74	76	78					
	2 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil dan Menengah KSK yang Tingkat Kepatuhan Baik		Persen	70	72	74	76	78					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	3	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil dan Menengah LMEA yang Tingkat Kepatuhan nya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
	4	Persentase Perusahaan Sektor Industri Aneka yang Tingkat Kepatuhan nya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK17	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Aneka													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Aneka Terhadap Total Ekspor		Persen	3,04	3,06	3,07	3,08	3,1					
	2	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Aneka Berteknologi Tinggi		Persen	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07					
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal (6072)			Pusat							5.500.000	23.000.000	26.450.000	30.421.000	32.246.738
SK1	Terwujudnya kebijakan ketahanan dan iklim usaha industri yang efektif dan efisien													
	1	Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Lain		Rekomendasi Kebijakan	8	10	11	12	14					
SK2	Meningkatnya Daya Saing dan Populasi Industri													
	1	Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri		Industri	10	15	19	23	27					
SK3	Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan sektor industri													
	1	Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri		Rp Triliun (kumulatif)	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13					
SK4	Meningkatnya Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri													
	1	Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri		Persen	20	35	45	60	80					
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri (6073)			Pusat							27.682.000	61.650.000	70.898.500	81.536.125	93.764.594
SK1	Termanfaatkannya Hasil Diklat Luar Negeri													
	1	Peningkatan pemahaman pegawai yang mendapatkan informasi hasil diklat luar negeri		Persen	60	65	70	75	80					
SK2	Meningkatnya daya saing kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan non migas dan jasa industri													
	1	Persentase pendampingan pemanfaatan akses internasional bagi pelaku usaha industri dalam negeri		Persen	10	12	14	16	18					
SK3	Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional													
	1	Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional bagi pelaku usaha industri dalam negeri		Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4					
SK4	Pemanfaatan Forum Kerja sama PTA													
	1	Posisi runding PTA/ PTA/ CEPA yang ditindaklanjuti		Rekomendasi Kebijakan	3	4	5	6	7					
SK5	Pemanfaatan Forum Kerja sama non-FTA													
	1	Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular		Kerja Sama	1	1	1	1	1					
	2	Kerja sama dalam Forum Bilateral, Regional dan Multilateral		Kerja Sama	1	1	1	1	1					
SK6	Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri													
	1	Nilai Komitmen Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan yang Difasilitasi		Miliar Rupiah	10	10	15	15	20					
	2	Jumlah Minat Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan yang Difasilitasi		Minat	3	3	4	4	4					
	3	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Internasional dalam rangka Pembukaan Akses Sumber Daya Industri yang Difasilitasi		Kesepakatan	1	1	2	2	2					
SK7	Meningkatnya Fasilitas Promosi dan Penetrasi Global Sektor Industri													
	1	Kemitraan industri dalam jaringan produksi global		Kemitraan	3	3	3	3	3					
SK8	Meningkatnya Kerja Sama Internasional melalui Investasi, Pembukaan Akses Pasar dan Akses Sumber Daya Industri (Atperin Taipei, Brussel dan Tokyo)													
	1	Analisis Potensi Pasar dan Profil Industri Unggulan		Rekomendasi Kebijakan	9	10	15	18	19					
	2	Kesepakatan Kerja Sama Bidang Industri yang Difasilitasi		Kesepakatan	5	5	5	8	8					
Kegiatan Pengembangan Perwilyahan Industri (6074)			Pusat							7.850.000	38.850.000	45.378.000	51.574.000	59.284.000
SK1	Menguatnya Peran Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri(KPI) dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi													
	1	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra @Lamongan		Rp Triliun	1,37	1,56	1,72	1,85	1,97					
	2	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi		Rp Triliun	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,03					
	3	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer		Rp Triliun	0,73	0,77	1,43	1,94	2,46					
	4	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat		Rp Triliun	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,01	0,23					
	5	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak		Rp Triliun	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,01					
	6	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali		Rp Triliun	467,46	468,21	468,86	469,37	469,89					
	7	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust		Rp Triliun	0,48	0,64	0,77	0,88	0,98					
	8	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintan Inti Industrial Estate		Rp Triliun	1,73	1,81	3,04	4,01	4,99					
	9	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon		Rp Triliun	5,99	5,99	6,00	6,11	6,22					
	10	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Wilmar		Rp Triliun	13,14	13,27	13,38	13,46	13,55					
	11	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Batang		Rp Triliun	4,14	4,50	4,82	5,07	5,32					

Kode		Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	12	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)		Rp Triliun	2,31	2,40	2,47	2,53	2,59					
	13	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe		Rp Triliun	305,96	306,24	306,48	306,68	306,87					
	14	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)		Rp Triliun	9,16	11,33	13,20	14,67	16,15					
	15	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi		Rp Triliun	2,53	5,04	7,21	8,91	10,62					
	16	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli		Rp Triliun	0,21	0,40	0,57	0,70	0,83					
	17	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)		Rp Triliun	4,30	6,35	8,12	9,51	10,91					
	18	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park		Rp Triliun	1,05	1,05	1,24	4,26	7,29					
	19	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay		Rp Triliun	349,49	352,65	355,38	357,52	359,67					
	20	Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Takalar		triliun rupiah	- (tahap persiapan)	0,24	0,30	0,35	0,41					
	21	Jumlah KI Prioritas yang Operasional		KI (Kumulatif)	1	2	3	4	5					
	22	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan		Kawasan Industri	5	5	5	5	5					
	23	Kawasan Industri (KI) tertentu yang dikembangkan		Kawasan Industri (Kumulatif)	3	3	4	4	5					
	24	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPi) yang dikembangkan		WPPi	3	6	6	6	6					
	25	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan		KPI	5	5	5	5	5					
SK2	Meningkatnya Pengawasan Penerapan Industri Berkelanjutan													
	1	Persentase Perusahaan KI dengan Tingkat Kepatuhan Baik		Persen	80	82	85	87	90					
	2	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan		Persen	5	6	7	8	10					
SK3	Tersedianya NSPK Pengembangan Wilayah Industri													
	1	Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri		Rancangan Peraturan	2	3	3	3	3					
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Industri (6075)			Pusat							7.608.992	9.001.620	13.597.685	15.750.328	18.156.967
SK1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengawasan data sektoral yang terpadu, efisien, dan akurat													
	1	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian		Indeks	3,50	3,50	3,60	3,60	3,65					
	2	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian		Indeks	3,05	3,05	3,10	3,10	3,15					
Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (6076)			Pusat							24.023.517	49.709.000	53.820.000	57.094.000	59.748.200
SK1	Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri													
	1	Fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang/produk antara dan/atau produk hulu dan/atau penyedia jasa		Sertifikat Produk	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000					
	2	Sosialisasi Kebijakan, Promosi Dan Kampanye Produk Dalam Negeri		Promosi	3	3	3	3	3					
	3	Fasilitasi Temu Bisnis Antara Produsen Barang dan/atau Penyedia Jasa Dengan Pengguna Produk Dalam Negeri		Kesepakatan	200	210	245	280	300					
	4	Fasilitasi Forum Komunikasi Tim Nasional P3DN dan Tim P3DN KI/PD/BUMN		Forum	2	2	2	2	2					
SK2	Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri													
	1	Penguatan Regulasi, Kebijakan, Tata Kelola Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3					
	2	Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Penegakan Sanksi Atas Pelanggaran Implementasi		Rekomendasi	5	5	5	5	5					
SK3	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Produsen Barang dan/atau Penyedia Jasa													
	1	Pemberian Bimbingan Teknis Perhitungan TKDN Bagi Perusahaan Industri		Perusahaan	N/A	300	315	330	350					
SK4	Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Pendukung Dalam Penerapan Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri													
	1	Penyediaan Informasi Terkait Daftar Inventarisasi Produk Dalam Negeri Yang Telah Bersertifikat TKDN		Layanan	1	1	1	1	1					
	2	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Verifikasi		Produk	830	830	850	900	950					
Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077)			Pusat							152.528.610	228.177.587	249.829.510	271.040.180	311.321.096
SK1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK													
	1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau		Persen	13	19	24	27	32					
SK2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Pada Industri Manufaktur													
	1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri		Perusahaan Industri (Akumulasi)	108	141	201	261	321					
	2	Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri		Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)	2	3	4	5	6					
SK3	Terwujudnya Jasa Industri yang Profesional													
	1	Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya		Persen	7,5	10	12,5	15	20					
	2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan stakeholder jasa industri		Rekomendasi Kebijakan	2	3	4	5	6					
	3	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)		Persen	87,19	88,00	85,34	86,08	87,04					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	4 Nilai Net Promoter Score (NPS)		Nilai	29,04	30,79	32,83	34,75	37,04					
SK4	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri												
	1 Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Persen	8,39	13,27	18,38	22,89	27,43					
	2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri		Hasil Layanan	5.578,54	5.721,17	5.872,71	6.017,21	6.193,38					
	3 Nilai Revenue on Asset (RoA)		Persen	12,02	12,52	12,87	13,35	13,77					
	4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)		Persen	53,45	55,10	56,87	58,71	59,86					
Kegiatan Pengembangan Industri Hijau (6078)		Pusat							8.400.000	17.700.000	24.000.000	26.000.000	32.400.000
SK1	Meningkatnya Sertifikasi Industri Hijau (SIH)												
	1 Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus		RSIH	2	5	5	7	8					
	2 Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan		Persen	100	100	100	100	100					
SK2	Terwujudnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular yang Diterapkan di Sektor Industri												
	1 Persentase Peningkatan Perusahaan Industri Yang Tersertifikasi Penerapan Industri Hijau		Persen	25	25	30	30	35					
	2 Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri		Persen	11	12	13	14	15					
	3 Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan industri hijau		Rekomendasi Kebijakan	44	53	62	71	80					
Kegiatan Pengembangan Standar Industri (6079)		Pusat							10.000.000	18.300.000	20.500.000	23.100.000	25.200.000
SK1	Tersedianya Standar Bidang Industri yang Meningkatkan Daya Saing Industri												
	1 Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun		Standar Industri	30	30	35	35	40					
	2 Peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib		SNI Wajib	140	145	150	156	162					
	3 Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas		Persen	60	65	70	75	80					
	4 Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang siap untuk diharmonisasi		Persen	50	50	50	60	60					
SK2	Terselenggaranya Pengawasan Standar Yang Optimal												
	1 Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi		Persen	75	80	85	90	95					
	2 Persentase peningkatan pengawasan produk		Persen	20	20	20	20	20					
	3 Persentase pemenuhan SDM pengawasan standarisasi industri		Persen	52	64	76	88	100					
	4 Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standarisasi industri		Persen	100	100	100	100	100					
	5 Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi standarisasi industri		Persen	10	10	10	12	15					
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6081)		Pusat							762.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
SK1	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Tingkat Penerapan SPBE Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	80	80,25	80,5	80,75	81					
Kegiatan Pengelolaan Bahan Kimia dan Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia di Sektor Industri (6082)		Pusat							500.000	600.000	700.000	800.000	900.000
SK1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif												
	1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu		Persen	82,3	83,47	84,64	84,77	85,23					
Kegiatan Pengembangan Industri Produk Halal (6699)		Pusat							9.184.609	39.600.000	47.250.000	51.600.000	61.500.000
SK1	Meningkatnya jumlah usaha dan produk industri yang memenuhi aspek kehalalan produk												
	1 Jumlah Industri yang difasilitasi sertifikasi halal		Perusahaan Industri	1.000	900	5.000	6.000	7.000					
	2 Jumlah rekomendasi kebijakan teknis Terkait industri halal		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1					
SK2	Tersedianya Ekosistem Industri Halal												
	1 Penguatan infrastruktur yang mendukung Pengembangan Industri Halal		LPH	2	3	3	4	5					
	2 Jumlah SDM Industri Halal yang kompeten		Orang	200	500	700	900	1000					
SK3	Meningkatnya nilai ekspor produk industri halal												
	1 Persentase pertumbuhan ekspor produk industri halal		Persen	4,46	5,19	6,32	6,69	7,00					
Kegiatan Peningkatan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) (6966)		Pusat							1.500.000	2.300.000	11.000.000	14.000.000	17.000.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan		Persen	5	6,60	6,90	7,10	7,20					
	2 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IMATAP		Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05					
SK1	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat		%	1,00	1,1	1,2	1,3	1,4					
SK1	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global		Persen	23,00	25,00	28,00	33,00	36,00					
Program Dukungan Manajemen		Pusat							1.657.309.521	1.940.194.139	2.019.549.072	2.125.240.788	2.227.662.528
SP71	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen Agro	Pusat							38.450.002	57.876.000	58.220.000	64.850.000	71.880.000
	1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	83,14	83,15	83,16	83,17	83,18					
	3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	4 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	91,76	91,77	91,78	91,79	91,80					
	5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Aero		Nilai	93,52	93,54	93,56	93,58	93,60					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
	Satuan	2025		2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00				
	7	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	93,59	93,60	93,61	93,62	93,63				
	8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00				
	9	Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa		Persen	94,20	94,25	94,30	94,35	94,40				
	10	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN		Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00				
	11	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Persen	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50				
	12	Tersedianya SOP yang up to date dan relevan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
SP72	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen IKFT		Pusat							48.265.000	86.453.815	86.453.815	86.453.815
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00				
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	81,3	81,55	81,8	82,05	82,3				
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5				
	4	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	93,00	93,5	94,5	95,5	96,5				
	5	Nilai Hasil Pengawasan Unit Kearsipan		Nilai	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00				
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	65,25	65,5	65,75	66,00	66,25				
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00				
	8	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00				
SP73	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen ILMATE		Pusat							49.211.312	104.618.622	113.629.066	131.850.000
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5				
	2	Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00				
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00				
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00				
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00				
	6	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7				
	7	Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00				
	8	Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/ selesai tahap harmonisasi		Legislasi	2	2	2	2	2				
	9	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Ditjen ILMATE		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00				
SP74	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		Pusat							84.564.438	141.404.021	141.404.021	141.404.021
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00				
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7				
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5				
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00				
	5	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00				
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00				
	7	Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM		Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
	8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00				
	9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00				
	10	Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA		Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00				
	11	Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA		Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				
	12	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00				
	13	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00				
SP75	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Ditjen KPAIL		Pusat							57.970.000	87.684.500	100.747.000	115.771.175
	1	Nilai SAKIP Ditjen KPAIL		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00				
	2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAIL		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7				
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5				
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00				
	5	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00				
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Ditjen KPAIL		Persen	85,00	85,5	86,00	86,5	87,00				
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Ditjen KPAIL		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00				
	8	Efektivitas Regulasi yang Diinisiasi oleh Ditjen KPAIL		Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00				
	9	Jumlah Kebijakan Industri yang Efektif		Peraturan (kumulatif)	11	12	13	14	15				
	10	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAIL		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00				

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SP76	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada BSKJI	Pusat							505.884.083	563.121.098	584.866.978	606.068.948	635.901.934
	1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		Persen	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00					
	2 Indeks Profesionalitas ASN		Persen	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3 Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					
	4 Indeks Manfaat Kerja Sama		Indeks	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12					
	5 Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A		Persen	41,00	50,00	58,00	66,00	75,00					
	6 Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	8 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	9 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	10 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Nilai	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	11 Penilaian dan analisis laporan keuangan		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SP77	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima pada BPSDMI	Pusat							564.536.728	564.976.886	575.340.000	594.080.000	610.820.000
	1 Nilai SAKIP BPSDMI		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BPSDMI		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
	3 Indeks Profesional ASN pada BPSDMI		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	4 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BPSDMI		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada BPSDMI		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	6 Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral pada BPSDMI		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh BPSDMI		Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00					
	8 Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMI		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SP78	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Itjen	Pusat							44.260.223	51.460.992	52.948.113	54.479.958	56.057.862
	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2 Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja		Laporan	1	1	1	1	1					
	3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian		Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00					
	4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	6 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal		Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00					
	8 Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00					
	9 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	11 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	12 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SP79	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif	Pusat							253.322.002	266.827.981	288.821.748	311.813.490	325.476.581
	1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		Persen	100	100	100	100	100					
	2 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Kinerja Pegawai		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	3 Nilai SAKIP		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	4 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional		Indeks	94,8	94,8	94,85	94,85	95,00					
	5 Indeks Sistem Merit		Nilai	330,5	330,5	331,00	331,00	331,00					
	6 Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	7 Indeks Berakhlak		Persen	67,25	67,25	68,00	68,00	69,00					
	8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	9 Tingkat Akuntabilitas Keuangan		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	10 Tingkat Maturitas SPIP		Indeks	3,7	3,7	3,75	3,75	3,8					
	11 Indeks Pengelolaan Aset		Indeks	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9					
	12 Indeks Tata Kelola Pengadaan		Indeks	86,45	86,45	87,19	87,19	87,2					
	13 Indeks Reformasi Hukum		Indeks	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8					
	14 Indeks Kualitas Kebijakan		Indeks	66,00	66,00	67,00	67,00	68,00					
	15 Indeks Pelayanan Publik		Indeks	4,55	4,55	4,6	4,6	4,7					
	16 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		Nilai	87,3	87,3	87,6	87,6	88,1					
	17 Survei Kepuasan Masyarakat		Indeks	91,3	91,3	91,7	91,7	92,00					
	18 Tingkat Digitalisasi Arsip		Nilai	95,00	95,00	95,3	95,3	95,3					
	19 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	20 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian		Indeks	3,45	3,45	3,64	3,64	3,76					
	21 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian		Indeks	3,05	3,05	3,2	3,2	3,3					
	22 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada Sekretariat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	23 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian		Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00					
SP80	Terwujudnya ASN bidang industri yang Professional dan Berkepribadian	Pusat							10.845.733	12.500.000	13.750.000	15.000.000	15.250.000
	1 Persentase ASN bidang industri lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik		Persen	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00					
	2 Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri		Persen	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00					
SP81	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif	Pusat							0	3.270.224	3.368.331	3.469.381	3.573.463
	1 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00					
	2 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi		Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	3 Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti		Persen	80,00	80,25	80,45	80,60	81,00					
Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen		Pusat							1.657.309.521	1.940.194.139	2.019.549.072	2.125.240.788	2.227.662.528
Kegiatan Pelayanan Legislasi, Advokasi, dan Diseminasi (1824)		Pusat							5.724.324	9.750.000	11.400.000	13.000.000	15.000.000
SK1	Meningkatnya layanan legislasi dan advokasi yang andal												
	1 Indeks Reformasi Hukum		Nilai	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70					
	2 Indeks Kualitas Kebijakan		Nilai	66,00	66,00	67,00	67,00	68,00					
SK2	Terpenuhinya Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan												
	1 Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan		Persen	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00					
	2 Nilai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		Nilai	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00					
SK3	Terwujudnya perlindungan hukum terhadap institusi yang optimal												
	1 Persentase kesesuaian jumlah perkara hukum yang ditangani dengan yang dimohonkan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
SK4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Biro Hukum												
	1 Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	3 Nilai hasil pengawasan kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4 Tingkat penerapan SPBE		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	5 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
	6 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Umum dan Protokoleran serta Sarana dan Prasarana Perkantoran (1825)		Pusat							121.307.021	115.302.559	126.435.000	139.460.000	140.485.000
SK1	Terwujudnya layanan umum yang efektif, efisien, dan akuntabel												
	1 Indeks Pengelolaan Administrasi dan Agenda Pimpinan		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8					
	2 Tingkat Kepuasan Pasien Klinik Utama Kementerian Perindustrian		Persen	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61					
	3 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan		Indeks	3,4	3,42	3,44	3,48	3,5					
SK2	Terwujudnya layanan pengadaan yang efektif, efisien, dan transparan												
	1 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Perindustrian		Nilai	87,00	87,00	87,19	87,19	87,20					
	2 Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan		Persen	91,50	91,6	91,7	91,8	91,9					
SK3	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai												
	1 Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Gedung Kantor Pusat Kementerian		Indeks	72,00	71,00	70,00	69,00	68,00					
	2 Laporan terhadap kerusakan gedung dan utilitas gedung yang dilaporkan melalui aplikasi e-komplain ditindaklanjuti hingga selesai		Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00					
	3 Indeks pengelolaan gedung IMC yang sesuai dengan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH)		Indeks	133,00	134,00	135,00	136,00	137,00					
SK4	Terwujudnya pengelolaan layanan administrasi yang modern dan akuntabel												
	1 Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian Perindustrian		Nilai	95,00	95,00	95,00	95,00	95,10					
	2 Nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian Perindustrian		Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00					
	3 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Sekretariat Jenderal		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
SK5	Terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi Biro Umum												
	1 Nilai SAKIP Biro Umum		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	2 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Biro Umum		Nilai	95,29	95,3	95,3	95,4	95,5					
	3 Tingkat Penerapan SPBE		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	4 Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa di Biro Umum		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	5 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Biro Umum		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
Kegiatan Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi (1826)		Pusat							10.563.034	10.037.863	11.941.012	13.164.089	15.398.601
SK1	Terwujudnya ASN yang Kompeten dan Berintegritas												
	1 Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2 Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3 Indeks Sistem Merit Kementerian Perindustrian		Skor	330,5	330,5	331,00	331,00	332,00					
	4 Indeks Ber-AKHLAK		Persen	68,00	68,5	69,00	69,5	70,00					
SK2	Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran												
	1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00					
	2 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		Skor	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
SK3	Meningkatnya Kompetensi SDM dan Tata Kelola Organisasi Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi												
	1 Nilai SAKIP Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi		Nilai	77,8	79,75	79,9	80,00	80,25					
	2 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	90,75	91,00	91,25	91,5	91,75					
	4 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
SK4	Meningkatnya Kualitas Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja												
	1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan BMN (1827)		Pusat							63.190.663	66.227.761	67.905.000	68.905.000	70.795.000
SK1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Kementerian Perindustrian yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien												
	1 Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	2 Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran Kementerian Perindustrian		Indeks	93,40	93,40	93,50	93,50	93,60					
	3 Tingkat Maturitas SPIP		Skor	3,68	3,68	3,69	3,69	3,70					
	4 Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal		Indeks	93,40	93,40	93,50	93,50	93,60					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	5 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00					
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
	1 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Keuangan		Persen	91,00	91,5	92,00	92,5	93,00					
SK3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian												
	1 Indeks Pengelolaan Aset		Indeks	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80					
SK4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Keuangan												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan		Nilai	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90					
	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Telah Ditindaklanjuti		Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00					
	3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	71,60	71,65	71,70	71,75	71,80					
	4 Tingkat Penerapan SPBE		Persen	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40					
	5 Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan		Indeks	81,30	81,31	81,32	81,33	81,34					
Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (1828)		Pusat							9.304.999	9.518.418	10.470.400	11.449.468	12.524.223
SK1	Terwujudnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja												
	1 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional		Indeks	94,8	94,8	94,85	94,85	95,00					
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
SK2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan												
	1 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan Koordinasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Industri Lintas Sektor Dan Daerah		Skala (1-5)	4,25	4,30	4,40	4,45	4,50					
	2 Persentase Penyiapan Bahan Pimpinan Sesuai Dengan Topik dan Tepat Waktu		Persen	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5					
	3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal		Nilai	81,00	81,5	82,00	82,5	83,00					
SK3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan		Nilai	80,9	81,25	81,5	81,75	82,00					
	3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	91,00	91,25	91,5	92,00	92,5					
	4 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Biro Perencanaan		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	5 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Biro Perencanaan		Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Pada Biro Perencanaan yang Telah Ditindaklanjuti		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (1829)		Pusat							14.138.329	17.192.122	18.901.310	20.788.140	22.859.456
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusdatin		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45					
	2 Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	92,7	92,71	92,72	92,73	92,74					
	4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	5 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian		Indeks	3,50	3,50	3,60	3,60	3,65					
	6 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau di Pusdatin		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	7 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti oleh Pudatin		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	8 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian		Indeks	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08					
Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (1831)		Pusat							11.485.037	15.804.258	17.369.026	19.286.793	21.835.951
SK1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian												
	1 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian		Indeks	4,58	4,58	4,60	4,60	4,65					
	2 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian		Nilai	87,30	87,30	87,40	87,40	87,50					
	3 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian		Indeks	91,50	91,50	91,50	91,50	91,70					
	4 Tingkat kepuasan fasilitasi hubungan kelembagaan		Indeks	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29					
	5 Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial Kemenperin dengan Masyarakat		Persen	4,15	4,17	4,19	4,21	4,25					
	6 Persentase pemberitaan positif sektor industri di media massa		Persen	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45					
	7 Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang ditindaklanjuti		Persen	86,3	86,4	86,5	86,7	86,8					
	8 Persentase kehadiran undangan media massa dalam peliputan pimpinan Kemenperin		Persen	90,00	90,5	91,00	91,5	92,00					
SK2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal												
	1 Rata-Rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN Biro Humas		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2 Nilai SAKIP Biro Humas		Nilai	80,71	80,72	80,73	80,74	80,75					
	3 Nilai Pengawasan Kearsipan		Nilai	87,00	87,1	87,2	87,3	87,4					
	4 Tingkat Penerapan SPBE		Persen	80,00	80,1	80,2	80,3	80,4					
	5 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Biro Humas yang telah ditindaklanjuti		Persen	50,00	50,1	50,2	50,3	50,4					
	6 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di Biro Hubungan Masyarakat		Persen	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I (1841)		Pusat							2.500.000	3.499.999	3.604.999	3.713.150	3.824.542
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3 Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Laporan	1	1	1	1	1					
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik												
	1 Nilai SAKIP Inspektorat I		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK3	2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I		Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00					
	Terkelolanya Anggaran Inspektorat I Yang Akuntabel dan Berkualitas												
	1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat I		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II (1842)									2.500.000	3.502.048	3.609.260	3.719.796	3.833.761
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3 Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		Laporan	1	1	1	1	1					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik												
	1 Nilai SAKIP Inspektorat II		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II		Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat I Yang Akuntabel dan Berkualitas												
	1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III (1843)									2.500.000	3.500.000	3.605.001	3.713.151	3.824.545
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3 Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		Laporan	1	1	1	1	1					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik												
	1 Nilai SAKIP Inspektorat III		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III		Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat I Yang Akuntabel dan Berkualitas												
	1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV (1844)									2.500.000	3.500.000	3.605.000	3.713.151	3.824.544
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3 Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV		Laporan	1	1	1	1	1					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik												
	1 Nilai SAKIP Inspektorat IV		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV		Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat I Yang Akuntabel dan Berkualitas												
	1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (4905)									9.345.922	13.660.000	14.260.000	14.840.000	15.228.350
SK1	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	3 Tingkat Penerapan SPBE		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti		Nilai	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal (6036)									34.260.223	37.229.169	38.287.184	39.376.941	40.499.388
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan												
	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian		Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00					
	4 Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja		Laporan	1	1	1	1	1					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik												
	1 Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas												
	1 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal		Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	2 Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		Persen	78,00	80,00	81,00	81,00	83,00					
	3 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	4 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro (6037)									38.450.002	57.876.000	58.220.000	64.850.000	71.880.000

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro												
	1 Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	79,50	83,50	83,55	83,60	83,65					
	2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	83,14	83,15	83,16	83,17	83,18					
	3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	94,75	94,76	94,77	94,78	94,79					
	4 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	91,76	91,77	91,78	91,79	91,80					
	5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	93,52	93,54	93,56	93,58	93,60					
	6 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	93,59	93,60	93,61	93,62	93,63					
	8 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	9 Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa		Persen	94,20	94,25	94,30	94,35	94,40					
	10 Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN		Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00					
	11 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Persen	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50					
	12 Tersedianya SOP yang up to date dan relevan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6038)		Pusat							48.265.000	86.453.815	86.453.815	86.453.815	86.453.815
SK1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Kimia Hulu yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Kimia Hulu		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					
SK2	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					
SK3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					
SK4	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					
SK5	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	79,5	79,75	80,00	80,25	80,5					
	2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	81,3	81,55	81,8	82,05	82,3					
	3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	94,00	94,25	94,50	94,75	95,00					
	4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Pengolah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00					
	5 Tingkat Penerapan SPBE Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	80,00	80,25	80,5	80,75	81,00					
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	7 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	93,00	93,5	94,00	94,5	95,00					
	8 Persentase Nilai Pengelolaan BMN terhadap Penetapan Status Penggunaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00					
	9 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SK6	Terfasilitasinya Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dalam rangka Penguatan Iklim Usaha, Peningkatan Akses Pasar, dan Penyebarluasan Informasi												
	1 Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	82,5	83,00	83,5	84,00	84,5					
	2 Tingkat Partisipasi pada Kerjasama Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	96,5	97,00	97,5	98,00	98,5					
	3 Isu Aktual/Strategis Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang difasilitasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Rekomendasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
	4 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6039)		Pusat							49.211.312	104.618.622	113.629.066	131.850.000	147.800.000
SK1	Terfasilitasinya Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dalam rangka Penguatan Iklim Usaha, Peningkatan Akses Pasar, dan Penyebarluasan Informasi												
	1 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	2 Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Nilai	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	3 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Direktorat Industri Logam		Persen	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	5 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IET		Persen	60,1	63,00	65,00	67,00	72,00					
	6 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IPAMP		Persen	60,1	63,00	65,00	67,00	72,00					
	7 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IMATAP		Persen	60,1	63,00	65,00	67,00	72,00					
	8 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
	9 Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	10 Nilai SAKIP Direktorat Industri Logam		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	11 Nilai SAKIP Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	12 Nilai SAKIP Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	13 Nilai SAKIP Direktorat Industri Elektronika dan Telematika		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	14 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	15 Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	16 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Setditjen ILMATE		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	17 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. Industri Logam		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	18 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IET		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	19 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IPAMP		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	20 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IMATAP		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SK2	Terfasilitasinya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dalam rangka Penguatan Iklim Usaha dan Akses Pasar												
	1 Realisasi industri yang menggunakan fasilitas insentif Pemerintah		Jumlah Perusahaan	6,00	6,00	8,00	8,00	19,00					
	2 Tersusunnya usulan posisi kerja sama Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan harmonisasi Tarif		Jumlah Usulan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
	3 Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi		Legislasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka (6040)		Pusat							84.564.438	141.404.021	141.404.021	141.404.021	141.404.021
SK1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2 Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	5 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	6 Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7 Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM		Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
	8 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	9 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	10 Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA		Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	11 Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA		Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00					
	12 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	13 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
	14 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	15 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	16 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	17 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	18 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	19 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	20 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	21 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	22 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	23 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	24 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Aneka		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	25	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Aneka		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SK2		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia												
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45					
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4	Nilai hasil pengawasan kearsipan Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	6	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
SK3		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya												
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45					
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4	Nilai hasil pengawasan kearsipan Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	6	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (6041)				Pusat						57.970.000	87.684.500	100.747.000	115.771.175	133.044.852
SK1		Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Set Ditjen KPAIL												
	1	Nilai SAKIP		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	5	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Jasa di Sekretariat Ditjen KPAIL		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	7	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	8	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAIL		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SK2		Tersedianya Kebijakan Pembangunan di Bidang Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional												
	1	Efektivitas regulasi yang diinisiasi oleh Ditjen KPAIL		Persen	83,00	86,00	87,00	88,00	89,00					
	2	Persentase Naskah Kesepakatan Kerja Sama Internasional yang		Persen	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00					
SK3		Meningkatnya Publikasi Kebijakan												
	1	Peningkatan Pemberitaan dan Publikasi Produk Informasi Ditjen KPAIL		Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
SK4		Terwujudnya Birokrasi Direktorat KIUI yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima												
	1	Nilai SAKIP Direktorat KIUI		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Direktorat KIUI		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	3	Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat KIUI		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat KIUI		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK5		Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima												
	1	Nilai SAKIP Direktorat PI		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4	Persentase Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SK6		Terwujudnya Birokrasi Direktorat AII yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima												
	1	Nilai SAKIP Direktorat AII		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Direktorat AII		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	3	Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat AII		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat AII		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK7		Terwujudnya Birokrasi Direktorat ASDIPI yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima												
	1	Nilai AKIP Direktorat ASDIPI		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Direktorat ASDIPI		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	3	Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat ASDIPI		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat ASDIPI		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target						Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK8	Terwujudnya Birokrasi Atperin (Taipei, Brussel, dan Tokyo) yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima												
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)		Pusat							505.884.083	563.121.098	584.866.978	606.068.948	635.901.934
SK1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri												
1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah		Persen	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00					
SK2	Terwujudnya SDM yang Profesional												
1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70					
SK3	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Pelayanan Publik												
1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI		Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					
2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
3	Indeks Pelayanan Publik		Indeks	4,13	4,16	4,19	4,22	4,25					
4	Indeks Manfaat Kerja Sama		Indeks	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12					
5	Satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A		Persen	41,00	50,00	58,00	66,00	75,00					
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
SK5	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi												
1	Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	72,25	75,5	75,5	76,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043)		Pusat							564.536.728	564.976.886	575.340.000	594.080.000	610.820.000
SK1	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di lingkungan BPSPDMI												
1	Nilai SAKIP		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
2	Nilai Laporan Keuangan		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
3	Nilai Profesional ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
7	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian		Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00					
8	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Industri Produk Halal (6561)		Pusat							8.262.673	9.335.000	10.140.000	10.920.000	11.350.000
SK1	Meningkatnya Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SK2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta Evaluasi Kinerja												
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PIH		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
SK3	Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PIH yang efektif dan efisien												
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		Nilai	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
SK4	Tersedianya Data dan Informasi Publik yang berkualitas												
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan PIH		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
2	Tingkat Penerapan SPBE		Indeks	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN (6893)		Pusat							10.845.733	12.500.000	13.750.000	15.000.000	15.250.000
SK1	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pendidikan dan Pelatihan Aparatur												
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik		Persen	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00					
2	Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri		Persen	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00					
Kegiatan Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian (7886)		Pusat							0	3.500.000	3.605.000	3.713.150	3.824.545
SK1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik												
1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi		Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK2	Organisasi Fit for purpose												
1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00					
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi		Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00					
3	Persentase atas temuan ADIT yang Ditindaklanjuti		Persen	80,00	80,25	80,45	80,6	81,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Investigasi Yang Akuntabel dan Berkualitas												
1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

LAMPIRAN II MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.13.01-Industri Halal dan UMKM Halal	01 - Presentasi Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal		4,46	5,19	6,23	6,69	7,00	persen	6.000	18.850	24.200	27.550	31.000	-	-	-	-	-	6.000	18.850	24.200	27.550	31.000
02.13.01.05-Penguatan Halal Value Chain									5.500	16.750	22.000	25.250	28.000	-	-	-	-	-	5.500	16.750	22.000	25.250	28.000
EC.6054.PBK.003 - Implementasi Industri Halal Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan		IKFT	-	5	5	5	5	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6699.PEH.002 - Indonesia Halal Industry		Setjen	1	1	1	1	1		1.000	4.750	5.000	5.250	6.000	-	-	-	-	-	1.000	4.750	5.000	5.250	6.000
EC.6699.QDI.001 - Fasilitas dan Pembinaan Industri		Setjen	1.000	5.000	7.000	8.000	10.000	Industri	4.500	10.000	15.000	18.000	20.000	-	-	-	-	-	4.500	10.000	15.000	18.000	20.000
02.13.01.06-Penguatan Promosi Industri Halal									500	2.100	2.200	2.300	3.000	-	-	-	-	-	500	2.100	2.200	2.300	3.000
EC.6699.PEH.001 - Promosi Industri Halal		Setjen	4	4	4	4	5	kegiatan	500	2.100	2.200	2.300	3.000	-	-	-	-	-	500	2.100	2.200	2.300	3.000
02.14.02-Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		87	103	119	139	156	perusahaan	19.897	58.150	62.150	67.150	71.150	-	-	-	-	-	19.897	58.150	62.150	67.150	71.150
02.14.02.01-Pengembangan Industri dan Perangkat Digital									12.650	39.100	43.100	48.100	52.100	-	-	-	-	-	12.650	39.100	43.100	48.100	52.100
EC.6058.QDI.001 - Pendampingan Implementasi Industri 4.0, Industri Hijau dan Industri		IKFT	15	30	30	30	30	Industri	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
EC.6058.QDI.002 - Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen		IKFT	10	30	30	30	30	Industri	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000
EC.6058.QDI.004 - Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor		IKFT	5	6	7	8	9	Industri	1.250	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	1.250	1.500	2.000	2.500	3.000
EC.6058.QDI.005 - Sertifikasi Industri 4.0 Sektor Industri Kimia,		IKFT	20	40	40	40	40	Industri	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6063.QDI.005 - Industri yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi		ILMATE	6	2	3	4	5	Industri	2.000	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	2.000	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6070.QDI.001 - Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri		ILMATE	4	4	4	4	4	Industri	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6071.PEF.076 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor		IKMA	-	6	6	6	6	orang	-	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
EC.6071.QDI.075 - Fasilitas Pemanfaatan Insentif dalam rangka Mendukung Akselerasi Implementasi Making Indonesia 4.0 pada		IKMA	-	30	30	30	30	Industri	-	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
EC.6071.QDI.076 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor		IKMA	-	6	6	6	6	Industri	-	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
EC.6077.QDI.003 - Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju		BSKJI	5	10	15	20	25	Industri	2.500	5.000	8.000	12.000	15.000	-	-	-	-	-	2.500	5.000	8.000	12.000	15.000
02.14.02.02-Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital									7.247	19.050	19.050	19.050	19.050	-	-	-	-	-	7.247	19.050	19.050	19.050	19.050
EC.6071.QDI.012 - IKM PFBB yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM /		IKMA	500	500	500	500	500	Industri	750	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	750	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6071.QDI.017 - IKM KSK yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM /		IKMA	350	503	503	503	503	Industri	525	1.600	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	-	525	1.600	1.600	1.600	1.600
EC.6071.QDI.023 - Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM		IKMA	814	1.000	1.000	1.000	1.000	Industri	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6071.QDI.028 - Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan Making		IKMA	107	163	163	163	163	Industri	4.752	7.250	7.250	7.250	7.250	-	-	-	-	-	4.752	7.250	7.250	7.250	7.250
EC.6071.QDI.042 - IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas		IKMA	-	3	3	3	3	Industri	-	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600
EC.6071.QDI.054 - IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan yang		IKMA	-	3	3	3	3	Industri	-	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600
EC.6071.QDI.063 - IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitas Implementasi 4.0		IKMA	-	5	5	5	5	Industri	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6071.QDI.064 - Penumbuhan dan Pengembangan IKM Startup		IKMA	-	20	20	20	20	Industri	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
02.15.01-Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau		152	164	176	188	200	persen	8.642	15.100	21.400	24.400	29.800	-	-	-	-	-	8.642	15.100	21.400	24.400	29.800

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri		11	12	13	14	15	persen						-	-	-	-	-					
02.15.01.01-Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur dalam Penerapan Ekonomi Sirkular									4.942	6.400	9.600	11.000	12.400	-	-	-	-	-	4.942	6.400	9.600	11.000	12.400
EC.6053.PBK.003 - Pemanfaatan Teknologi Recycling Plastik Daur Ulang		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	742	800	800	800	800	-	-	-	-	-	742	800	800	800	800
EC.6053.PBK.012 - Kajian Pemanfaatan Teknologi Material Recovery Daur Ulang Petumas Bekas		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	559	600	600	600	600	-	-	-	-	-	559	600	600	600	600
EC.6054.QDI.001 - Pendampingan Persiapan Penerapan Pedoman Tata Cara PET Daur Ulang Untuk Kemasan Pangan dan/atau		IKFT	5	10	10	10	10	Industri	941	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	941	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.019 - Industri Remanufaktur yang Terfasilitasi dalam rangka		ILMATE	-	-	2	3	3	Industri	-	-	2.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	3.000
EC.6078.PBK.003 - Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkuler di Sektor Industri		BSK/II	1	1	2	2	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6078.QDI.001 - Perusahaan Industri yang terfasilitasi Sertifikasi		BSK/II	5	7	9	10	11	Industri	1.700	2.000	2.200	2.600	3.000	-	-	-	-	-	1.700	2.000	2.200	2.600	3.000
02.15.01.02-Penerapan Industri									3.700	8.700	11.800	13.400	17.400	-	-	-	-	-	3.700	8.700	11.800	13.400	17.400
EC.6078.PBK.002 - Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor		BSK/II	1	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6078.PEB.001 - Festival Industri Hijau Nasional		BSK/II	2	2	3	3	4	forum	1.200	1.200	1.800	1.800	2.400	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.800	1.800	2.400
EC.6078.PPA.001 - Rancangan Standar Industri		BSK/II	3	4	5	6	7	NSPK	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
EC.6078.QDI.007 - Lembaga jasa Industri dan		BSK/II	3	15	20	25	35	Industri	1.000	5.000	7.000	8.100	11.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	7.000	8.100	11.000
02.19.04-Peningkatan upaya dekarbonisasi industri	01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi		6,75	6,79	6,85	6,90	6,93	juta ton CO2-Eq	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000	-	-	-	-	-	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000
02.19.04.02-Kebijakan dan capaian aksi mitigasi perubahan iklim di									2.750	13.000	15.000	15.000	16.000	-	-	-	-	-	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000
EC.6053.PBK.002 - Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Kaca Nasional		IKFT	-	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6053.PBK.005 - Fasilitasi Percepatan Substitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Alternatif		IKFT	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6053.PBK.007 - Rekomendasi Dekarbonisasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	750	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6078.PBK.005 - Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri untuk		BSK/II	1	1	2	2	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6078.PBK.007 - Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah		BSK/II	1	1	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	003 - Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri		52.50	55.12	57.87	60.76	63.79	persen	2.000	16.388	18.000	20.500	22.500	-	-	-	-	-	2.000	16.388	18.000	20.500	22.500
	004 - Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut		45	50	55	60	65	persen						-	-	-	-	-					
02.22.04.01-Pengembangan Garam Industri Terintegrasi									1.000	13.388	15.000	17.000	19.000	-	-	-	-	-	1.000	13.388	15.000	17.000	19.000
EC.6057.PBK.001 - Fasilitasi dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	5.000	6.000	7.000	8.000	-	-	-	-	-	-	5.000	6.000	7.000	8.000
EC.6057.QDI.005 - Verifikasi Penyaluran dan Distribusi Garam Industri ke		IKFT	-	100	100	100	100	Industri	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6057.QDI.006 - Pendampingan Industri Pengolahan Garam Dalam Negeri Dalam Pemenuhan Spesifikasi Industri Aneka		IKFT	7	7	7	7	7	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6060.QDI.002 - Pemenuhan Spesifikasi Garam Industri untuk Sektor		IKFT	-	7	7	7	7	Industri	-	2.388	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	2.388	3.000	4.000	5.000
02.22.04.03-Pengembangan Produk Olahan Laut dan Bioprospeksi Sumber Daya Kelautan									1.000	3.000	3.000	3.500	3.500	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.000	3.500	3.500

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6045.QDI.001 - Hilirisasi Industri Berbasis Perikanan		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6051.QDI.001 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor		IA	3	6	6	8	8	Industri	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
02.22.05-Penguatan Industri Transportasi Laut	001 - Volume Reparasi Kapal		11,2	11,4	11,8	12,0	12,2	Ribu DWT (kumulatif)	-	1.000	6.500	8.000	9.500	-	-	-	-	-	-	1.000	6.500	8.000	9.500
	002 - Volume Produksi Pembuatan Kapal		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	Ribu DWT (kumulatif)						-	-	-	-	-					
	003 - Nilai Ekspor Industri Perkapalan		858,02	939,41	966,55	1.171,68	1.315,25	Ribu USD						-	-	-	-	-					
02.22.05.01-Pengembangan Industri Galangan Kapal sebagai Industri Berteknologi Tinggi									-	1.000	6.500	8.000	9.500	-	-	-	-	-	-	1.000	6.500	8.000	9.500
EC.6062.PBK.009 - Kebijakan Penusunan Peta Jalan Nol Emisi Karbon Pada Industri Maritim		ILMATE	1	2	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	-	3.500	3.500	4.000	-	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500	4.000
EC.6062.QDI.008 - Industri maritim yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan		ILMATE	-	1	2	3	4	Industri	-	1.000	3.000	4.500	5.500	-	-	-	-	-	-	1.000	3.000	4.500	5.500
05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel		33,64	33,74	33,74	33,74	33,74	juta ton/tahun	2.917	4.000	11.000	14.000	17.000	-	-	-	-	-	2.917	4.000	11.000	14.000	17.000
05.01.01.01-Pengembangan Industri Stainless Steel									-	1.500	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1.500	3.000	4.000	5.000
EC.6062.QDI.033 - Industri Logam Dalam Negeri Yang Terfasilitasi Dalam		ILMATE	-	2	2	2	2	Industri	-	1.500	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1.500	3.000	4.000	5.000
05.01.01.02-Pengembangan Industri Nickel Sulfate, Katoda, dan Battery Precursor Berbasis Nikel									1.667	1.500	5.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.667	1.500	5.000	6.000	7.000
EC.6062.QDI.005 - Industri Pemurnian dan Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang		ILMATE	25	23	50	50	50	Industri	1.667	1.500	5.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.667	1.500	5.000	6.000	7.000
05.01.01.06-Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel									1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
EC.6062.PBK.019 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Nikel		ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.02-Pengembangan Hilirisasi Tembaga	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	ribu ton/tahun	1.000	5.000	7.000	9.000	10.500	-	-	-	-	-	1.000	5.000	7.000	9.000	10.500
05.01.02.01-Tata Kelola Industri Tembaga dan Ketersediaan Bahan									-	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1.000	3.000	4.000	5.000
EC.6062.PBK.020 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Tembaga		ILMATE	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.02.02-Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan									1.000	4.000	4.000	5.000	5.500	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	5.000	5.500
EC.6062.PBK.014 - Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis		ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	4.000	4.000	5.000	5.500	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	5.000	5.500
05.01.03-Pengembangan Hilirisasi Bauksit	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit		6,27	15,27	16,27	16,87	17,47	juta ton/tahun	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.03.01-Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Bauksit									1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
EC.6062.PBK.021 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Bauksit		ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.04-Pengembangan Hilirisasi Timah	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah		142,1	247,3	257,3	257,3	257,3	ribu ton/tahun	-	-	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	4.000	5.000
05.01.04.01-Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku									-	-	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	4.000	5.000
EC.6062.PBK.027 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Timah		ILMATE	-	-	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	-	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	4.000	5.000
05.01.05-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	02 - Ragam Produk Hilir Sawit		208	223	233	243	250	Rekomendasi produk	3.506	15.500	15.500	15.500	15.500	-	-	-	-	-	3.506	15.500	15.500	15.500	15.500
	04 - Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku		92,3	92,5	92,9	93,3	93,7	persen						-	-	-	-	-					
05.01.05.01-Peningkatan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit dan Kualitas Bahan Baku									750	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	750	7.500	7.500	7.500	7.500
EC.6047.PBK.002 - Standar Kualitas dan Spesifikasi Teknis atas Bahan Baku dan/atau Komoditas		IA	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	750	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6047.QBH.004 - Pengawasan dan Pengendalian di Sektor		IA	-	20	20	20	20	Badan usaha	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
EC.6051.QDI.004 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor		IA	-	10	10	10	10	Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.05.02-Sustainability dan Traceability									756	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	756	2.000	2.000	2.000	2.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengamp u RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6047.QDB.001 - Fasilitas Serifikasi Keterelusuran Keberlanjutan Produk Hilir Kelapa Sawit dan Rantai		IA	1	1	1	1	1	Lembaga	756	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	756	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.05.04-Pengembangan Industri Oleokimia									2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6045.QDI.006 - Fasilitas Prototyping Produk Betacarotene dan		IA	1	1	1	1	1	Industri	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6049.QDI.001 - Pengembangan Industri Bahan Bakar Terbarukan Generasi Kedua (HVO)/SAF - Hydrogenated Vegetable Oil/ Sustainable Aviation		IA	1	1	1	1	1	Industri	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.05.05-Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri									-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6047.PBK.001 - Pembinaan Industri Hijau dan Penurunan NZE di Sektor Industri Kemurgi,		IA	-	2	2	2	2	Rekomenda si Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa	04 - Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa		55	60	65	70	75	persen	1.000	9.300	9.300	9.800	9.800	-	-	-	-	-	1.000	9.300	9.300	9.800	9.800
05.01.06.03-Peningkatan Produktivitas Kelapa									1.000	4.500	4.500	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	4.500	4.500	5.000	5.000
EC.6045.QDH.006 - Peningkatan Nilai Tambah		IA	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.QDI.003 - Pengembangan Industri		IA	1	1	1	1	1	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6046.PBK.005 - Peningkatan Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa		IA	-	1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan	-	1.500	1.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.000	2.000
05.01.06.05-Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa									-	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
EC.6071.QDI.009 - Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa		IKMA	-	4	4	4	4	Kelompok Masyarakat	-	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
05.01.06.07-Integrasi Rantai Pasok di Dalam Negeri dan Ekspor									-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.PBK.009 - Fasilitas Pusat Penyedia Bahan Baku Industri Temuwarung Kelapa		IA	-	1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	03 - Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut		53,76	58,01	62,26	66,51	70,76	persen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.07.02-Pengembangan Industri dan Hilirisasi Rumput Laut									-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6045.QDI.002 - Hilirisasi Industri Berbasis Rumput		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	02 - Kapasitas Produksi Pati Sagu		100.000	150.000	210.000	260.000	320.000	ton/tahun	-	5.975	5.975	6.475	6.975	-	-	-	-	-	-	5.975	5.975	6.475	6.975
05.01.08.02-Pengembangan Industri Hilir Sagu dan Singkong									-	5.975	5.975	6.475	6.975	-	-	-	-	-	-	5.975	5.975	6.475	6.975
EC.6045.QDI.004 - Pengembangan Industri		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.500	2.000
EC.6071.QDI.045 - IKM Pangan yang Mendapatkan Fasilitas dalam rangka		IKMA	-	50	50	50	50	Industri	-	4.975	4.975	4.975	4.975	-	-	-	-	-	-	4.975	4.975	4.975	4.975
05.01.09-Pengembangan Industri Kimia	01 - Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara		60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38	Ribu ton	17.768	134.300	139.450	147.100	151.900	-	-	-	-	-	17.768	134.300	139.450	147.100	151.900
	02 - Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		6,08	6,51	6,96	7,31	7,34	Persen						-	-	-	-	-					
05.01.09.01-Mega Proyek Industri Kimia Dasar									2.500	15.000	17.000	19.000	20.000	-	-	-	-	-	2.500	15.000	17.000	19.000	20.000
EC.6057.PBK.006 - Penyusunan Peta Jalan dalam Rangka Hilirisasi Industri Kimia Hulu		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan	-	5.000	6.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	5.000	6.000	7.000	7.000
EC.6057.PEA.001 - Fasilitas Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri		IKFT	1	1	1	1	1	kegiatan	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
EC.6057.PEA.002 - Fasilitas Investor Dalam Rangka Pembangunan Industri Petrokimia Berbasis		IKFT	1	1	1	1	1	kegiatan	500	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	500	1.500	2.000	2.500	3.000
EC.6057.PEA.003 - Fasilitas Investor Dalam Rangka Pembangunan		IKFT	1	1	1	1	1	kegiatan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6060.PBK.003 - Fasilitas Pembangunan pabrik Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi dan Gas		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6060.PBK.004 - Pembangunan pabrik Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.01.09.02-Revitalisasi Industri Pupuk untuk Mendukung									-	5.000	6.000	6.500	7.500	-	-	-	-	-	-	5.000	6.000	6.500	7.500
EC.6057.PBK.005 - Fasilitas dalam rangka Percepatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	3.000	3.500	4.000	4.500	-	-	-	-	-	-	3.000	3.500	4.000	4.500
EC.6060.QDI.005 - Revitalisasi Industri Pupuk dan Hilirisasi gas bumi untuk pembangunan pabrik pupuk untuk mendukung		IKFT	-	1	1	1	1		-	2.000	2.500	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.500	2.500	3.000
05.01.09.04-Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri									1.250	2.850	2.950	3.550	3.650	-	-	-	-	-	1.250	2.850	2.950	3.550	3.650
EC.6053.PBK.013 - Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Industri Kimia Hulu		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	1.500	1.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.000	2.000
EC.6057.PBK.012 - Fasilitas Investor dalam Rangka Pembangunan Industri White Bio Plastik di		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	500	550	600	650	700
EC.6057.PBK.014 - Rekomendasi Kebijakan Pemernfaatan Hidrogen Hijau serta Ammonia Hijau		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	750	800	850	900	950	-	-	-	-	-	750	800	850	900	950
05.01.09.05-Tata Kelola Kebijakan Pengembangan Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam									3.341	23.000	23.600	24.450	25.550	-	-	-	-	-	3.341	23.000	23.600	24.450	25.550
EC.6053.PBK.011 - Penyusunan Rencana Aksi Manajemen Pengelolaan Produk Karet Hilir dan End-		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6054.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	900	950	1.000	1.050	1.100	-	-	-	-	-	900	950	1.000	1.050	1.100
EC.6054.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Sektor		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	500	550	600	650	700
EC.6054.PBK.005 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Sektor Industri Semen,		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6054.PBK.006 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Sektor Industri Semen, Keramik		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6057.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	3.000	3.500	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.500	4.000	4.000
EC.6057.PBK.015 - Rekomendasi Kebijakan Dampak Sosio-Ekonomi Daftar Pestisida dalam Annex III Prior Informed		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	750	1.000	1.000	1.250	1.250	-	-	-	-	-	750	1.000	1.000	1.250	1.250
EC.6057.PBK.018 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Semen, Keramik		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PBK.022 - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Semen, Keramik, dan		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6058.QDI.007 - Pendampingan Pemenuhan Standar Halal Bagi Produk		IKFT	-	2	2	3	3	Industri	-	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6059.PBK.001 - Neraca Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6059.PBK.006 - Kajian Dampak Pemberlakuan Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ZODOL) terhadap Struktur Biaya dan Harga Produk		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	3.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	3.000	2.000	2.000	2.000
05.01.09.06-Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam									9.177	67.450	68.900	72.600	74.200	-	-	-	-	-	9.177	67.450	68.900	72.600	74.200
EC.6054.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Mengenai Pembatasan Kadungan Timbal (Pb)		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	559	600	600	600	600	-	-	-	-	-	559	600	600	600	600

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6054.QIH.002 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang		IKFT	-	1	1	1	1	Badan usaha	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6054.QIH.003 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang		IKFT	-	1	1	1	1	Badan usaha	-	500	600	700	700	-	-	-	-	-	-	500	600	700	700
EC.6054.QIH.004 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor		IKFT	-	20	20	20	20	Badan usaha	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6055.PBK.002 - Fasilitas dalam Rangka Penerapan dan Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6055.PBK.003 - Fasilitas dalam Rangka Penerapan dan Peningkatan Nilai Tingkat Komponen		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.500	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.500	3.000	3.000
EC.6055.QDI.002 - Pendampingan Produk Prioritas Dalam Mendukung		IKFT	1	5	5	5	5	Industri	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6055.QDI.005 - Pendampingan Produk Dengan Nilai TKDN Tinggi Untuk Pengadaan Barang		IKFT	-	10	10	10	10	Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6056.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kerjasama dan		IKFT	2	2	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	703	750	-	-	-	-	-	-	-	-	703	750	-	-	-
EC.6056.PBK.003 - Optimalisasi Pemanfaatan Skema Kerjasama Bilateral - Multilateral (regional maupun internasional) dalam rangka Mendorong		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.500	1.500
EC.6057.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	-	-	-	-	-	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
EC.6057.PBK.007 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Anorganik (soda ash, lithium hidroksida, lithium		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PBK.008 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PBK.011 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PBK.013 - Penyusunan Kerangka Insentif Dalam Rangka Pengembangan Industri		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	703	750	750	750	750	-	-	-	-	-	703	750	750	750	750
EC.6057.PBK.017 - Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Semen,		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6057.PBK.019 - Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia Hulu		IKFT	-	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	4.000	5.000
EC.6057.PBK.020 - Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal terhadap Kinerja Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PEA.004 - Fasilitas Percepatan Pembangunan Industri		IKFT	-	1	1	1	1	kegiatan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6057.PEA.005 - Fasilitas Percepatan Pembangunan Industri		IKFT	-	1	1	1	1	kegiatan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6057.PEA.006 - Fasilitas Penyediaan Pasokan Bioetanol untuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam Rangka		IKFT	-	1	1	1	1	kegiatan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6059.PBK.005 - Penyusunan Peta Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi untuk		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	700	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	700	1.500	1.500	1.500	1.500

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6059.PBK.008 - Penguatan Rantai Pasok Industri Dalam Negeri Sektor Industri Kimia,		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6060.PBK.002 - Hilirisasi Industri Bahan Galian Nonlogam		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	750	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6060.PBK.006 - Hilirisasi Silika Menjadi Wafer Silikon Dalam Rangka Kemandirian Industri Photovoltaic (PV)		IKFT	1	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
EC.6060.PBK.007 - Hilirisasi Graft untuk mendukung Ekosistem Industri Electric Vehicle (EV)		IKFT	1	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6060.PBK.009 - Penyediaan Bahan Baku Industri dan Energi		IKFT	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	4.000	4.000
EC.6060.PBK.010 - Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri Kimia Hulu dan Akselerasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.250	1.500	1.750	-	-	-	-	-	-	1.000	1.250	1.500	1.750
EC.6081.QMA.002 - Integrasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Industri		IKFT	1	1	1	1	1	layanan	762	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	762	2.500	2.500	2.500	2.500
EC.6082.QDB.001 - Fasilitas Kelembagaan Otoritas Nasional Senjata		IKFT	1	1	1	1	1	Lembaga	500	600	700	800	900	-	-	-	-	-	500	600	700	800	900
05.01.09.07-Pengembangan Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian									1.500	21.000	21.000	21.000	21.000	-	-	-	-	-	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
EC.6053.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Industri		IKFT	1	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6053.PBK.008 - Analisis Sustainability Industri Asbestos Berbasis Chrysotile		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6057.PBK.021 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
EC.6059.PBK.003 - Penyusunan Kebijakan Peningkatan Efisiensi Alur Aliran Material dan Barang Sektor Industri Semen,		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6060.PBK.008 - Optimalisasi Penggunaan Aspal Buton sebagai Upaya Suasembada Aspal		IKFT	-	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
05.01.10-Pembangunan Industri Semikonduktor	01 - Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik		7,50	9,09	10,76	10,85	11,42	Persen	11.000	46.500	51.000	54.500	58.000	-	-	-	-	-	11.000	46.500	51.000	54.500	58.000
05.01.10.01-Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor									11.000	16.500	21.000	24.500	28.000	-	-	-	-	-	11.000	16.500	21.000	24.500	28.000
EC.6062.PBK.018 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Struktur Bahan Baku		ILMATE	1	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6062.QDI.001 - Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan		ILMATE	2	1	2	3	4	Industri	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6062.QDI.007 - Industri Telekomunikasi dan Informasi yang Terfasilitasi		ILMATE	-	2	2	2	2	Industri	-	2.000	3.500	4.500	5.500	-	-	-	-	-	-	2.000	3.500	4.500	5.500
EC.6062.QDI.009 - Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan		ILMATE	25	28	30	32	34	Industri	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500	-	-	-	-	-	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
EC.6062.QDI.015 - Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman		ILMATE	4	2	3	4	5	Industri	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	-	-	-	-	-	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
EC.6062.QDI.034 - Industri Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Sektor		ILMATE	-	-	1	2	3	Industri	-	-	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000
EC.6063.QDI.006 - Industri yang Terfasilitasi melalui Engineering Center TIK		ILMATE	1	1	1	1	1	Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.10.03-Riset dan Pengembangan Semikonduktor									-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
EC.6063.QDI.007 - Industri Terfasilitasi Melalui		ILMATE	1	1	-	-	-	Industri	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.01.11-Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi	01 - Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional		11,48	11,48	11,91	11,78	11,86	Persen	3.726	8.230	8.230	8.230	8.230	-	-	-	-	-	3.726	8.230	8.230	8.230	8.230
05.01.11.01-Penguatan Industri Bahan Baku Kosmetik dan Farmasi									3.726	6.730	6.730	6.730	6.730	-	-	-	-	-	3.726	6.730	6.730	6.730	6.730
EC.6053.PBK.009 - Pemetaan Kemampuan Industri dan Hilirisasi Bahan Baku Komoditas		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	751	800	800	800	800	-	-	-	-	-	751	800	800	800	800
EC.6053.PBK.010 - Peningkatan Hilirisasi Produksi dan Promosi Obat Bahan Alam		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	751	1.300	1.300	1.300	1.300	-	-	-	-	-	751	1.300	1.300	1.300	1.300
EC.6055.PBK.001 - Verifikasi Kemampuan Industri Kosmetik Dalam Rangka Pemetaan,		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	800	900	900	900	900	-	-	-	-	-	800	900	900	900	900
EC.6071.QDD.002 - Sentra dan UPT IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan		IKMA	3	5	5	5	5	Kelompok Masyarakat	1.425	3.730	3.730	3.730	3.730	-	-	-	-	-	1.425	3.730	3.730	3.730	3.730
05.01.11.06-Branding Kosmetik Halal untuk Perluasan Pasar									-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6071.QDI.053 - Industri Kecil dan Menengah yang Mengikuti Program		IKMA	-	30	30	30	30	Industri	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.12-Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat		1,00	1,1	1,2	1,3	1,4	Persen	6.642	16.800	34.000	43.000	50.000	-	-	-	-	-	6.642	16.800	34.000	43.000	50.000
05.01.12.01-Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri									1.000	7.000	8.000	9.500	10.500	-	-	-	-	-	1.000	7.000	8.000	9.500	10.500
EC.6067.PBK.001 - Evaluasi Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Sektor		ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	3.000	4.000	5.500	6.500	-	-	-	-	-	1.000	3.000	4.000	5.500	6.500
EC.6071.QDI.062 - IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitas dalam rangka		IKMA	-	10	10	10	10	Industri	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.12.03-Pengembangan Ekosistem Industri EV									5.642	9.800	26.000	33.500	39.500	-	-	-	-	-	5.642	9.800	26.000	33.500	39.500
EC.6062.PBK.007 - Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan dan Program Industri Prioritas Sektor Industri Martini, Alat		ILMATE	-	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	2.000	3.000	4.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000
EC.6062.PBK.008 - Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor		ILMATE	2	2	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500	3.500	3.500	4.000	-	-	-	-	-	-	2.500	3.500	3.500	4.000
EC.6062.QDI.012 - Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka		ILMATE	1	1	5	6	7	Industri	1.500	2.000	5.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.500	2.000	5.000	6.000	7.000
EC.6062.QDI.017 - Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan Struktur Industri		ILMATE	4	2	3	4	5	Industri	1.642	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	1.642	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6070.QDI.002 - Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri		ILMATE	2	2	10	10	15	Industri	1.000	1.000	3.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	3.000	5.000	5.000
EC.6966.PBK.001 - Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis		ILMATE	1	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	800	3.000	3.000	4.000	-	-	-	-	-	-	800	3.000	3.000	4.000
EC.6966.QDI.001 - Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan		ILMATE	3	1	3	4	5	Industri	1.500	1.500	4.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.500	1.500	4.000	6.000	7.000
EC.6966.QDI.002 - Fasilitas Penguatan Sistem Rantai Pasok Industri KBLBB Indonesia yang bergabung		ILMATE	-	1	2	3	4	Industri	-	-	4.000	5.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	5.000	6.000
05.01.13-Pengembangan Industri Dirgantara	01 - Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya		60	63,25	65,78	69,5	70	Persen	2.900	12.500	29.000	37.500	52.000	-	-	-	-	-	2.900	12.500	29.000	37.500	52.000
05.01.13.01-Penguatan Industri Pesawat Terbang, Komponen, dan Rantai Pasok Kedirgantaraan									1.500	4.500	10.000	12.500	17.000	-	-	-	-	-	1.500	4.500	10.000	12.500	17.000
EC.6062.QDI.003 - Industri Drone yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan		ILMATE	1	1	1	1	1	Industri	-	1.000	2.500	3.000	4.500	-	-	-	-	-	-	1.000	2.500	3.000	4.500
EC.6062.QDI.004 - Industri MRO Pesawat yang terfasilitasi dalam rangka		ILMATE	-	1	2	3	4	Industri	-	2.500	3.500	4.500	5.500	-	-	-	-	-	-	2.500	3.500	4.500	5.500
EC.6062.QDI.010 - Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka		ILMATE	1	1	3	4	5	Industri	1.500	1.000	4.000	5.000	7.000	-	-	-	-	-	1.500	1.000	4.000	5.000	7.000
05.01.13.03-Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kedirgantaraan									1.400	8.000	19.000	25.000	35.000	-	-	-	-	-	1.400	8.000	19.000	25.000	35.000
EC.6068.QDI.005 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor		ILMATE	2	2	3	4	5	Industri	1.400	4.000	4.500	5.000	7.500	-	-	-	-	-	1.400	4.000	4.500	5.000	7.500

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6068.QDI.006 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi sektor Maritim,		ILMATE	-	-	3	4	5	Industri	-	-	10.000	15.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	15.000	20.000
EC.6068.QDI.008 - Industri yang terfasilitasi Dalam Rangka Kerjasama Industri Internasional Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi		ILMATE	2	2	3	4	5	Industri	-	4.000	4.500	5.000	7.500	-	-	-	-	-	-	4.000	4.500	5.000	7.500
05.01.14-Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	01 - Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan		4,00	5,50	6,50	7,50	8,70	Persen	17.678	23.583	60.350	74.350	86.350	-	-	-	-	-	17.678	23.583	60.350	74.350	86.350
05.01.14.01-Pengembangan									1.000	1.500	5.500	6.500	6.500	-	-	-	-	-	1.000	1.500	5.500	6.500	6.500
EC.6062.PBK.026 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri		ILMATE	-	-	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.018 - Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan		ILMATE	2	2	4	6	8	Industri	1.000	1.500	3.500	4.500	4.500	-	-	-	-	-	1.000	1.500	3.500	4.500	4.500
05.01.14.02-Pengembangan Industri Alat Kesehatan									2.701	1.500	3.500	5.000	5.500	-	-	-	-	-	2.701	1.500	3.500	5.000	5.500
EC.6062.PBK.025 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan sebagai		ILMATE	-	-	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.024 - Industri Alat Kesehatan yang Terfasilitasi dalam rangka Pemenuhan dan		ILMATE	2	2	3	4	5	Industri	2.701	1.500	2.500	3.000	3.500	-	-	-	-	-	2.701	1.500	2.500	3.000	3.500
EC.6063.QDI.002 - Pengembangan Center Of Excellence Industri Alat		ILMATE	-	-	-	-	-	Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.14.03-Pengembangan Industri Alat Pertanian									1.500	1.500	4.500	5.000	5.500	-	-	-	-	-	1.500	1.500	4.500	5.000	5.500
EC.6062.PBK.024 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Mesin Pertanian yang		ILMATE	-	-	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.025 - Industri Alat Mesin Pertanian yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan Mekanisasi		ILMATE	3	2	3	4	5	Industri	1.500	1.500	2.500	3.000	3.500	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.500	3.000	3.500
05.01.14.04-Pengembangan Industri Alat Berat dan Mesin									4.028	7.350	24.350	28.350	32.350	-	-	-	-	-	4.028	7.350	24.350	28.350	32.350
EC.6062.PBK.012 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Industri Permesinan dalam rangka mendukung		ILMATE	-	-	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.011 - Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka		ILMATE	1	1	2	3	4	Industri	1.038	1.500	5.000	5.500	7.000	-	-	-	-	-	1.038	1.500	5.000	5.500	7.000
EC.6062.QDI.013 - Industri Komponen Alat Pertahanan yang Terfasilitasi dalam		ILMATE	-	1	2	3	4	Industri	-	500	5.500	5.500	6.500	-	-	-	-	-	-	500	5.500	5.500	6.500
EC.6062.QDI.016 - Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri		ILMATE	-	-	2	3	4	Industri	-	-	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.500	3.000
EC.6062.QDI.026 - Industri Alat Berat yang Terfasilitasi dalam rangka Pengembangan Hilirisasi		ILMATE	3	2	6	8	10	Industri	1.500	1.500	4.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	1.500	1.500	4.000	6.000	6.000
EC.6062.QDI.027 - Industri Mesin Perkakas yang Terfasilitasi dalam menunjang Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja hasil		ILMATE	-	-	2	4	6	Industri	-	-	2.000	3.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	4.000
EC.6071.QDD.003 - Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronik, dan Alat		IKMA	3	8	8	8	8	Kelompok Masyarakat	1.490	3.850	3.850	3.850	3.850	-	-	-	-	-	1.490	3.850	3.850	3.850	3.850
05.01.14.05-Adopsi Teknologi, Smart Manufacturing, dan Pemanfaatan Riset/Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan									8.450	11.733	22.500	29.500	36.500	-	-	-	-	-	8.450	11.733	22.500	29.500	36.500
EC.6062.QDI.022 - Industri yang Terserifikasi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Supply Demand Sektor Industri Permesinan dalam rangka Mendukung		ILMATE	40	40	60	80	80	Industri	2.000	2.233	3.500	4.000	4.500	-	-	-	-	-	2.000	2.233	3.500	4.000	4.500
EC.6062.QDI.028 - Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi melalui pengawasan dan		ILMATE	-	-	20	40	60	Industri	-	-	1.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000
EC.6063.QDI.004 - Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (One		ILMATE	5	3	10	15	20	Industri	1.000	3.000	7.500	12.500	15.000	-	-	-	-	-	1.000	3.000	7.500	12.500	15.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengamp u RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6070.QDI.003 - Industri Sektor Permesian dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri		ILMATE	1	1	10	10	15	Industri	1.000	1.500	5.000	5.000	7.500	-	-	-	-	-	1.000	1.500	5.000	5.000	7.500
EC.6077.QDI.001 - Perusahaan Industri yang		BSKJI	32	35	40	45	50	Industri	4.450	5.000	5.500	6.000	6.500	-	-	-	-	-	4.450	5.000	5.500	6.000	6.500
05.01.15-Peningkatan Industri Makanan dan Minuman	01 - Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman		5,43	6,00	7,30	7,70	8,00	Persen	37.051	146.050	157.000	164.900	173.380	-	-	-	-	-	37.051	146.050	157.000	164.900	173.380
05.01.15.01-Penguatan Rantai Pasok IKM dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku /Penolong di Industri		IA	5	5	5	5	5	Rekomenda si Kebijakan	4.000	20.825	21.025	21.225	21.425	-	-	-	-	-	4.000	20.825	21.025	21.225	21.425
EC.6044.PBK.001 - Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan		IA	5	5	5	5	5	Rekomenda si Kebijakan	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6044.PBK.004 - Analisis kebutuhan bahan baku industri di industri minuman, hasil tembakau		IA	-	5	5	5	5	Rekomenda si Kebijakan	-	6.000	6.200	6.400	6.600	-	-	-	-	-	-	6.000	6.200	6.400	6.600
EC.6044.PBK.010 - Neraca Komoditas Sektor Industri Kimurgi, Oleokimia dan Pakan		IA	1	1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6044.PBK.011 - Pengembangan Rantai Pasok Pakan Ternak Untuk Peningkatan Suplai Bahan		IA	-	1	1	1	1	Rekomenda si Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6071.QDI.043 - IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang		IKMA	-	5	5	5	5	Industri	-	625	625	625	625	-	-	-	-	-	-	625	625	625	625
EC.6071.QDI.044 - IKM Pangan Intermediate yang Mendapatkan Pendampingan /Fasilitasi		IKMA	-	30	30	30	30	Industri	-	4.200	4.200	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
05.01.15.02-Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Makanan dan Minuman									1.000	4.000	4.160	4.300	4.460	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.160	4.300	4.460
EC.6047.QDH.002 - Perencanaan dan Pembinaan Standar di sektor industri minuman,		IA	-	20	21	22	23	Badan usaha	-	3.000	3.160	3.300	3.460	-	-	-	-	-	-	3.000	3.160	3.300	3.460
EC.6047.QBH.003 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan Di Bidang		IA	15	20	20	20	20	Badan usaha	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.15.03-Peningkatan Adopsi Teknologi dan Pemanfaatan Riset /Inovasi Industri Makanan dan									23.600	66.000	71.100	76.200	81.300	-	-	-	-	-	23.600	66.000	71.100	76.200	81.300
EC.6046.QDH.001 - Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Industri		IA	10	25	25	25	25	Badan usaha	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EC.6046.QDH.002 - Restrukturisasi Mesin dan / atau Peralatan Industri		IA	9	15	20	25	30	Badan usaha	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	-	-	-	-	-	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
EC.6046.QDH.004 - Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Pakan		IA	-	20	20	20	20	Badan usaha	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
EC.6046.QDI.002 - Pengembangan Industri Pangan Fungsional		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6046.QDI.003 - Pengembangan Industri Pangan Fungsional		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6051.QDI.002 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil		IA	9	10	11	12	13	Industri	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	-	-	-	-	-	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
EC.6051.QDI.003 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor		IA	9	10	10	10	10	Industri	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.15.04-Penerapan Ekonomi Sirkular dan Industri Hijau di Industri Makanan dan Minuman									-	3.500	4.100	4.200	4.300	-	-	-	-	-	-	3.500	4.100	4.200	4.300
EC.6045.QDI.007 - Penguatan Ekosistem Industri Makanan		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.500	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.000	2.000
EC.6047.QDH.001 - Pembinaan Industri Hijau dan Implementasi Ekonomi Sirkular di Sektor Industri		IA	-	20	21	22	23	Badan usaha	-	2.000	2.100	2.200	2.300	-	-	-	-	-	-	2.000	2.100	2.200	2.300
05.01.15.05-Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk									8.451	51.725	56.615	58.975	61.895	-	-	-	-	-	8.451	51.725	56.615	58.975	61.895
EC.6045.QDH.001 - Hilirisasi Industri		IA	20	30	40	45	50	Badan usaha	3.000	4.500	6.000	6.500	7.500	-	-	-	-	-	3.000	4.500	6.000	6.500	7.500
EC.6045.QDH.002 - Penguatan Struktur dan Peningkatan Daya Saing		IA	-	15	15	15	15	Badan usaha	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6045.QDH.003 - Pengembangan dan Penguatan Struktur Industri		IA	-	10	10	10	10	Badan usaha	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6045.QDH.004 - Hilirisasi produk Berbasis		IA	-	10	10	10	10	Badan usaha	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6045.QDH.005 - Peningkatan Daya Saing		IA	-	10	10	10	10	Badan usaha	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.QDI.005 - Pengembangan Industri Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal Dalam Rangka		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.SDA.001 - Diversifikasi produk industri minuman, hasil tembakau		IA	-	20	22	24	26	produk	-	3.000	3.160	3.300	3.460	-	-	-	-	-	-	3.000	3.160	3.300	3.460
EC.6046.PBK.002 - Pengembangan Inovasi Produk Hilir Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6046.QDI.001 - Fasilitasi Pengembangan Industri Food Ingredients		IA	1	1	1	1	1	Industri	900	1.000	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	900	1.000	1.000	1.500	2.000
EC.6047.QIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan Di Bidang		IA	20	30	32	33	35	Badan usaha	1.000	1.500	1.580	1.650	1.750	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.580	1.650	1.750
EC.6049.PBK.001 - Penyusunan posisi runding dan optimalisasi kejasama industri minuman, hasil		IA	-	-	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	-	2.100	2.200	2.300	-	-	-	-	-	-	-	2.100	2.200	2.300
EC.6049.PEH.002 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Minuman,		IA	2	20	21	22	23	promosi	2.000	20.000	21.000	22.000	23.000	-	-	-	-	-	2.000	20.000	21.000	22.000	23.000
EC.6050.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan dan peraturan terkait peningkatan daya saing		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.050	1.100	1.160	-	-	-	-	-	-	1.000	1.050	1.100	1.160
EC.6071.QDD.001 - Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan		IKMA	4	3	3	3	3	Kelompok Masyarakat	1.551	1.425	1.425	1.425	1.425	-	-	-	-	-	1.551	1.425	1.425	1.425	1.425
EC.6071.QDI.041 - Peningkatan Kemampuan IKM Pangan berbasis Inovasi melalui Program IFI		IKMA	-	20	20	20	20	Industri	-	2.300	2.300	2.300	2.300	-	-	-	-	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	01 - Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi		3,50	5,48	5,56	5,85	6,32	Persen	80.038	242.011	229.911	230.946	232.136	-	-	-	-	-	80.038	242.011	229.911	230.946	232.136
	02 - Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT		60,34	64,59	69,61	74,67	79,76	Persen						-	-	-	-	-					
	03 - Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT		3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465	Orang						-	-	-	-	-					
05.01.16.01-Penguatan Rantai									2.200	22.500	23.400	24.435	25.625	-	-	-	-	-	2.200	22.500	23.400	24.435	25.625
EC.6057.PBK.003 - Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Tekstil, Kulit		IKFT	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6059.PBK.007 - Penyusunan Data Supply-Demand Sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		IKFT	3	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6059.PBK.009 - Penyusunan Peta Kemampuan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
EC.6060.PBK.012 - Hilirisasi Sustainable Textile Material Berbasis Rayon dan Polyester		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
EC.6072.QIH.001 - Pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan sektor industri (KBLI) terkait		KPAII	20	30	40	50	60	Badan usaha	700	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	700	6.000	6.900	7.935	9.125
05.01.16.04-Adopsi Teknologi 4.0 dan Teknologi Rendah Emisi									18.300	160.000	160.000	160.000	160.000	-	-	-	-	-	18.300	160.000	160.000	160.000	160.000
EC.6053.QDI.001 - Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil,		IKFT	21	100	100	100	100	Industri	16.800	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	16.800	150.000	150.000	150.000	150.000
EC.6058.QDI.003 - Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil		IKFT	15	100	100	100	100	Industri	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.16.06-Peningkatan Akses terhadap Lembaga Pembiayaan									-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6071.QDI.080 - IKM yang Mendapatkan Peningkatan Akses		IKMA	-	20	20	20	20	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.16.07-Pengembangan Sustainable Textile dan Tekstil									52.538	39.665	26.665	26.665	26.665	-	-	-	-	-	52.538	39.665	26.665	26.665	26.665

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6057.PBK.010 - Pilot Project Inovasi Daur Ulang Pengolahan Pakan Bekas Dalam Rangka Circular		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
EC.6057.QDI.002 - Implementasi Sustainability dan Circular Economy pada Industri Tekstil, Kulit dan		IKFT	4	8	8	8	8		1.000	10.765	10.765	10.765	10.765	-	-	-	-	-	1.000	10.765	10.765	10.765	10.765
EC.6071.QDI.051 - Industri Kecil dan menengah Tekstil dan Produk Tekstil Budaya lokal yang Mendapatkan		IKMA	-	150	150	150	150	Industri	-	900	900	900	900	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900
EC.6071.RBL.002 - Prasarana Pembangunan Gedung Bali Creative		IKMA	1	1	-	-	-	unit	51.538	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51.538	13.000	-	-	-
05.01.16.08-Penguatan Branding Produk Tekstil dan Peningkatan									7.000	18.846	18.846	18.846	18.846	-	-	-	-	-	7.000	18.846	18.846	18.846	18.846
EC.6054.QBH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang		IKFT	-	1	1	1	1	Badan usaha	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500
EC.6055.PBK.006 - Rekomendasi kebijakan dalam rangka Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6055.PBK.007 - Rekomendasi kebijakan dalam rangka Penyiapan Industri Halal sektor Tekstil		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6057.PBK.016 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri		IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6057.QDI.008 - Peningkatan Ketertelusuran dan Keterkaitan dalam		IKFT	-	2	4	6	8		-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6071.QDI.036 - Pemberdayaan Industri		IKMA	170	260	260	260	260	Industri	6.000	8.346	8.346	8.346	8.346	-	-	-	-	-	6.000	8.346	8.346	8.346	8.346
05.01.17-Pengembangan Industri Alas Kaki	01 - Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki		3,80	4,00	6,00	6,10	6,20	Persen	44.104	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	44.104	7.500	7.500	7.500	7.500
05.01.17.04-Fasilitasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri									44.104	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	44.104	7.500	7.500	7.500	7.500
EC.6054.PBK.007 - Penyusunan Program Nasional Penunasan Standar (PNPS) SNI dan		IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6071.QDI.038 - Penguatan Ekosistem IKM Alas Kaki Melalui Penumbuhan Wirausaha Industri, Penguatan		IKMA	100	60	60	60	60		2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	-	-	-	-	-	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
EC.6071.QDI.039 - Pengembangan Produk, Pendampingan IKM, Peningkatan Kreativitas,		IKMA	150	150	150	150	150	Industri	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	-	-	-	-	-	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
EC.6071.QDI.091 - IKM yang Mengikuti Program Inkubator Alas Kaki dan		IKMA	-	10	10	10	10	Industri	-	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800
EC.6071.RBL.001 - Prasarana Pembangunan Gedung Balai Pengembangan Industri		IKMA	1	-	-	-	-	unit	37.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.604	-	-	-	-
05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	01 - Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar		11,49	13,58	14,54	14,72	14,90	Persen	5.182	8.000	17.000	21.500	26.500	-	-	-	-	-	5.182	8.000	17.000	21.500	26.500
	02 - Utilisasi Industri Logam Dasar		77	79	81	83	85	Persen						-	-	-	-	-					
05.01.18.01-Ketersediaan Bahan Baku Industri Logam Dasar yang Berkualitas dan Kompetitif									1.000	1.000	3.500	4.500	5.500	-	-	-	-	-	1.000	1.000	3.500	4.500	5.500
EC.6062.QDI.014 - Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan		ILMATE	5	5	5	5	5	Industri	1.000	1.000	3.500	4.500	5.500	-	-	-	-	-	1.000	1.000	3.500	4.500	5.500
05.01.18.02-Kepastian Pasokan dan Harga Energi untuk Industri									1.182	2.500	5.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.182	2.500	5.000	6.000	7.000
EC.6062.PBK.015 - Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk		ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.182	2.500	5.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.182	2.500	5.000	6.000	7.000
05.01.18.03-Peningkatan Utilisasi Kapasitas Terpasang Industri Besi-									1.000	1.500	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	1.500	3.000	4.000	5.000
EC.6062.QDI.002 - Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan		ILMATE	1	1	1	1	1	Industri	1.000	1.500	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	1.500	3.000	4.000	5.000
05.01.18.04-Pengembangan Industri Special Steel									2.000	3.000	5.500	7.000	9.000	-	-	-	-	-	2.000	3.000	5.500	7.000	9.000
EC.6062.PBK.010 - Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan		ILMATE	1	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6062.PBK.011 - Evaluasi Kebijakan Peningkatan Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat		ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan Persen	1.000	2.000	3.500	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.500	4.000	5.000
05.01.19-Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional		3,12	3,18	3,23	3,29	3,35		1.800	1.900	2.000	2.200	2.500	-	-	-	-	-	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500
05.01.19.01-Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri									1.800	1.900	2.000	2.200	2.500	-	-	-	-	-	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500
EC.6077.PBK.003 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengaturan Jasa Industri		BSKJII	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6077.PBK.006 - Peningkatan Kontribusi PDB Sektor Jasa Industri melalui pembinaan Industri		BSKJII	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	800	900	1.000	1.200	1.500	-	-	-	-	-	800	900	1.000	1.200	1.500
05.02.06-Pengembangan KI Bintang Inti Industrial Estate	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintang Inti Industrial Estate		1,73	1,81	3,04	4,01	4,99	Rp Triliun	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.06.05-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6074.QDH.013 - Pengembangan Kawasan Industri Tertentu sebagai Pusat Hilirisasi dan Daya		KPAII	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.07-Pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon		5,99	5,99	6,00	6,11	6,22	Rp Triliun	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662	-	-	-	-	-	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662
05.02.07.02- Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK)									1.000	1.750	2.013	2.314	2.662	-	-	-	-	-	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662
EC.6074.QDH.002 - Pengembangan dan		KPAII	5	7	7	8	8	Badan usaha	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662	-	-	-	-	-	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662
05.02.08-Pengembangan KIT Wilmar	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Wilmar		13,14	13,27	13,38	13,46	13,55	Rp Triliun	850	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	850	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.08.02-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									850	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	850	1.500	1.725	1.984	2.281
EC.6074.QDH.003 - Fasilitas Kawasan Industri		KPAII	3	3	4	4	5	Badan usaha	850	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	850	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.09-Pengembangan KIT Batang	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Batang		4,14	4,50	4,82	5,07	5,32	Rp Triliun	-	500	575	-	-	-	-	-	-	-	-	500	575	-	-
05.02.09.03-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	500	575	-	-	-	-	-	-	-	-	500	575	-	-
EC.6074.PBP.005 - Penyusunan Rancangan Permenperin Pedoman Teknis Kawasan Industri		KPAII	-	1	1	-	-	Rekomendasi Kebijakan	-	500	575	-	-	-	-	-	-	-	-	500	575	-	-
05.02.10-Pembangunan KI Seafar	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafar		0,73	0,77	1,43	1,94	2,46	Rp Triliun	-	3.600	4.140	4.761	5.475	-	-	-	-	-	-	3.600	4.140	4.761	5.475
05.02.10.03-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	3.600	4.140	4.761	5.475	-	-	-	-	-	-	3.600	4.140	4.761	5.475
EC.6074.QDH.008 - Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di		KPAII	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	3.600	4.140	4.761	5.475	-	-	-	-	-	-	3.600	4.140	4.761	5.475
05.02.11-Pembangunan KI iSentra @Lamongan	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra Lamongan		1,37	1,56	1,72	1,85	1,97	Rp Triliun	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.11.01-Perizinan KI iSentra @Lamongan									-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.PBP.004 - Penataan Ruang Kawasan Peruntukan Industri dalam Mendukung Penguatan		KPAII	-	10	10	10	10	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.12-Pembangunan KI Ngawi	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi		- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,03	Rp Triliun	-	300	345	397	456	-	-	-	-	-	-	300	345	397	456
05.02.12.02-Penataan Ruang KI									-	300	345	397	456	-	-	-	-	-	-	300	345	397	456
EC.6074.QDH.006 - Fasilitas Percepatan Perizinan Berusaha		KPAII	-	1	1	1	1	Badan usaha	-	300	345	397	456	-	-	-	-	-	-	300	345	397	456
05.02.13-Pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketanang		2,31	2,40	2,47	2,53	2,59	Rp Triliun	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.13.07-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6074.QDH.007 - Fasilitas Peningkatan Investasi di Kawasan		KPAII	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.14-Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia		4,30	6,35	8,12	9,51	10,91	Rp Triliun	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.14.03-Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)									1.000	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.QDH.004 - Pembentukan Eco Industrial Park (KI Berwawasan		KPAII	5	6	7	8	10	Badan usaha	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.15-Pengembangan KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park		1,05	1,05	1,24	4,26	7,29	Rp Triliun	500	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	500	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.15.08-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									500	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	500	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6074.QDH.005 - Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan		KPAII	20	40	50	60	70	Badan usaha	500	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	500	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.16-Pengembangan KI Konawe	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe		305,96	306,24	306,48	306,68	306,87	Rp Triliun	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125
05.02.16.03-Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK)									1.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125
EC.6074.PEA.001 - Koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan		KPAII	3	6	6	6	6	kegiatan	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125
05.02.17-Pengembangan KI Stardust	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust		0,48	0,64	0,77	0,88	0,98	Rp Triliun	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.17.08-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6074.PBP.003 - Pemantauan Kawasan Industri Prioritas (PMO)		KPAII	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.18-Pengembangan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI IHIP Huabao		9,16	11,33	13,20	14,67	16,15	Rp Triliun	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.18.03-Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah) (APBN dan DAK)									1.000	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281
EC.6074.PBP.001 - Regulasi Pengembangan Perumahan Industri		KPAII	2	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.19-Pengembangan KI Morowali	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali		467,46	468,21	468,86	469,37	469,89	Rp Triliun	-	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	-	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.19.01-Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK)									-	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	-	2.500	2.875	3.306	3.802
EC.6074.QDH.009 - Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri RPJMN dengan Lokasi Bahan Baku		KPAII	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	-	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.20-Pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat		- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,01	0,23	Rp Triliun	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.20.08-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
EC.6074.QDH.001 - Kawasan Industri (KI) di Luar Jawa yang beroperasi		KPAII	5	11	14	14	15	Badan usaha	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.21-Pengembangan KI Pulau Obi	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi		2,53	5,04	7,21	8,91	10,62	Rp Triliun	-	1.000	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.500	3.000
05.02.21.08-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	1.000	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.500	3.000
EC.6074.QDH.010 - Peningkatan Kenyamanan Berusaha Melalui Kepatuhan Pelaksanaan		KPAII	-	10	20	25	30	Badan usaha	-	1.000	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.500	3.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay		349,49	352,65	355,38	357,52	359,67	Rp Triliun	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.22.08-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.QDH.012 - Fasilitas Implementasi Simbiosis Industri dan Efisiensi Energi dalam Upaya Dekarbonisasi di		KPAII	-	2	2	2	2	Badan usaha	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.23-Pembangunan KI Buli	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli		0,21	0,40	0,57	0,70	0,83	Rp Triliun	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.23.08-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.QDH.011 - Akreditasi Kawasan Industri dan Evaluasi		KPAII	-	30	30	30	30	Badan usaha	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.24-Pembangunan KI Fakfak	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak		- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,01	Rp Triliun	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.24.03-Penataan Ruang KI									1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
EC.6074.QMA.001 - Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan		KPAII	5	5	5	5	5	Rekomendasi Kebijakan	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.25-Pembangunan KI Takalar	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Takalar		- (tahap persiapan)	0,24	0,30	0,35	0,41	Rp Triliun	500	2.200	2.380	2.587	2.825	-	-	-	-	-	500	2.200	2.380	2.587	2.825
05.02.25.08-Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									500	2.200	2.380	2.587	2.825	-	-	-	-	-	500	2.200	2.380	2.587	2.825
EC.6074.QMA.001 - Pengelolaan Data dan		KPAII	5	1	1	1	1	Data	500	2.200	2.380	2.587	2.825	-	-	-	-	-	500	2.200	2.380	2.587	2.825
05.05.02-Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	04 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi		8,6	9,3	10	10,7	11,4	persen	17.700	37.250	47.413	54.976	61.997	-	-	-	-	-	17.700	37.250	47.413	54.976	61.997
05.05.02.01-Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia									2.000	10.500	11.750	13.614	14.605	-	-	-	-	-	2.000	10.500	11.750	13.614	14.605
EC.6046.PBK.006 - Fasilitas Pengembangan Teknologi Produksi Lateks Pekat Bebas Ammonia		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500
EC.6046.PBK.007 - Fasilitas dan Implementasi Pengembangan Teknologi Pengeringan Industri Pengolahan Karet melalui		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.500	2.500
EC.6046.PBK.008 - Komersialisasi Teknologi Produksi Lateks Pekat Bebas Ammonia		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6073.PBK.008 - Pengamanan dan Pengetahuan IDN dari dampak Persaingan Global		KPAII	-	1	1	1	2	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.QDH.002 - Peningkatan Partisipasi		KPAII	3	6	7	8	9	Badan usaha	1.000	3.000	3.450	3.968	4.563	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.450	3.968	4.563
EC.6073.QDH.003 - Pendampingan Industri dalam Akses Industri		KPAII	5	5	5	5	5	Badan usaha	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521
05.05.02.02-Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah Tinggi									4.000	14.000	21.000	24.500	28.000	-	-	-	-	-	4.000	14.000	21.000	24.500	28.000
EC.6046.PBK.009 - Komersialisasi Teknologi Cat berbasis Binder dari Lateks Karet Alam		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500
EC.6046.PBK.010 - Komersialisasi Teknologi Bk-Isoprene berbasis Karet Alam (Produk Karet Kualitas		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6068.QDI.001 - Industri yang Terfasilitasi Melalui Pendampingan dalam rangka Peningkatan		ILMATE	2	2	2	-	2	Industri	-	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
EC.6068.QDI.002 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor		ILMATE	4	1	-	-	-	Industri	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
EC.6068.QDI.007 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor		ILMATE	3	1	-	-	-	Industri	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
EC.6068.QDI.010 - Industri yang Terfasilitasi dalam rangka Promosi Investasi sektor Elektronika dan		ILMATE	-	-	1	2	3	Industri	-	-	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000
EC.6068.QDI.011 - Industri yang Terfasilitasi dalam rangka Peningkatan Ekspor dan Diversifikasi Produk		ILMATE	-	-	1	2	3	Industri	-	-	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6068.QDL012 - Industri yang terfasilitasi peningkatan Ekspor, Akses Pasar dan Kerjasama Internasional pada sektor Permesinan dan Alat Mesin		ILMATE	-	-	4	6	8	Industri	-	-	4.000	6.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	6.000	8.000
05.05.02.03-Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang									7.300	7.500	8.625	9.919	11.407	-	-	-	-	-	7.300	7.500	8.625	9.919	11.407
EC.6073.PEH.002 - Partisipasi Indonesia pada		KPAII	1	1	1	1	1	promosi	7.300	7.500	8.625	9.919	11.407	-	-	-	-	-	7.300	7.500	8.625	9.919	11.407
05.05.02.05-Optimalisasi Market Intelligence untuk Produk Ekspor Barang dan Jasa									4.400	5.250	6.038	6.943	7.985	-	-	-	-	-	4.400	5.250	6.038	6.943	7.985
EC.6073.PBK.004 - Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri		KPAII	3	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	4.400	5.250	6.038	6.943	7.985	-	-	-	-	-	4.400	5.250	6.038	6.943	7.985
05.05.04-Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		0,286	0,282	0,278	0,274	0,269		41.782	156.502	164.918	175.760	183.986	-	-	-	-	-	41.782	156.502	164.918	175.760	183.986
	05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing		208	209	210	211	212	produk						-	-	-	-	-					
05.05.04.01-Kebijakan dan Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis									25.400	87.152	89.065	95.427	95.055	-	-	-	-	-	25.400	87.152	89.065	95.427	95.055
EC.6044.PBK.002 - Fasilitas Pusat Logistik Bahan Baku untuk Industri Furnitur		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.PBK.003 - Pengembangan Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.PBK.005 - Peningkatan Utilisasi Industri Karet Alam		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.500	1.500
EC.6044.PBK.006 - Penyusunan Rancangan Pembentukan Badan Karet Nasional		IA	1	1	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	500	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1.000	-	-	-
EC.6044.PBK.007 - Penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Limbah Non-B3 Kelompok Kertas sebagai		IA	1	1	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-
EC.6044.PBK.008 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam perbaikan tata kelola Limbah Non-B3 kelompok		IA	-	-	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
EC.6044.PBK.012 - Pengembangan Pusat Data dan Profil Karakteristik Minyak Atsiri Indonesia		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	6.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	6.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.QDL001 - Fasilitas Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui		IA	-	30	30	30	30	Industri	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.QDL002 - Fasilitas Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui		IA	-	30	30	30	30	Industri	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.QDL003 - fasilitas Jaminan Pasokan KDU sebagai Bahan Baku Industri melalui		IA	-	25	25	25	25	Industri	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6044.QDL004 - Fasilitas Transisi Energi dan Pengelolaan Lingkungan di Industri Pulp dan Kertas		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6045.PBK.001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Menjamin Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui Pusat		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.PBK.002 - Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pusat Flavor and Fragrance berbasis		IA	2	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
EC.6046.PBK.001 - Pengembangan Pusat Data dan Profil Karakteristik Minyak Atsiri Indonesia		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.500	2.000	2.000	2.000
EC.6046.PBK.003 - Pilot Project Pemanfaatan Cat berbasis Binder dari Lateks Karet Alam		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6046.PBK.004 - Peningkatan Kualitas Produk Karet Alam melalui Karet Alam Berkelanjutan		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6046.PBK.011 - Fasilitas Pengembangan Teknologi Bio-Isoprene berbasis Karet Alam		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.500	2.500
EC.6046.QDH.003 - Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Furnitur dan Kayu Olahan		IA	13	15	15	15	15	Badan usaha	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EC.6046.SDA.001 - Pengembangan Inovasi		IA	-	10	12	12	12	produk	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6046.SDB.001 - Fasilitas Pengembangan Produk Greenfiber		IA	-	1	1	1	1	Purwarupa	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6046.SDC.001 - Fasilitas Pengembangan Konsep Desain Industri		IA	-	20	20	20	20	Desain	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6046.UAB.001 - Digitalisasi Rantai Pasok		IA	-	1	1	1	1	Sistem Informasi	-	1.500	1.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.000	2.000
EC.6046.UAB.002 - Pembangunan Platform Digital untuk Pengawasan dan Pengendalian Neraca Massa KDU sebagai bagian		IA	-	-	1	1	-	Sistem Informasi	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	-
EC.6047.QDH.003 - Perencanaan dan Pembinaan Standar di		IA	-	15	15	15	15	Badan usaha	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6047.QDI.001 - Fasilitas dan Pendampingan Sertifikasi Sustainability		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6047.QDI.002 - Fasilitas dan Pendampingan Sertifikasi Sustainability		IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6047.QIH.002 - Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan kebijakan di bidang		IA	20	30	30	30	30	Badan usaha	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6048.PBK.001 - Fasilitas Industri Pengolahan Minyak Kemiripan Berbasis		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6048.PBK.002 - Komersialisasi Aspal Karet Berbasis Karet Alam		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6072.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan		KPAII	8	10	11	12	14	Rekomendasi Kebijakan	2.150	3.000	3.450	3.968	4.563	-	-	-	-	-	2.150	3.000	3.450	3.968	4.563
EC.6072.PBK.002 - Pengamanan dan Penyelamatan IDN dari Dampak Persaingan Global		KPAII	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6072.PBK.003 - Penguatan Struktur Industri Melalui Kebijakan Non Fiskal		KPAII	-	1	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6072.PBK.004 - Pengembangan Kebijakan Tata Niaga Ekspor-Impor dalam rangka Jaminan Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		KPAII	-	3	3	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.450	3.968	4.563	-	-	-	-	-	-	3.000	3.450	3.968	4.563
EC.6072.PBK.005 - Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor		KPAII	-	1	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6072.PBK.006 - Peningkatan Kinerja Logistik Industri dalam rangka meningkatkan Daya Saing		KPAII	-	1	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6072.PBK.007 - Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dalam rangka		KPAII	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6072.QDI.001 - Fasilitas dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan		KPAII	10	6	8	10	12	Industri	1.550	1.200	1.380	1.587	1.825	-	-	-	-	-	1.550	1.200	1.380	1.587	1.825
EC.6072.QDI.002 - Fasilitas dan Pendampingan Peningkatan Iklim Usaha		KPAII	-	9	11	13	15	Industri	-	1.800	2.070	2.381	3	-	-	-	-	-	-	1.800	2.070	2.381	3
EC.6073.PBK.001 - Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi		KPAII	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	700	750	863	992	1.141	-	-	-	-	-	700	750	863	992	1.141
EC.6075.QMA.001 - Layanan Data dan	Setjen		2	2	2	2	2	layanan	1.623	902	2.102	2.852	2.602	-	-	-	-	-	1.623	902	2.102	2.852	2.602
EC.6075.RAN.001 - Pengembangan Sistem	Setjen		1	1	1	1	1	unit	3.377	6.000	7.200	7.920	8.712	-	-	-	-	-	3.377	6.000	7.200	7.920	8.712

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.05.04.02-Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri									2.000	44.500	47.875	48.756	53.220	-	-	-	-	-	2.000	44.500	47.875	48.756	53.220
EC.6049.PBK.003 - Promosi Produk-produk Baru Industri Karet Hulu (Karet Hulu, Binder cat, Veneer		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6049.PEH.001 - Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk		IA	1	1	1	1	1	promosi	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6049.PEH.003 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan		IA	-	1	1	1	1	promosi	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6049.PEH.004 - Fasilitas Promosi dan Temu Bisnis Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Kertas dan Pencetakan Ramah Lingkungan serta		IA	-	3	3	-	-	promosi	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	-	-
EC.6049.PEH.005 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Industri		IA	-	2	2	2	2	promosi	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
EC.6073.PEH.003 - Promosi Internasional Industri		KPAII	-	3	3	3	4	promosi	-	22.500	25.875	29.756	34.220	-	-	-	-	-	-	22.500	25.875	29.756	34.220
05.05.04.03-Kerja Sama untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri									14.382	24.850	27.978	31.577	35.711	-	-	-	-	-	14.382	24.850	27.978	31.577	35.711
EC.6049.PBK.002 - Rekomendasi Peningkatan Kerjasama Di Sektor Industri Hasil Hutan dan		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6050.PBK.002 - Peningkatan Kontribusi ekspor produk sektor industri hasil hutan		IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6072.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan dan		KPAII	2	-	-	-	-		700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-
EC.6072.UAC.001 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan dan		KPAII	50	100	120	140	150	orang	400	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	400	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PBK.002 - Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Perundingan		KPAII	6	6	7	8	9	Rekomendasi Kebijakan	2.500	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	2.500	6.000	6.900	7.935	9.125
EC.6073.PBK.003 - Analisis Potensi Pengembangan Akses Produk Industri		KPAII	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	600	690	794	913	-	-	-	-	-	500	600	690	794	913
EC.6073.PBK.005 - Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional		KPAII	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	800	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	800	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PBK.006 - Pemanfaatan Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri		KPAII	1	-	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	2.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.032	-	-	-	-
EC.6073.PBK.007 - Analisa Kebutuhan SDI dan Potensi Pemenuhan SDI dari Negara Mitra		KPAII	1	1	1	1	2	Rekomendasi Kebijakan	500	750	863	992	1.141	-	-	-	-	-	500	750	863	992	1.141
EC.6073.PEC.001 - Fasilitas dan Penajagan Kerjasama SDI dengan		KPAII	2	2	2	3	3	Kesepakatan	975	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	975	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PEC.002 - Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Forum Kerja		KPAII	2	2	2	2	2	Kesepakatan	3.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	3.000	6.000	6.900	7.935	9.125
EC.6073.PEC.003 - Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan		KPAII	1	1	1	1	1	kegiatan	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PEH.001 - Peningkatan Peluang		KPAII	1	2	2	3	3	promosi	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6073.QDH.001 - Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan		KPAII	2	2	2	3	3	Badan usaha	975	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	975	1.500	1.725	1.984	2.281
05.05.06-Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV)	01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global		49	51	53	55	57	persen	4.056	12.000	12.500	18.000	12.000	-	-	-	-	-	4.056	12.000	12.500	18.000	12.000
	02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global		23	25	28	33	36	persen						-	-	-	-	-					
05.05.06.04-Penyelenggaraan Forum Bisnis dan Business Matching bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk Dalam									4.056	12.000	12.500	18.000	12.000	-	-	-	-	-	4.056	12.000	12.500	18.000	12.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6068.QDI.003 - Industri yang Terfasilitasi Melalui Kerjasama Internasional Sektor Logam, Mesin, Alat		ILMATE	2	2	2	2	2	Industri	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6068.QDI.004 - Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri Logam, Mesin, Alat		ILMATE	5	10	10	10	10	Industri	3.056	7.000	7.500	13.000	7.000	-	-	-	-	-	3.056	7.000	7.500	13.000	7.000
TOTAL									348.240	1.056.240	1.208.674	1.318.411	1.416.488	-	-	-	-	-	348.240	1.056.240	1.208.674	1.318.411	1.416.488

LAMPIRAN III KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Mewujudkan tata kelola pengembangan industri yang lebih kondusif dan relevan dengan kondisi terkini	Setjen	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2027
2.	RUU tentang Kawasan Industri	Sinkronisasi dan Koordinasi antar K/L dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri	Ditjen KPAIL	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
3.	RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014	Setjen	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
4.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025-2029	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015	Setjen	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
5.	RPerpres tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri	Amanat PP Nomor 20 Tahun 2024	Ditjen KPAIL	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2029

LAMPIRAN IV PEDOMAN KINERJA

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2021	2025	2023	2025
Tj	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional						
Tj.1	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	17,32	18,17	18,66	19,15	19,7	20,56
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sektor industri pengolahan nonmigas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan PDB nasional sehingga diharapkan pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan nonmigas terus didorong dapat tumbuh pesat.							
SUMBER DATA							
Data distribusi PDB yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB dihitung dengan membagi nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan Nonmigas dengan total PDB Atas Dasar Harga Berlaku dikali 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target						
			2025	2026	2027	2028	2029		
Tj	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional								
Tj.2	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	5,30	5,93	6,89	7,95	8,26	8,58		
DEFINISI/DESKRIPSI									
Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri, dan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas. PDB industri pengolahan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan dalam jangka waktu tertentu. PDB industri pengolahan terdiri dari sektor industri batubara dan pengilangan migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM dan sektor industri pengolahan nonmigas yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Perindustrian mengupayakan peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas setiap tahunnya. Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS pada awal tahun anggaran berikutnya.									
SUMBER DATA									
Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).									
CARA MENGHITUNG (FORMULA)									
Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas = (PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1) dikali 100%.									
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen		Maksimasi		Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja			Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Tj	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional								
Tj.3	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan			4,9	5,5	6,52	7,55	7,86	8,14
DEFINISI/DESKRIPSI									
PDB industri pengolahan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan dalam jangka waktu tertentu. PDB industri pengolahan terdiri dari sektor industri batubara dan pengilangan migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM dan sektor industri pengolahan nonmigas yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.									
SUMBER DATA									
Data pertumbuhan PDB industri pengolahan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).									
CARA MENGHITUNG (FORMULA)									
Pertumbuhan PDB industri pengolahan = (PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Periode (t-1) dikali 100%.									
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen		Maksimasi		Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
S1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional						
S1.1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas		6,28	7,33	8,40	8,74	9,09
DEFINISI/DESKRIPSI							
PDB Kelompok Industri Prioritas terdiri atas: Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman, Logam Dasar, Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dan Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki							
SUMBER DATA							
Data pertumbuhan PDB industri prioritas yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Kemenperin.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
(PDB Atas Dasar Harga Konstan Kelompok Industri Prioritas Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Kelompok Industri Prioritas Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Kelompok Industri Prioritas Periode (t-1) dikali 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif						
S2.1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	697,50	775,20	852,90	930,60	1.008,3	1.086,0
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN dimana nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah.							
SUMBER DATA							
Nilai realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah investasi PMA dan PMDN sektor industri pengolahan nonmigas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Rp Triliun	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif						
S2.2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	120,7	123,1	126,2	133,4	138,8	147,7
DEFINISI/DESKRIPSI							
Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.							
SUMBER DATA							
Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas dari Sakernas.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Rp. Juta/ Orang/Tahun		Maksimasi	BPSDMI				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif						
S2.3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	13,80	14,15	14,68	15,02	15,47	15,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional.							
SUMBER DATA							
Data Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	BPSDMI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif						
S2.4	Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	NA	5,26	5,38	5,45	5,60	6,02
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai Pertumbuhan PDB IKM menggunakan data pendekatan nilai output.							
SUMBER DATA							
Data publikasi BPS dan diolah Kemenperin.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
PDB IKM Atas Dasar Harga Konstan Periode (t) - PDB IKM Atas Dasar Harga Konstan Periode (t-1)/PDB IKM Atas Dasar Harga Konstan Periode (t-1) dikali 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Ditjen IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S3	Meningkatnya Persebaran Industri						
S3.1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	32,11	32,65	33,25	33,36	34,03	36,15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa mencerminkan tingkat persebaran industri di provinsi-provinsi di luar pulau Jawa							
SUMBER DATA							
Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Kemenperin.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Total PDRB sektor industri Provinsi di luar Pulau Jawa dibagi PDB sektor industri dikalikan 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Ditjen IKMA dan KPAIL					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi						
S4.1	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	73	87	106	119	139	156
DEFINISI/DESKRIPSI							
INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (<i>management and organization</i>), orang dan budaya (<i>people and culture</i>), produk dan layanan (<i>product and services</i>), teknologi (<i>technology</i>), dan operasi pabrik (<i>factory operation</i>).							
SUMBER DATA							
Hasil pengolahan data Assesment INDI 4.0 dari SIINAS							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Dengan melakukan <i>assessment</i> INDI 4.0 pada setiap industri dengan berlandaskan pada beberapa kriteria penilaian yang telah di tentukan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Perusahaan	Maksimasi	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen IKFT, dan Ditjen ILMATE					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan						
S5.1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	6,752	6,75	6,79	6,85	6,90	6,93
DEFINISI/DESKRIPSI							
Industri prioritas dekarbonisasi mencakup industri semen, pupuk, besi dan baja, alumunium, asam nitrat, dan industri lainnya sesuai komitmen nasional.							
SUMBER DATA							
Sumber data dari SIINas yang diolah.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Realisasi emisi GRK industri prioritas dekarbonisasi pada tahun ke-n.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Juta Ton CO2-Eq	Maksimasi	BSKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan						
S5.2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	10	11	12	13	14	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Perbandingan antara volume/berat material daur ulang (recycle content) dengan volume/berat bahan baku total. Sektor industri dibatasi pada subsektor pulp dan kertas, tekstil, kaca keramik, dan logam yang telah tersedia standar industri hijaunya.							
SUMBER DATA							
Sumber data dari SIINas yang diolah.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung proporsi input bahan baku yang berasal dari material daur ulang (<i>recycled content</i>) terhadap total input bahan baku di sektor industri pada akhir tahun berjalan, kemudian dikalikan 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	BSKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
S6.1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	74,25	74,60	74,85	75,10	75,30	75,60
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor, merupakan perbandingan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri.							
SUMBER DATA							
Data ekspor nasional yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor adalah Ekspor Industri Pengolahan nonmigas dibagi total Ekspor Nasional dikali 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT, IKMA, dan KPAII					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
S6.2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	7,9	8,6	9,3	10	10,7	11,4
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari pengelompokan HS produk industri berteknologi tinggi oleh UNIDO/OECD dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia.							
SUMBER DATA							
Data ekspor sektor industri yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari 1520 HS produk industri berteknologi tinggi dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
S6.3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	0,294	0,286	0,282	0,278	0,274	0,269
DEFINISI/DESKRIPSI							
Merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa terdiversifikasi ekspor untuk produk berbasis SDA Indonesia. Dihitung dengan produk pada level HS 6 digit, serta didasarkan pada klasifikasi produk berdasarkan tingkat teknologi oleh Lall.							
SUMBER DATA							
Data yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai HHI antara 0 – 1. Semakin mendekati 1 artinya ekspor produk tersebut semakin terkonsentrasi pada sedikit jenis produk ekspor, sebaliknya semakin mendekati 0 maka ekspor produk tersebut semakin terdiversifikasi. Diversifikasi ekspor dapat meningkatkan nilai ekspor secara keseluruhan sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Minimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
S6.4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	179	208	209	210	211	212
DEFINISI/DESKRIPSI							
Merupakan jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang memiliki keunggulan komparatif. Produk industri yang berbasis SDA diklasifikasikan berdasarkan level HS 6 Digit dan klasifikasi Lall. Semakin banyak produk dari sektor industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang diolah yang memiliki daya saing, semakin kuat dan kompetitif sektor industry tersebut. Jumlah produk yang memiliki daya saing dapat mencerminkan tingkat inovasi, efisiensi, dan kualitas dari proses pengolahan sumber daya alam yang menciptakan produk yang dapat bersaing di pasar. Jika jumlah produk industri berbasis SDA yang berdaya saing meningkat maka akan semakin meningkatkan ekspor dan kontribusi ekspor secara keseluruhan terhadap PDB.							
SUMBER DATA							
Data yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Revealed Comparative Advantage dari Indonesia dalam produk industri berbasis sumber daya alam yang diolah (skor RCA) = (Total nilai ekspor Indonesia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolah / Total nilai ekspor Indonesia) / (Total nilai ekspor Dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam. yang diolah / Total nilai ekspor Dunia)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Produk	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
S7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik							
S7.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian	80,01	86,45	86,45	87,5	87,5	88,5	
DEFINISI/DESKRIPSI								
Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.								
SUMBER DATA								
Data Indeks RB yang dipublikasikan oleh KemenPAN dan RB								
CARA MENGHITUNG (FORMULA)								
Menghitung total nilai komponen pembentuk Indeks RB berdasarkan bobot yang telah ditentukan.								
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA						
Nilai	Maksimasi	Setjen dan Itjen						